DIALOG BUDAYA SPIRITUAL

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2000

TIDAK DIPERDAGANGKAN

Dialog Budaya Spiritual

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2000

PENGANTAR

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Depdiknas), pada tanggal 18 s.d. 20 Juni 1999, bertempat di Hotel Mars'91, Cipayung, Bogor telah menyelenggarakan *dialog budaya* dengan para pakar dari berbagai disiplin ilmu dan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dialog, membahas tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari berbagai disiplin ilmu dan sudut pandang, dengan tujuan memperoleh wawasan baru mengenai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memperoleh masukan bagi pengambilan kebijakan Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam upaya pelestarian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai perwujudan kebudayaan bangsa.

Dalam dialog budaya tersebut disampaikan beberapa makalah yaitu :

1. "Penghayatan Kepercayaan: Substansi dan Metode"
   Disampaikan oleh : Prof. Dr. Edi Sedyawati
   Sebagai moderator : Dr. Endang Sri Hardiati
2. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sebagai Wujud Budaya Spiritual.
   Disampaikan oleh : Prof. Dr. Usman Pelly
   Pembahas : 1. Prof. Dr. Parsudi Suparlan
   2. Dr. Fridolin Ukur
   3. Prof. Dr. Yunus Melalatoa
   Sebagai moderator : Drs. Abdurrahman
3. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Perspektif Gerakan Reformasi
   Disampaikan oleh : Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomihardjo
   Pembahas : 1. Dr. Kuntoro Wiryomartono

2. Drs. Ida Bagus Agastia
3. Brigjen Sumarsono

Sebagai moderator : Prof. Dr. Hasan Muarif Ambary

4. Dinamika Gerakan Spiritual Dalam Perspektif Sejarah
   Disampaikan oleh : Dr. Mukhlis Paeni
   Pembahas : 1. Prof. Dr. Hasan Muarif Ambary
   2. Dr. Nurhadi Magetsari
   3. Prof. Dr. Zurkoni Yahya,SH.M Hum.
   Sebagai moderator : Dr. I G.N. Anom

5. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Perspektif Hukum dan Perundangan
   Disampaikan oleh : Jusuf Kertanegara, SH
   Pembahas : 1. Prof. Bismar Siregar, SH
   2. Moh. Nahar Nahrowi dan Moh. Zahid, SH
   3.Drs. K. Permadi, SH
   Sebagai moderator : Drs. Nunus Supardi

6. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Perspektif Filologis dan Kesusasteraan.
   Disampaikan oleh : Drs. Mohammad Damami, MA
   Pembahas : 1. Prof. Dr. Chamamah Suratno
   2. Prof. Dr. Achadiati Ikram
   3. Prof. Dr. H. Moh. Ardani
   Sebagai moderator : Dr. Hasan Alwi

7. Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   Disampaikan oleh : Drs. Abdurrahman Widyakusuma
   Pembahas : 1. Drs. Toeloes Koesoemoboedojo
   2. R. Djoko Sumono Sumadisastro
   Sebagai moderator : Dr. Sri Hastanto, S.Kar

Pada akhirnya dialog budaya menghasilkan suatu rumusan/ kesimpulan, yang disusun oleh Tim Perumus yaitu :

1.	Prof. Dr. Hasan Muarif Ambary	Ketua
2.	Dr. Hasan Alwi	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomihardjo	Anggota
4.	Dr. I G.N. Anom	Anggota
5.	Dr. Anhar Gonggong	Anggota
6.	Dr. Sri Hastanto, S.Kar	Anggota
7.	Dr. Endang Sri Hardiati	Anggota
8.	Drs. Nunus Supardi	Anggota
9.	Drs. Abdurrahman Widyakusuma	Anggota
10.	Drs. Luthfi Asiarto	Anggota

Dalam usaha memberikan wawasan kepada masyarakat tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka Direktorat Jenderal Kebudayaan berusaha menerbitkan dalam bentuk buku makalah-makalah dimaksud berikut rumusan hasilnya. Dengan diterbitkan-nya buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan segala keragamannya.

Direktur Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan Nasional

I G.N. Anom

DAFTAR ISI

PENGHAYATAN KEPERCAYAAN: SUBSTANSI DAN METODE

Oleh:
Prof. Dr. Edi Sedyawati

Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya melihat permasalahan "kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dalam kaitan dengan masalah pelingkupnya yang lebih luas, yaitu "penghayatan kepercayaan". Dalam hal ini, permasalahan akan disoroti dari segi keanekaragamannya, dan ini dilihat tidak hanya dalam konteks kekinian, melainkan juga dalam lintasan aneka perkembangan dari jaman ke jaman.

Tinjauan dari segi substansi akan mengharuskan kita menyimak, apakah kiranya hal yang dipercayai itu. Dalam rumusan yang kita sepakati dewasa ini, untuk merangkum segala rincian penjelasan dari berbagai sistem kepercayaan sekitar "yang adikodrati" dan "yang tertinggi/terbenar" itu, kita gunakan "Tuhan Yang Maha Esa". Keputusan ini sudah tentu menjadi suatu sarana yang efektif untuk membentuk kerukunan hidup beragama di dalam bangsa Indonesia yang heterogen ini. Semua orang tahu, bahwa masing-masing agama, maupun masing sistem kepercayaan yang berlaku khusus pada sukubangsa ataupun sub-sukubangsa tertentu, memiliki nama atau istilah yang khas bagi pengertian "yang tertinggi, terbenar, yang adikodrati" itu. Ada kalanya pula terdapat konsep keagamaan di mana "yang maha benar" itu tidak hanya satu. Hal ini dapat dicontohkan dengan pemikiran Samkhya mengenai keduaan *purusan* dan *prakerti*.

Dalam hal "yang maha benar" itu adalah tunggal, maka penjelasan falsafati mengenai hakikat sifatnya pun dapat diperbedakan ke dalam tiga atau empat tipe. Tipe pertama adalah konsep Tuhan sebagi persona, kepada siapa manusia dapat memohon dan berdoa. Tipe ini dapat dicontohkan oleh Allah dalam agama Islam dan Nasrani, Isvara dalam agama Hindu-Saiwa, atau Sang Hyang Widi Wasa dalam agama

Hindu Dharma di Bali sekarang, serta Bungan Malan dalam kepercayaan Dayak Kenyah. Dalam kepercayaan sukubangsa ataupun subsukubangsa lainnya tentunya tipe ini dapat dijumpai pula. Adapun tipe kedua adalah konsep "yang maha benar" sebagai jiwa semesta, seperti yang disebut dengan nama Brahman dalam pemikiran Vedanta, yang berawal pada kitab-kitab Upanisad. Dalam alam sosial-budaya yang sama di India, dalam waktu yang bersamaan pada pasca-Upanisad, tampillah Siddartha Gautama dengan ajaran Buddhanya, yang mengajarkan tentang "yang maha benar" itu sebagai ketiadaan yang mutlak, yang disebut Nirvana. Ini merupakan tipe ketiga. Dalam perkembangan agama Buddha selanjutnya (sesudah Therevada) ke dalam berbagai aliran, seperti Mahayana, Mantrayana, Yogacara, Vajrayana, dan lain-lain, di samping terkembang variasi metode peribadatannya, juga penamaan untuk "yang maha benar" itu berkembang, baik menjadi Sunyata dan Mahasunyata yang tetap merupakan konsep abstrak, maupun ke dalam nama persona seperti Vajradhara, ataupun nama-nama lain yang merupakan 'dewata' pusat dalam mandala-mandala. Namun dalam hal ini tetap perlu dilihat perbedaan antara konsep dewata Hindu Buddha, di mana dalam agama Hindu landasan penjelasan mengenai dewata pada umumnya adalah mitologi, sedangkan dalam agama Buddha landasan penjelasannya adalah semata-mata konsep-konsep falsafati. Namun ini tidaklah berarti bahwa konsep-konsep falsafati dalam agama Hindu tidak dikaitkan sama sekali dengan sosok kedewataan.

Selanjutnya tipologi penjelasan mengenai "yang maha benar" itu mungkin masih dapat dilengkapi dengan konsep yang ada pada berbagai sistem kepercayaan etnik, yaitu sebagai kekuatan gaib di alam raya yang dapat mengintervensi kehidupan manusia. Kekuatan gaib ini ada kalanya dijelaskan sebagai berkemampuan untuk mewujud ke dalam bentuk-bentuk atau gejala-gejala tertentu.

Dalam perkembangan keagamaan dari masa ke masa telah terjadi silang-menyilang penyerapan gagasan, tidak hanya di dalam satu

jalur perkembangan agama tertentu, melainkan juga antara satu agama dan agama lain. Kasus 'pertemuan' dua agama yang paling banyak dikenal dalam sejarah agama di Indonesia adalah antara Hindu dan Buddha pada masa Singasari-Majapahit, yang kemudian dirumuskan oleh Mpu Tantular sebagai "bhinneka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa". Pertemuan, atau bahkan identifikasi ini, terjadi pada tingkat pemahaman konsep ketuhanan, dengan tetap membuka peluang bagi perbedaan peribadatan.

Meskipun secara tipologis telah diperbedakan tiga atau empat konsep untuk menjelaskan mengenai "yang maha benar" itu, dalam kenyataan wacana keagamaan seringkali terdapat pernyataan bahwa "hakikat Tuhan" itu tidak mudah dijelaskan. Ketidakcukupan kategori yang dikenal manusia akhirnya membawa kepada rumusan bahwa "Gusti Allah iku tan kena kinaya ngapa" (Tuhan tidak dapat dijelaskan kebagaimanaannya). Dalam rumusan Hindu, itu dikatakan Acintya (tak terpikirkan). Dalam hal ini dapat pula dikemukakan dugaan bahwa di samping disebabkan oleh perkembangan internal, perluasan alternatif penjelasan sebagai akibat hubungan serap-menyerap antar sistem kepercayaan itu pun mengambil bagian dalam pemastian rumusan bahwa Tuhan itu tak pernah akan dapat dideskripsikan dengan sempurna oleh manusia.

Demikianlah pembahasan mengenai substansi "*yang dipercayai*" dilihat pada rentangan luas *sistem-sistem kepercayaan.*

Dalam rentangan luas pula dapat ditinjau berbagai metode pelaksanaan usaha hubungan manusia dengan Tuhan atau "yang maha benar" itu. Metode ini tentu pula dapat diharapkan amat bervariasi jika dilihat pada luasan aneka sistem kepercayaan. Secara garis besar metode penghubungan itu dapat dipilah antara aspek yang berkenaan dengan *sikap batin* dan yang berkenaan dengan *tindakan-tindakan ritual.*Tindakan ritual itu sendiri dapat dipilah antara yang menyangkut disiplin jasmaniah dan yang menyangkut penggunaan alat-alat pembantu.

Sikap batin yang lazim dituntut pada kebanyakan agama adalah pelepasan diri dari egoisme dalam segala aspeknya. Penjabarannya seringkali tertuang dalam rumusan "berserah diri", meskipun ini dapat mempunyai implikasi yang bervariasi antara "berserah diri kepada Yang Maha Kuasa" dan "melepaskan diri dari keterikatan apapun". Mengenai yang terakhir itu pun terdapat variasi antara pelepasan keterikatan dalam kaitan sosial (seperti pada ajaran Saiva Pasupata), dan pelepasan keterikatan dari apapun yang ada fana di dunia ini. Jenjang-jenjang pancapaian spiritual dalam upaya *mendekatkan* diri, ataupun *mempersatukan* diri dengan "yang maha benar" atau "yang maha suci" itu seringkali terkait dengan takaran-takaran pemahaman dan penghayatan yang dituntutkan kepada pelaku. Dalam banyak sistem kepercayaan perbedaan-perbedaan tataran kesiapan pelaku itu diperlihatkan dalam struktur dari organisasi komunitasnya. Dalam komunitas Islam di Jawa misalnya, diperbedakan antara kyai, santri, dan awam. Ini pun masih dapat dikaji secara lebih cermat, dan demikian pula yang terdapat pada komunitas-komunitas keagamaan lain.

Adapun mengenai tindakan-tindakan ritual, khususnya yang banyak mewarnai aliran-aliran kepercayaan di Indonesia, dapat dikelompokkan secara garis besar atas *bersemadi, berpuasa,* dan *berpantang*. Berbagai tata laku beserta teknik-tekniknya seputar tindakan-tindakan itu telah digariskan dalam berbagai satuan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan perangkuman ini, apabila hendak dipertanyakan kaitan antara organisasi-organisasi penghayat dengan agama-agama besar sebagai sumber konsep dan sumber norma bagi perilaku keagamaan, maka kiranya kajian diakronik pada jalur substansi kepercayaan dan metode peribadatan akan banyak dapat membantu dalam menerangi permasalahannya.

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SEBAGAI WUJUD KEBUDAYAAN SPIRITUAL

Oleh:
Prof. Dr. Usman Pelly

Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Bagaimanakah "bentuk ungkapan" kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kelompok-kelompok masyarakat paguyuban penghayat? Menurut Paguyuban **Gunung Jati** dari Jawa Timur, "Tuhan Yang Maha Esa adalah Yang Maha tunggal, yang berkedudukan *di pagelaran jagad.* " Mereka percaya, selama jagad itu masih ada *(gumelar),* disitulah Tuhan itu berada. Jarak antara manusia dengan Tuhan diungkapkan pula dengan kata-kata yang sederhana "*Adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan,*" yang artinya "jauh tanpa batas, dekat tanpa bersentuhan" (Setiawan, 1994). Sedang paguyuban **Habonaron Do Bona** dari Sumatera Utara menyatakan bahwa "Tuhan Yang Maha Esa, awal atau permulaan dari segala sesuatu yang ada. Tuhan adalah *Naibata* (satu, tunggal atau *sada*). Dia adalah yang Maha Kuasa (*namar kuasa, namar huasa).* Dia yang menciptakan dan mengatur kehidupan, menjadikan siang dan malam, pembimbing dan penyelamat kehidupan manusia" (Tanjung dkk, 1991). Menurut Paguyuban **Ulah Rasa Batin** (PURBA) dari Jawa Tengah, "Tuhan adalah yang menciptakan alam beserta seluruh isinya *(gumelaring jagad sakisine).* Dia wajib disembah siang, malam dan sepanjang masa" (Soetomo dkk, 1990/1991).

Dari berbagai rumusan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti tersebut diatas, maka Sarasehan Nasional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bulan November 1981 merumuskan bahwa: "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dari pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan

prilaku ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau peribadatan serta pengamalan budi luhur." Rumusan ini dalam berbagai pertemuan antar organisasi paguyuban penghayat yang berjumlah sekitar 200 orang, tetap disepakati, dan dijadikan acuan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kebudayaan mengukuhkan rumusan itu ke dalam sebuah surat keputusan (No. 0957/F1/V/E.88). Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan pula bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bukanlah sekedar filsafat atau olah fikir, pemusatan kesadaran yang utuh *(mesu budi)* dalam keyakinan dan penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ditjen Kebudayaan, 1991/1992).

Berdasarkan ajaran yang disampaikan berketurunan, para penghayat meyakini bahwa semua makhluk di muka bumi diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk yang diciptakanNya, dikendalikanNya dari tempat yang maha rahasia, tempat gaib tempat yang tidak berwujud. Tuhan Yang Maha Esa menurut mereka memiliki sifat yang "serba Maha." Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Tahu, Maha Mendengar, Maha Benar, Maha Jujur, Maha Adil, Maha Pencipta, Maha Penuntun, dan Maha Pelindung. Dengan sifat-sifat ini Tuhan mengendalikan kehidupan manusia di dunia, sejak dia berada dalam kandungan *(bertian),* sampai ke liang lahat ke dalam kehidupan abadi di akhirat.

Dari konstelasi pemikiran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas, maka wujud budaya spiritual yang penting dan terus berkembang dalam kehidupan manusia penghayat adalah sebagai berikut :

(1) Ajaran yang mengandung nilai religius seperti :
   a. Ajaran tentang Ketuhanan Yang Maha Esa
   b. Ajaran tentang kewajiban manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa

(2) Ajaran yang mengandung nilai moral seperti:

a. Nilai moral yang terkandung dalam hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri.
b. Nilai moral yang terkandung dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya.
c. Nilai moral yang terkandung dalam hubungan antara manusia dengan alam.

Nilai-nilai religius dan moral tersebut diatas memberikan gambaran awal dari wujud budaya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dasar-dasar hubungan antara manusia dengan sang pencipta (vertikal) dan hubungan antara sesama manusia dan alam jagat raya (horizontal) (Pelly, 1993;1994).

Wujud Kebudayaan Spiritual

Kepercayaan-kepercayaan religius tidak hanya melukiskan dan menjelaskan makhluk-makhluk sakral seperti Tuhan, dewa atau malaikat-malaikat, dan alam gaib seperti surga dan neraka, tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah hubungan makhluk dan alam gaib itu dengan dunia kehidupan manusia yang nyata (Notingham, 1997). Sebab itu, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari para pendukung (penghayat) akan lebih banyak dilihat implikasinya dalam kehidupan budaya spiritual mereka. Disamping itu, kepercayaan religius itu juga menunjukkan bahwa apa yang dapat dilihat secara kasat-mata, akan selalu menampilkan makna simbolik yang berbeda. Seperti "roti" dan "anggur" dalam upacara ekaristi (bersyukur) dalam agama Katolik yang melambangkan "tubuh" dan "darah" Kristus yang telah bangkit, atau dalam kaitan yang lebih sederhana, "beras kunyit" dan "bunga rampai" dalam acara tepung tawar orang Melayu yang melambangkan hubungan "kekuatan semangat" dan "kedamaian roh" dalam tubuh seseorang. Benda-benda gaib yang tidak dapat digapai panca indra atau benda-benda sakral yang terlihat jelas, menurut Notingham (1977) adalah rona kepercayaan yang didasarkan atas keyakinan, bukan atas bukti.

Dan semua itu adalah wujud budaya spiritual dalam kehidupan para pendukungnya.

Ibadat (ritus) dan upacara religius adalah bahagian dari tingkah laku religius yang aktip dan dapat diamati, termasuk mantra, upacapan-ucapan formal tertentu, samadi, nyanyian, doa, pemujaan, puasa, tarian, mencuci, membaca, memakai pakaian khusus dan menyembelih atau melakukan korban. Sifat sakral pada ritus, seperti halnya benda-benda sakral yang dipergunakan dalam ritus itu, tidak tergantung kepada ciri hakiki dari tingkah laku atau benda-benda material itu, tetapi kepada mental dan sikap-sikap emosional kelompok masyarakat penganut kepercyaaan itu. Terutama, dalam konteks sosio-kultural pada tempat di mana dilaksanakannya ritus itu. Oleh karena itu, dari segi pendekatan sosio-antropologis, untuk memahami kepercayaan-kepercayaan religius dan wujud budaya dari kepercayaan itu, adalah penting untuk langsung mengamati ritus atau upacara religius suatu masyarakat pemeluknya. Dengan pendekatan ini, diharapkan seseorang akan mendapatkan tidak hanya data dan informasi yang lebih akurat, tetapi juga persepsi yang mendalam mengenai objek pengamatannya. Fungsi penting dari sebuah ritus tidak hanya memperkuat keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan dunia gaib, atau memberikan *"out-let"* (cara-cara pengungkapan atau penyaluran) emosi keagamaan secara simbolik, tetapi juga untuk memperkuat sistem dan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat itu. Kebersamaan menjalankan ritus kepercayaan dalam kelompok masyarakat pemeluk kepercayaan menjadi sangat penting, karena dalam kebersamaan itu keajegan atau konsistensi dari sistem dan nilai-nilai dari suatu kepercayaan dapat dilestarikan, dirobah atau perbaharui. Perobahan dan pembaharuan dalam sistem kepercayaan lebih banyak berkaitan dengan tradisi-tradisi atau interpretasi dari doktrin, bukan mengenai isi kepercayaan itu (Geertz, 1971). Akan tetapi apabila perobahan itu dapat dilakukan dalam kebersamaan, maka goncangan-goncangan "intern" dalam paguyuban tertentu dapat diminimalisasi.

Apabila kebudayaan dilihat sebagai seperangkat model-model pengetahuan yang secara selektip digunakan oleh para pendukungnya, terutama sebagai makhluk sosial untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan digunakan sebagai referensi dan pedoman untuk bertindak (Suparlan, 1987), maka *wujud budaya spiritual para penghayat* di atas yang secara bergenerasi telah mereka pedomani dan fungsikan, ternyata tidak hanya untuk *mempertahankan keberadaan mereka,* tetapi juga untuk dapat *berubah* dan *berkembang*. Dengan demikian, studi mengenai hubungan fungsional antara budaya spiritual para penghayat (yang mungkin dianggap telah "klasik") dengan tuntutan pembangunan (yang "modern" dan penuh dinamika), dapat dikembangkan. Dalam kaitan ini, kiranya dapat dimengerti betapa pentingnya dilakukan penelitian dan diskusi yang intensif mengenai faktor-faktor budaya spiritual yang menghambat atau mendorong "*nation and character building.*" Indonesia baik pada tingkat lokal maupun tingkat nasional.

Peranan Budaya Spiritual dalam *"Nation and Character Building"*

Dalam sebuah artikel "Peralihan Batiniah di Bali Dewasa ini," yang ditulis oleh Clifford Geertz dalam bukunya The Interpretation of Culture (1974), dengan penuh kerisauan dia menyatakan bahwa ditengah-tengah arus modernisasi politik dan ekonomi yang melanda negara-negara di Asia-Afrika, sedikit sekali didengar pembicaraan mengenai adanya gerakan modernisasi agama, atau sistem kepercayaan masyarakat terutama dari "*grass-root*" atau kalangan bawah. Menurut Geertz, orang cenderung mengabaikannya, atau menganggap bahwa sistem kepercayaan tradisional itu sebagai biang kerok kegagalan pembangunan atau merupakan benteng-benteng perlindungan nilai-nilai budaya yang sudah terancam punah dilanda perubahan sosial yang cepat. Orang cenderung membuat jarak (distansi) dengan hal ihwal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat setempat,

sehingga sistem kepercayaan dan produk budaya yang dihasilkannya menjadi sesuatu yang tak tersentuh *(untouchable)*. Banyak ilmuan yang bergelut dibidang *"social sciences"* yang tidak acuh atau peka dengan masalah yang berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakatnya, walaupun mereka mengetahui bahwa bidang tersebut di Indonesia merupakan "ladang garapan yang kaya" bagi mereka. Sistem kepercayaan masyarakat menjadi "daerah yang terlarang" atau seperti perumpamaan Geertz (1974), dia menjadi "ruang sempit" yang dapat menempatkan seseorang dalam posisi yang serba dilematis. Oleh karena itu, dapat dimaklumi apabila banyak ilmuan, apalagi institusi seperti Direktorat Kebudayaan Depdikbud selalu merasa diri rikuh (serba salah) dan harus ekstra hati-hati apabila berhadapan dengan masalah-masalah kepercayaan atau dalam usaha pengembangan budaya spiritual, walaupun dalam GBHN telah diperintahkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan masyarakat ini dalam rangka *"nation and character building."* Mungkin kita semua juga melihat masalah agama dan kepercayaan itu sebagai suatu ruang sempit yang berbahaya. Oleh karena itu pula Geertz (1974) menyatakan bahwa orang selalu menghindar dari "ruang sempit" itu, walaupun menurutnya,dalam ruang sempit itu tersedia nuansa kepercayaan yang paling kaya dan praktek-praktek magis yang paling lembut dan indah dalam kehidupan manusia. Tetapi Geertz tetap menyatakan keyakinannya, bahwa perobahan-perobahan sistem kepercayaan religius manusia telah dan sedang terjadi, walaupun kelangsungan kebudayaan sebuah masyarakat (seperti Bali) tetap dapat terpelihara walaupun ciri dasar kehidupan religiusnya pada suatu saat akan berubah, terutama setelah Indonesia mengalami berbagai krisis diakhir abad ke 20 ini.

Dalam hubungan ini pula, adalah sangat menarik untuk mencatat keyakinan Weber (*dalam* Mills, 1946) sebagai seorang sosiolog agama, dia menyatakan bahwa krisis sosial ekonomi yang mendalam tidak selalu menghasilkan kreatifitas religius yang mendalam, walaupun agama-agama atau sistem kepercayaan yang dimiliki suatu kelompok masyarakat

atau sistem kepercayaan yang dimiliki suatu kelompok masyarakat memberikan arah rasionalisasi, atau pilihan-pilihan kontras diantara seperangkat perkembangan tertentu yang mungkin jauh dari realisme magis. Dan ternyata sinyalemen Weber ini, telah menjadi kenyataan dalam kehidupan bangsa kita. Dewasa ini kita masih bersyukur bahwa pada saat-saat kebangkitan kita dari krisis politik dan ekonomi, Ditjen Kebudayaan telah memulai membicaraan "pencerahan" kembali program-program pengembangan studi budaya spiritual.

Budaya spiritual tidak hanya memiliki nilai-nilai magis (sakral) yang kaya, tetapi kekayaan itu juga terdapat dalam khasanah nilai-nilai moral dan etika. Apabila nilai-nilai moral dan etika budaya spiritual ini diinventarisasi, diseleksi, dikemas dan dikembangkan dalam kontek kepentingan nasional, dan masa kini, maka dia akan dapat memberikan arah, pengayaan dan ciri khas (identitas) pada "*nation and character building*" Indonesia yang akhir-akhir ini, karena krisis ekonomi dan politik, telah mandek dan terbengkalai.

Memang ada berbagai masalah atau kendala yang perlu dicermati dalam usaha mengimplementasikan sistem nilai moral dan etika budaya spiritual tersebut, ke dalam budaya nasional. Pertama, sistem nilai moral dan etika budaya spiritual sangat beraneka ragam. Masing-masing keanekaan itu sangat terkait dengan sistem nilai kepercayaan dari masing-masing budaya spiritual masyarakat pendukungnya. Kedua, diperlukan sebuah tim kerja yang memiliki keahlian, kemampuan dan ketekunan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyusun dan kalau perlu mensintesakannya dengan nilai-nilai moral nasional yang telah ada. Ketiga, kemungkinan adanya protes atau kecemburuan dari agama-agama besar yang resmi (seperti Islam dan Kristen), seakan-akan usaha ini mengenyampingkan keberadaan mereka. Keempat, diperlukan dana yang cukup untuk publikasi dan mengembangkan proses sosialisasi, agar nilai-nilai moral tersebut dikenal dan diajarkan dalam lembaga-lembaga pendidikan dan keluarga. Kelima, diperlukan *"good will"* dan dukungan politis pemerintah

dan pemuka masyarakat. Sekiranya kelima masalah dan kendala ini dapat diatasi, maka ide untuk mentransformasikan nilai-nilai moral budaya spiritual kedalam nilai-nilai moral dan etika nasional dapat dijadikan salah satu program Ditjen Kebudayaan yang dapat dihandalkan.

Kemajemukan Budaya Spiritual

Budaya spiritual kelompok-kelompok paguyuban, telah merupakan identitas kedua dari masing-masing kelompok masyarakat pendukung budaya itu. Dari lebih kurang dua ratusan kelompok penghayat, ternyata hanya sebahagian kecil para pendukungnya yang berasal dari berbagai etnis dan telah mengembangkan diri melintasi kecamatan atau propinsi tempat kelahirannya. Paguyuban Subud, Pangestu atau Sumarah umpamanya, anggota-anggota mereka terdiri dari berbagai kelompok etnik, agama, dan tersebar di berbagai propinsi. Akan tetapi, banyak paguyuban penghayat yang anggotanya terbatas pada kelompok etnik tertentu dan tersebar dilokasi terbatas pula. Umpamanya, Ugamo Malim, sebuah paguyuban penghayat yang berdomisili di daerah Batak Toba dan sebahagian besar anggotanya juga berasal dari kelompok etnik Batak Toba (Sumatera Utara).

Bagi sebahagian besar kelompok paguyuban penghayat, budaya spiritual mereka telah menjadi identitas kedua, disamping kelompok etnik sebagai identitas pertama. Dengan demikian, masyarakat budaya spiritual di Indonesia, sebagaimana juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan merupakan masyarakat budaya spiritual yang majemuk.

Menurut Parsudi Suparlan (1992), masyarakat majemuk secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang terdiri atas bahagian-bahagian (segmen-segmen), yang masing-masing segmen tersebut secara sosial maupun struktural berdiri sendiri, tetapi yang secara bersama-sama dipersatukan oleh sebuah sistem nasional menjadi sebuah masyarakat majemuk dapat berupa golongan etnik atau agama. Sungguhpun Parsudi Suparlan tidak merujuk kepada

budaya spiritual, tetapi karena kemajemukan budaya spiritual dapat merujuk juga kepada pengertian masyarakat majemuk yang dirumuskan oleh Parsudi Suparlan di atas.

Masalah utama dalam masyarakat majemuk adalah masalah hubungan timbal balik antar kelompok yang terkait dengan kedudukan, hak dan wewenang masing-masing kelompok, terutama pada tatanan nasional. Hubungan-hubungan tersebut kadang-kadang sangat diwarnai oleh masalah-masalah politik dan perimbangan kekuasaan "intern" sesama mereka disatu pihak, dan dengan sistem nasional di pihak lain. Oleh karena itu, Ditjen Kebudayaan harus berusaha mendorong para paguyuban untuk segera kembali membentuk institusi atau badan asosiasi para penghayat yang kuat dan independen. Seperti diketahui, sekitar sepuluh tahun yang lalu, kelompok paguyuban penghayat memiliki badan himpunan tersebut, tetapi karena badan himpunan itu terlibat dalam masalah-masalah politik, atau cenderung menjadi partisan kelompok interes tertentu, maka badan tersebut terpaksa dibubarkan atau diistirahatkan untuk sementara kegiatannya. Mungkinkah pada masa reformasi ini paguyuban para penghayat memiliki lembaga asosiasi atau himpunan itu kembali, sehingga mereka dapat duduk bersama membicarakan kepentingan dan program mereka bersama, secara independen, tanpa campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lain.

Menurut Weber (1946), apa yang sama-sama dimiliki oleh bermacam-macam kelompok sistem kepercayaan bukanlah isi khusus kepercayaan atau agama itu yang memberikan kekhasan kepadanya, melainkan pola formal, bentuk generik yang didalamnya isi pesan khusus itu dituangkan. Dengan kata lain pola formal dan bentuk generik untuk menampung isi pesan Tuhan itulah yang membedakannya satu dengan yang lain. Mengikuti alur pemikiran Weber ini, maka dapat dikemukakan bahwa mungkin sekali perbedaan-perbedaan dalam budaya spiritual berbagai paguyuban di Indonesia lebih banyak tampak dalam pola formal dan bentuk-bentuk generik yang

masing-masing mereka miliki (seperti nama, simbol-simbol tata cara ritual, jargon-jargon, serta ungkapan-ungkapan yang dipergunakan yang *nota-bene* sangat dipengaruhi oleh budaya lokal setempat). Dan semua itu telah dijadikan "batas-batas" *(boderlines)* antara satu kelompok dengan kelompok budaya spiritual lainnya. Batas-batas ini kadang-kadang dipertajam oleh perbedaan akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan.

Apabila sinyalemen dengan menggunakan asumsi Weber tersebut benar, maka usaha ke arah terbentuknya lembaga himpunan para paguyuban penghayat tidak memiliki hambatan-hambatan yang prinsipil, karena keanekaan para penghayat pada hakekatnya hanyalah terjadi pada tataran pola formal dan bentuk-bentuk generik struktur organisasi paguyubannya, bukan pada tataran visi, misi, atau isi paguyuban itu. Dengan bantuan segala pihak, terutama Ditjen Kebudayaan dan kerja keras dari paguyuban penghayat sendiri, kiranya kebersamaan mereka dapat kembali dilembagakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Insya Allah.

Kepustakaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
1990/1991 Dasawarsa Direktorat Binyat Tahun 1979-1989. Jakarta: Direktorat Binyat

Geertz, Clifford
1974 The Interpretation of Culture: Selected Essays. London: Hutchinson & Co. Publisher Ltd.

Nothingham, Elizabeth K.
1997 Religion and Society, NY: Random Hause. Agama dan Masyarakat (terjemahan, Jakarta, PT. Raja Corfindo Persada)

Pelly, Usman
1993. "Peranan Agamawan/Budayawan Spiritual (Penghayat) dalam Era PJPT II. "Sarasehan Direktorat Binyat Depdikbud. Ciloto-Bogor. 12-14 Januari 1993.

1994 "Ugamo malim, Menurut Pengikutnya, "Makalah Muzakaroh Majelis Ulama Islam (MUI), Sumatera Utara, 30 Januari 1994

Robertson, Ronal (ed.)
1992. Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis, Jakarta: Rajawali Pers.

Setiawan, H.I.; Ratnawati, Pertiwintoro, dkk.
1994/1995. Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dati I Propinsi Jawa Timur, Editor: Sri Hartini. Dit.Binyat. Jakarta

Soetomo, W.E.; Noor Shodiq dan A.D. Koswadi
1990/1991 Kajian Nilai Luhur Budaya Spiritual Bangsa, Daerah Jawa Tengah. Jakarta: Dit. Binyat.

Suparlan, Parsudi
1992. "Kebudayaan Jakarta: Pemikiran bagi Pola-pola Pembangunan" Makalah: Forum Komunikasi Pengembangan Budaya Jakarta, Biro Mental Spiritual DKI Jakarta. Jakarta; 21 Agustus 1992

Suparlan, Parsudi
1998. "Kebudayaan dan Pembangunan,"
Makalah Ceramah MGMP Sosiologi-Anthropologi DKI Jakarta, 31 Oktober 1988.

Tanjung, Zuraida; J.F. Daulay dan Nazief Chatib, dkk.
1990/1991 Hasil Penelitian Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Propinsi Sumatera Utara, Jakarta; Dit.Binyat Depdikbud.

Weber, Max
1946. Religius Rejections of The World and Their Directions." *Dalam* H.H. Gerth dan C. Wright Mills, ed. Max Weber, Oxford University Pers.

"Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Sebagai Wujud Budaya Spiritual"

(makalah bahasan)

Oleh:

Dr. Fridolin Ukur

1. Era Reformasi sekarang ini mengandalkan kebebasan, suasana saling menghormati, saling memahami dalam semangat dialog. Dalam hubungan ini saya sangat menyambut baik upaya Direktorat Jenderal Kebudayaan DEPDIKBUD RI menyelenggarakan Dialog Budaya Spiritual ini. Saya diminta ikut membahas makalah Prof. Dr. Usman Pelly ini. Bahasan ini hanya merupakan beberapa catatan sebagai sumbang saran dalam dialog ini.
2. Saya tertarik pada pendekatan sosio-anthropologis yang dianjurkan di halaman 4 (atas), bahwa "*untuk memahami kepercayaan-kepercayaan religius dan wujud budaya dari kepercayaan itu adalah paling penting untuk langsung mengamati ritus atau upacara religius suatu masyarakat pemeluknya*" Kita semua mengetahui bahwa umumnya, sistem kepercayaan religius itu tertuang dalam sistem penyembahan (ritus, kultus, seremoni religius, ibadah).
3. Masyarakat bangsa kita pada umumnya hidup dalam simbol-simbol keagamaan / kepercayaan, mengembangkan ritus, kultus dan seremoni terutama dari segi formalitas. Kita menjalani kehidupan religius yang kental dengan ritus dan kesalehan formal, tapi sering berperilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini. Pengalaman kita dalam era Orba memperlihatkan betapa kehidupan religius kita terutama terarah kepada formalisme, ritualisme, simbolisme dan seremonialisme.
4. Seperti dikatakan dalam makalah ini (hal.2) wujud budaya spiritual itu mencakup ajaran yang mengandung nilai moral. Melalui ritus atau upacara religius itu, bukan hanya iman diperkuat dan

diperkaya, tetapi sekaligus memuat konsekuensi ke dalam kehidupan etik dan moral di kehidupan kesaharian si pemeluk. Di sini nilai spiritual menjadi kongkret. Dalam hubungan ini menurut hemat saya, *"studi mengenai hubungan fungsional antara budaya spiritual para penghayat (yang mungkin dianggap telah "klasik") dengan tuntutan pembangunan (yang "modern" dan penuh dinamika)"* (hal. 4), sama pentingnya dengan studi yang sama terhadap kehidupan beragama kita di Indonesia.

5. Kesamaan yang secara formal nampak antara Agama dengan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ialah adanya ritus, kultus, kebaktian atau Panembah. Melalui Panembah diharapkan akan dicapai manusia baru Budi Luhur dan kesempurnaan hidup. Manusia yang waskita dan susila yang mengembangkan cinta kasih universal kepada semua makhluk, yang amal kerjanya menguntungkan manusia. Memang di kalangan Kepercayaan Panembah itu banyak ragamnya (seperti: Sembah Raga, Sembah kalbu, Sembah Jiwa dan Sembah Rasa), namun pada prinsipnya yang diutamakan adalah hubungan antara pemeluk dengan Tuhannya, yang pada dasarnya adalah soal pribadi setiap orang.
6. Dalam hubungan ini ada sebuah pertanyaan : sampai di mana benar tidaknya kesimpulan yang mengatakan bahwa secara sangat mengganggu terdapat ketidakhadiran rekomendasi aksi (tindakan) yang jelas dalam dunia kebendaan "dalam etika Kepercayaan (the intriguing absence of clear recommendation for action int the woeld of things", Niels Mulder, Mysticisme & everyday Life in Contemporary Java, Singapore University Press, 1980,p.80).
7. Kehidupan keberagamaan kita selama masa Orba, rupanya belum begitu menyentuh esensi atau hakikat keberagamaan itu sendiri, yang seharusnya membawa makna kemanusiaan, kebersamaan, keadilan, perdamaian, dst. Akibatnya kita sempat mengalami kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang sangat

mengkhawatirkan yang diwarnai oleh kekerasan, kebrutalan, sadisme dsb. Ini menunjukkan betapa pentingnya menghubungkan secara real kehidupan ritual dengan etik dan moral.

8. Saya sangat mendukung gagasan Prof. Usman Pelly untuk menghidupkan kembali Lembaga yang menaungi semua kelompok Paguyuban. Dengan demikian mungkin akan dapat dikembangkan proses dialog bukan hanya antar paguyuban, tetapi juga dengan kelompok agama-agama. Karena bagaimanapun juga kita sebagai bangsa sama-sama bertanggung jawab untuk membangun masa depan bersama.

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SEBAGAI WUJUD KEBUDAYAAN SPIRITUAL

(makalah bahasan)

Oleh:
Prof. Dr. Parsudi Suparlan

Tuhan
Tuhan yang Maha Besar
Tempat aku memuja
Dengan segala doa
Aku jauh Engkau dekat
Hati adalah cermin
Tempat Pahala dan dosa bertarung

(Taufik Ismail dalam: lagu *Tuhan* dibawakan oleh Bimbo)

Tuhan dan Manusia

Tuhan maha besar, maha esa, maha segala dibandingkan dengan manusia. Tuhanlah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya termasuk menciptakan manusia. Manusia meminta berkahnya, memujanya melalui doa-doa dan ibadahnya. Tetapi Tuhan tidak membutuhkan ibadat atau sembahyang yang dilakukan manusia, karena sembahyang dan ibadat tersebut adalah untuk manusia yang menjalankannya.

Karena itu adalah menarik untuk diperhatikan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Usman Pelly dalam makalahnya, yang mengatakan bahwa para penghayat meyakini bahwa, 'Semua makhluk yang diciptakan-Nya, dikendalikan-Nya dari tempat yang maha rahasia,... Tuhan mengendalikan kehidupan manusia di dunia, sejak dia berada dalam kandungan, sampai ke liang kubur abadi di akhirat' (hal. 2). Apakah betul, secara logika, bahwa Tuhan itu mengendalikan kehidupan manusia? Kata mengendalikan itulah yang patut kita perhati-

kan, karena makna dari mengendalikan adalah bahwa manusia itu dilihat sebagai mahkluk dari yang tidak ada sampai menjadi ada dan mati, menjalani kehidupannya dengan baik atau suci atau dengan tidak baik dan jahat, karena kendali Tuhan. Kalau manusia itu jahat, apakah karena perbuatan Tuhan? Kalau manusia itu karena perbuatan Tuhan, maka konsep neraka dan surga dengan sendirinya harus digugurkan. Sebab kalau konsep neraka surga masih tetap ada, maka yang jahat bukan manusia yang dikendalikan oleh Tuhan tetapi Tuhan itulah yang jahat, dan karena itu Tuhanlah yang seharusnya masuk neraka. Logika ini tidak masuk akal mana mungkin Tuhan itu masuk neraka.

Hubungan antara Tuhan dengan manusia, bukan berupa hubungan Tuhan degan manusia sebagai kategori umum. Tetapi sebagai hubungan antara Tuhan dengan orang perorang. Tuhan ada di hati orang perorang, yaitu ada dalam keyakinan yang dipunyai oleh orang perorang. Di dalam keyakinan orang perorang itulah Tuhan ada dan hidup, atau Tuhan itu tidak ada dan mati. Kesemuanya itu tergantung pada masing-masing perorangan yang bersangkutan. Karena itu apa yang dinyatakan oleh Taufik Ismail sebagaimana saya kutipkan diatas sebenarnya mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi dalam hubungan antara Tuhan dengan manusia, yaitu : *Aku jauh Engkau jauh, Aku dekat Engkau dekat.*

Dari manakah datang dan beradanya Tuhan dalam keyakinan orang perorang? Konsep Tuhan ada dalam keyakinan seseorang melalui pembudayaan *(enculturation)* yang diterima oleh seseorang dari sejak paling awal dari masa kanak-kanaknya yang diberikan oleh orang tuanya sebagai bagian dari proses-proses menjadikan seorang kanak-kanak tersebut menjadi manusia menurut konsep kebudayaan orangtuanya. Disamping proses pembudayaan yang juga turut memberadakan konsep Tuhan dalam keyakinan seseorang adalah sosialisasi, atau proses-proses seorang anak diajar berperan dalam berbagai struktur sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari di masyarakatnya.

Karena itu konsep Tuhan sebagai keyakinan yang dipunyai oleh orang perorang biasanya mempunyai pola-pola mendasar yang sama bagi sejumlah orang atau masyarakat yang mempunyai sebuah kebudayaan yang sama, dan berbeda dari yang dipunyai oleh orang-orang dari kebudayaan yang lain. Pada tingkat orang perorang konsep Tuhan dalam keyakinan masing-masing juga menunjukkan variasi-variasi atau bahkan perbedaan-perbedaan. Variasi dan perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya pengalaman-pengalaman yang berbeda, baik yang dialami masing-masing pada masa kanak-kanak maupun pada masa dewasa.

Konsep Tuhan sebagai yang maha segala tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian atau inti dari satu konsep mengenai dunia gaib, alam semesta, dan penggolongan-penggolongan serta hubungan-hubungan diantara golongan-golongan tersebut. Dalam konsep Jawa, alam semesta yang dilihat sebagai sebuah wadah tanpa bentuk dan tanpa batas berisikan segala gejala yang kasat mata maupun yang gaib yang keseluruhanya terpusat pada intinya yaitu Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakannya. Dalam hampir semua kebudayaan manusia sistem-sistem penggolongan mengenai alam semesta selalu dimulai dari yang mendasar, yaitu sistem pertentangan dua (*binary apposition)* dengan satu sebagai penengah atau perantaranya, sistem penggolongan empat dengan satu sebagai pusatnya (yang dalam konsep kebudayaan Jawa dikenal dengan nama *mancapat).* Sistem penggolongan empat ini bisa berkembang menjadi sistem penggolongan lima (*mancalima*), dan seterusnya (lihat Ossenbruggen 1917; Suparlan 1991, 1995).

Sistem-sistem penggolongan tersebut bukan hanya menggolongkan gejala-gejala alam atau fisik serta gejala-gejala alam gaib, tetapi bersamaan dengan penggolongan tersebut juga digolongkan atau dipertentangkan kualitas dari masing-masing golongan menurut ukuran estetika, etika, dan moral sesuai dengan kebudayaan yang bersangkutan. Tuhan sebagai yang maha segala adalah segala sesuatu

yang baik (kehidupan, harmoni, ketenangan dan keteraturan) dan yang suci yang terserap serta terwujud dalam berbagai gejala estetika, etika, dan suci menurut ukuran kebudayaan yang bersangkutan. Tuhan adalah lawan dari segala sesuatu yang jahat dan berdosa. Tinggal manusia, yaitu orang perorang untuk menentukan pilihannya apakah ingin menjadi pengikut Tuhan atau pengikut setan. Saya teringat pada proses pembudayaan dan sosialisasi masa kanak-kanak sebagai pengikut Tuhan, untuk setiap malam sebelum tidur berdoa dalam bahasa Jawa, sbb.:

Niat ingsun aku arep turu
Badanku gemuling atiku eling
Rokhku madep imanku tetep
Laillah hailallah Muhamadurrasulallah

Agama dan Keyakinan

Ada kesan bahwa Prof. Dr.Usman Pelly melihat kebudayaan spiritual atau keyakinan keagamaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sebagai sama dengan agama (lihat antara lain hal. 4). Dasar dari adanya agama adalah adanya keyakinan keagamaan, tetapi agama mempunyai hakekat yang tidak sama dengan keyakinan keagamaan atau kebudayaan spiritual. Hakekat dari agama adalah penekanannya pada kegiatan upacara keagamaan bersama. Sedangkan keyakinan keagamaan seseorang diungkapkan dalam upacara-upacara yang dilakukan oleh orang perorang masing-masing; bilapun dilakukan bersama maka penekanannya bukan pada kebersamaannya tetapi pada pendalaman untuk pencapaian kesempurnaan dari orang perorang.

Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha) mempunyai dorongan yang keras bagi para pemeluknya untuk mewujudkan diri dalam organisasi dan pranata-pranata keagamaan; dan menyebarkan agama tersebut. Hal ini terutama nampak sekali dalam agama-agama tradisi besar asal Timur Tengah. Organisasi dan pranata keagamaan tersebut mempunyai implikasi sosial, politik, ekonomi,

dan kebudayaan. Sehingga agama menghasilkan adanya penggolongan diantara mereka yang percaya (yang suci dan calon penghuni sorga) dan yang tidak percaya (calon penghuni neraka, kafir, pengikut iblis, dsb). Dari sejarah Aceh misalnya, kita ketahui bahwa setiap raja berganti maka diganti pula tarekat yang menjadi pendukung sang raja. Penggantian tarekat ini biasanya juga diikuti dengan pembasmian para pengikut tarekat yang diganti atau dibubarkan sampai keakar-akarnya. Para penghayat, yang mempunyai kebudayaan spiritual atau keyakinan keagamaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak mempunyai dorongan untuk membentuk organisasi atau pranata keagamaan dengan motif-motif sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Mereka melakukannya untuk dirinya sendiri sebagai orang per-orang dan karena itu tidak mempunyai konsep dakwah untuk menyebarluaskan keyakinan mereka kepada orang-orang lain.

Dari perspektif yang berbeda dari doktrin yang berlaku, mungkin contoh penghancuran Syekh Siti Jenar tokoh ajaran sufi yang invidualistik yang dilakukan oleh para tokoh tarekat yang tergabung dalam wali songo dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara kebudayaan spiritual dengan agama Kerajaan-kerajaan Islam Jawa pada waktu itu yang memperoleh klaim legitiminasinya dari Tuhan menuntut dukungan rakyat. Dukungan dapat diperoleh melalui organisasi keagamaan atau tarekat yang mempunyai motif-motif politik dan ekonomi. Ajaran sufi yang individualistik, hanya akan menghasilkan *floating mass* yang tidak pasti dukungannya atau bahkan dapat menjadi penentang kerajaan-kerajaan Islam Jawa yang berkuasa pada waktu itu.

Agama Resmi dan Agama Primitif

Di Indonesia dikenal ada lima agama yang secara resmi diakui sebagai agama oleh negara dan pemerintah, dan sekarang ditambah satu lagi dengan agama Konghucu. Selebihnya dianggap bukan agama oleh pemerintah dan negara kita. Karena itu jangan heran kalau

agama asli Orang Dayak di Kalimantan Tengah dan Timur yang dinamakan agama Kaharingan lalu menamakan diri sebagai agama Hindu. Walaupun dalam agama Kaharingan itu ada unsur-unsur Hindu tetapi tidak seharusnya diartikan bahwa agama Kaharingan itu adalah sama dengan agama Hindu. Sama dengan agama Katolik di Jawa Tengah yang banyak menyerap unsur-unsur kebudayaan jawa dan keyakinan keagamaan jawa tetapi tidak dapat dikatakan bahwa agama Katolik di Jawa Tengah itu sama dengan agama Jawa.

Yang menjadi masalah kemudian adalah untuk apakah agama-agama primitif (primitif tidak dimaksudkan sebagai sama dengan terbelakang tetapi adalah yang paling mendasar dan yang pokok) yang masih terdapat dan dianut oleh banyak sukubangsa-sukubangsa di Indonesia itu lalu digolongkan sebagai aliran kepercayaan atau sebagai kebudayaan spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa ? Bila jawabannya adalah 'ya', maka penggolongan agama primitif tersebut ke dalam aliran kepercayaan sebetulnya tidak tepat. Karena hakekat agama primitif sama dengan hakekat agama tradisi besar yang manapun. Kalau dikatakan tidak ada wahyu, tidak ada nabi, tidak ada kitab suci juga tidak betul. Karena dalam agama primitif juga ada semacam nabi yang menerima wahyu melalui impian. Wahyu yang berisi ajaran disampaikan kepada keluarga dan kerabatnya. Sayangnya, masyarakat primitif tidak mempunyai penulis dan editor yang dapat mengolah wahyu yang diterima oleh nabinya tersebut untuk dijadikan kitab suci semacam Kitab Injil atau Al Qur'an dan Hadits Nabi. Ajaran tersebut dilestarikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sama dengan agama tradisi besar, agama primitif juga mempunyai implikasi sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Bedanya kalau agama tradisi besar bersifat universal dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat manapun, maka agama primitif cenderung hanya relevan dalam masyarakat dengan kebudayaan setempat dan juga terbatas penganutnya pada kelompok suku bangsa atau kelompok kerabat saja.

Jika demikian, apakah tidak lebih baik untuk mulai dipikirkan bahwa agama primitif itu sebetulnya agama juga? Hal ini guna menghindari tuntutan demokratisasi dan egomoni agama-agama tradisi besar melalui negara dan pemerintah, dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Begitu juga apakah tidak sebaiknya yang namanya aliran kepercayaan juga seharusnya menjadi urusan Departemen Agama ? Karena hakekat dari aliran kepercayaan adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi kebudayaan spiritual orang perorang, yang sebetulnya adalah hakekat dari setiap agama? Bila hal ini menjadi masalah bagi para penganut agama resmi, karena pertimbangan-pertimbangan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan, apakah tidak sebaiknya lagi bahwa agama itu (termasuk keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan agama-agama primitif yang ada) sebenarnya adalah hak yang paling hakiki yang dipunyai oleh setiap warga masyarakat dan negara Indonesia sebagai orang perorang sehingga pemerintah dan negara itu tidak punya hak untuk mencampurinya untuk menentukan arah dan coraknya?

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DALAM PERSPEKTIF GERAKAN REFORMASI

Oleh:
Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomihardjo

PENGANTAR

Dewasa ini kita sedang berada dalam suasana kehidupan di akhir abad XX. Suatu abad yang sering diberi ciri atau sebutan sebagai abad revolusi kedua, abad pasca industri, abad informasi, abad diskontinuitas, krisis abad krisis dan abad serba ketidakpastian. Kesemuanya itu mengejawantah dalam gerak lajunya perubahan yang berlangsung secara cepat dan mendasar, menyentuh semua segi dan sendi kehidupan.

Berbagai sebutan tadi pada hakikatnya merupakan implikasi ilmu pengetahuan beserta temuan-temuan barunya yang spektakular, yang di dalam kecepatan perkembangannya telah mengantarkan adanya "tiada hari tanpa temuan-temuan baru yang berlangsung secara kronologis berurutan dan berdampingan sebagai alternatif."

Ilmu pengetahuan yang telah menyatu dengan anak kandungnya yaitu teknologi, kini IPTEK tersebut bukan lagi hanya sekedar sarana bagi kehidupan umat manusia, melainkan sudah menjadi sesuatu yang substantif. Dalam kedudukannya sebagai sesuatu yang **substantif** tadi, kini IPTEK telah menyentuh semua segi dan sendi kehidupan secara ekstensif, dan pada gilirannya merubah budaya dan tradisi manusia secara **intensif**.

Kondisi tersebut sebagai gambaran kehidupan di akhir abad XX kiranya masih akan berlanjut di abad XXI dengan ekstensi dan intensitas yang bahkan lebih meningkat. Apa yang telah dikemukan oleh sang filsuf Heracleitos di abad IV SM dengan ucapannya "Pantei rhei kai eudon menei" kini dikukuhkan oleh sang futurolog John Naisbitt " The certain one now is uncertainty" dan oleh Alvin Toffler dengan ulasan "The constant one now is changing".

Perubahan yang inherent dengan ketidakpastian ini semakin dipicu oleh gerakan reformasi yang gaungnya sudah tersebar luas semenjak Amien Rais di sekitar tahun 1996 mulai melontarkan issue "suksesi kepemimpinan nasional" yang kemudian disusul secara bertubi-tubi dengan berbagai kasus dan insiden yang salah satu implikasi negatifnya mengarah kesuatu situasi krisis.

BANGSA KITA SEDANG DITIMPA KRISIS

Gejala krisis yang sedang menimpa kita antara lain muncul sebagai fenomena di mana orang lebih percaya pada issue-issue yang berkembang daripada penjelasan yang diberikan oleh pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi formalnya; dan bagaimana masyarakat serta para tokoh yang memegang kekuasaan publik dengan begitu mudahnya memanipulasi peraturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau golongannya tanpa merasa berdosa atas pelanggaran nilai-nilai etis dan moral.

Nilai-nilai luhur budaya kita yang telah dirintis dan dipupuk melalui tradisi oleh nenek moyang kita semenjak dahulu kala, kini telah habis, tersapu dan dilanda arus kekuasaan yang menjadikan ekonomi sebagai "ideologi pembangunan" dan Pancasila dijadikan mitos sebagai asas tunggal yang secara manipulatif diritualisasikan untuk mengembangkan "trilogi pembangunan", namun kemudian menjurus menjadi tumbuh suburnya kolusi, korupsi, nepotisme, dan kroni-isme.

Kini setelah pembangunan menghadapi jalan buntu yang diawali dengan krisis ekonomi dan krisis politik, maka dengan ambruknya seluruh bangunan fundamental ekonominya yang dikatakan kuat, diikuti pula dengan ambruknya kehidupan politik yang melahirkan suatu kondisi yang serba "semrawut".

Krisis ekonomi dan krisis politik yang akar-akarnya tertanam dalam krisis moral yang kemudian menjalar menjadi krisis budaya,

menjadikan masyarakat telah kehilangan orientasi nilai, hancur dalam suasana batinnya. Arena kehidupan menjadi hambar, kejam dan kasar, gersang dalam kemiskinan budaya dan kekeringan spiritual. Ajaran-ajaran moral dan etik sebagaimana diajarkan oleh para budayawan kita seperti misalnya apa yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantoro atau pun Ronggowarsito, bahkan nilai-nilai spiritual religius yang setiap pagi disiarkan melalui berbagai saluran media massa, diplesetkan menjadi suatu **satire**, ejekan, dan sindiran dalam kehidupan yang berkembang dengan penuh paradoks.

Kesemuanya itu menjadi pertanda bahwa upaya untuk membina dan mengembangkan watak dan jati diri bangsa atau "nation an character building" selama setengah abad lebih, ternyata tidak membuahkan hasil sebagaimana kita harapkan bersama.

AKTUALITAS ALIRAN KEPERCAYAAN

Akhirnya apakah yang kini masih "tersisa" yang dapat disebut sebagai "aset nasional" yang dapat kita jadikan milik bersama? Kiranya adalah PEMBUKAAN UUD 1945 dengan nilai-nilai luhurnya yang menjadi satu kesatuan pengertian secara integral-integratif dengan PANCASILA sebagai dasar negara.

Dengan meletakkan kembali Pancasila dalam satu kesatuan pengertiannya dengan PEMBUKAAN maka tidak saja untuk penyatuan kembali gerakan reformasi menuju kesatuan dasar dan arah, melainkan juga untuk meluruskan kembali "nation and character building, and state building" yang selama ini masih belum berhasil untuk mewujudkannya sebagai suatu **realitas in concreto**, bahkan sedang terjebak pada suatu disintegrasi.

Kesalahan kita selama ini ialah bahwa di dalam kita menafsirkan, memahami, dan melaksanakan Pancasila, secara sadar ataupun tidak, dilepaskan dan diredusir dari nilai-nilai luhur yang diamanatkan

di dalam Pembukaan. Akibatnya, Pancasila disalahgunakan untuk dikembangkan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan yang justru bertentangan dengan Pancasila itu sendiri.

Aktualitas aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa dalam kondisi yang serba penuh ketidakpastian ini dituntut untuk merevitalisasikan nilai-nilai ajarannya melalui dimensi-dimensi yang melekat pada dirinya, yaitu dimensi :

Realitasnya, dalam arti bahwa nilai-nilai ajarannya ditransformasikan menjadi cerminan kondisi objektif yang ditumbuhkembangkan dalam masyarakat, suatu rangkaian nilai-nilai yang perlu ditunjukkan sifatnya sebagai **sein im sollen** dan **sollen im sein** oleh segenap subjek pendukungnya.

Idealitasnya, dalam arti bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar impian atau utopi tanpa makna, melainkan harus diobjetivikasikan menjadi "kata kerja" untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat, menyalakan "api pencerahan" menyongsong hari esok yang lebih baik.

Fleksibilitasnya, dalam arti bahwa nilai-nilai ajarannya bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan "mandheg" dalam kebekuan dogmatis dan imperatif, melainkan harus terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi tuntutan zaman yang terus-menerus berkembang. Dengan demikian tanpa harus kehilangan nilai hakikinya nilai-nilai ajaran yang dimilikinya, maka aliran kepercayaan ini akan menjadi tetap aktual relevan, dan fungsional bagi kehidupan masyarakat yang sedang menghadapi kekeringan budaya dan kemiskinan spiritual.

Untuk itu gerakan aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus menegaskan kembali apa yang digariskan dalam visi, misi, sasaran dan strateginya, sedemikian rupa sehingga aliran kepercayaan di dalam keberadaannya dapat selalu hadir sebagai **"mitra dialog"** bagi masyarakat terhadap gerakan reformasi khususnya, dan kehidupan masyarakat yang sedang mengalami berbagai krisis pada umumnya, menuju masyarakat sebagaimana oleh para founding-fathers kita diamanatkan melalui PEMBUKAAN UUD 1945.

RENUNGAN PENUTUP SEBAGAI KESIMPULAN

Ditengah derasnya arus reformasi dan gelombang globalisasi yang menghadapkan kita pada suatu kompleksitas permasalahan yang sarat dengan perubahan yang berlangsung secara cepat, mendadak, dan mendasar, maka tidaklah berarti bahwa adanya aliran kepercayaan dibiarkan "bergeser", justru harus dapat diaktualisasikan melalui revitalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya; dengan penuh kesadaran bagi para penganutnya agar dirinya jangan sampai dijadikan dikotomi atau kontradiksi terhadap agama-agama yang ada. Dengan menjadikan dirinya sebagai "mitra dialog" maka filosofi yang dianutnya ialah apa yang dikatakan dalam bahasa Belanda yaitu **"gescheiden samen gaan"** dengan agama-agama yang berkembang dalam masyarakat kita.

Dalam perspektif filosofi dan juga teologi, maka di sinilah arti pentingnya tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk menjadikan dirinya sebagai wadah dan sarana **dialog budaya** dan **budaya dialog** bagi masyarakat bangsa yang serba pluralistik dalam berbagai aspek kehidupannya.

Forum dialog seperti sekarang ini di samping perlu dilengkapi dengan hasil penelitian ilmiah di lapangan, akan merupakan sum-

bangan berharga bagi pengembangan budaya spiritual yang dewasa ini tidak tersentuh dalam dan oleh gerakan reformasi.

Justru perlu diwaspadai bahwa nilai-nilai spiritual-religius dewasa ini mengalami distorsi karena dilibatkan untuk tujuan-tujuan politik praktis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua.

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DALAM PERSPEKTIF GERAKAN REFORMASI

(makalah bahasan)

Oleh:
Drs. Ida Bagus Gede Agastia

> "Dengan ketidak benaran, dengan kepalsuan, dengan memperkosa keadilan, manusia kadang-kadang berhasil merebut kemakmuran, berhasil meraih apa yang nampak yang dihasratkan, dapat menaklukkan musuh-musuhnya, namun hancur lebur dan mati pada akarnya".

(1)

Kutipan di atas adalah kalimat terakhir yang disuratkan oleh Rabindranath Tagore dalam pidato terakhirnya berjudul "Crisis In Civilization". Kutipan pidato pemenang hadiah Nobel bidang kesusastraan ini patut kita baca kembali karena terasa sangat relevan, dan Tagore sendiri menyatakan bahwa kalimat tersebut adalah dicetuskan oleh seorang pertapa yang arif bijaksana.

Sastrawan besar yang pengaruhnya cukup luas di Indonesia ini, yang juga menjadi "Guru" bapak pendidik Ki Hajar Dewantara dalam pidato itu juga menyatakan, "Apabila saya melihat disekitar saya, saya melihat keruntuhan peradaban yang besar dan megah, bagaikan gunung yang kemudian terserak-serak menjadi benda-benda kecil yang tak ternamai. Meskipun demikian saya tak akan berbuat dosa yang tak terampuni dengan kehilangan kepercayaan terhadap manusia. Lebih baik saya menantikan bab baru dalam sejarah, apabila badai ini telah berlalu dan cuaca telah dibersihkan oleh semangat

pengabdian dan rela berkorban. Akan tiba waktunya apabila manusia akan kembali pada jalan kemenangannya, kendati rintangan yang akan menghalanginya untuk merebut kembali pusaka kemanusiaannya. Sekarang saya melihat bahaya-bahaya yang menemani desakan kekuasaan yang tak kenal mau itu".

Adakah apa yang digambarkan oleh Pujangga besar tersebut terjadi juga pada saat sekarang. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Koento Wibisono dalam makalahnya bahwa krisis yang sedang menimpa kita antara lain adalah para tokoh yang memegang kekuasaan publik dengan begitu mudahnya memanipulasi peraturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau golongannya tanpa merasa berdosa atas pelanggaran nilai-nilai etis dan moral. Apabila benar nilai-nilai luhur budaya kita yang telah dirintis dan dipupuk melalui tradisi oleh nenek moyang kita semenjak dahulu kala, kini telah habis tersapu dan dilanda arus kekuasaan yang menjadikan ekonomi sebagai "ideologi pembangunan", maka sesungguhnya telah terjadi krisis peradaban. Peradaban yang dalam bahasa Inggris disebut "Civilization", oleh Tagore disebut sebagai **sad achar** (harfiah berarti prilaku wajar/layak/sopan) yaitu: perilaku yang digariskan oleh tradisi bangsa.

(2)

Marilah kita ingat bahwa di dunia ini pernah ada peradaban bangsa-bangsa. Apabila kita mengamati sejarah dari peradaban-peradaban tersebut, kita akan menemukan satu fakta fundamental, bahwa yang menekankan pada materi, senjata, telah sirna. Tetapi yang menekankan pada kemajuan persahabatan, cinta kasih, persaudaraan, tetap bertahan. Apabila sejarah memiliki banyak pelajaran bagi kita, pelajaran itu adalah bangsa-bangsa yang menjanjikan dirinya perdamaian dan persaudaraan, dan yang menjamin dirinya menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan persahabatan, bangsa seperti itulah yang telah bertahan.

Setiap saat kita dihadapkan pada dualisme antara kebaikan dan kejahatan, namun manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk memerangi kejahatan. Kita harus melihat dikotomi konflik antara kabaikan dan kejahatan tersebut dengan satu tindakan dimana kejahatan harus diatasi, dan keyakinan bahwa kebaikan dan kebenaran akan menang.

(3)

Banyak orang berpikir karena kemabukan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa materi adalah sesuatu yang paling penting. Tetapi apabila kita memeriksa dengan teliti lebih jauh lagi kita akan menyadari bahwa telah terjadi kemajuan-kemajuan yang pesat "dibalik" kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesungguhnya manusia telah membangun kemahakuasaan dari **spirit** manusia dan bukan kemahakuasaan materi. Dibalik penemuan ilmiah atau kemajuan teknologi atau kreasi artistik, umat manusia tidak memandang dirinya sebagai benda tunggal dalam serangkaian kejadian. Ia percaya bahwa ada suatu elemen subyektivitas, yaitu suatu elemen spirit di dalam diri manusia yang memungkinkan ia melakukan hal-hal yang mengesankan.

Pada masa kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi dewasa ini banyak orang berkata bahwa kami telah mengelilingi dunia, namun kami tidak menemui sesuatu apapun yang Ilahi, yang mengingatkan kita tentang apa yang dikatakan orang-orang pada jaman dahulu, "Kami telah membedakan tubuh manusia namun tidak menemukan jiwa disana." Yang lain berkata, "kami menjelajahi angkasa namun tidak menemukan Tuhan Yang Maha Kuasa di sana". Kita harus menyadari bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui indria dan intelek tidak sempurna. Ada sejenis pengetahuan dimana manusia merasakan bahwa ia adalah berkarakter **spiritual**. Dengan spirit ini memungkinkan ia mengatur alam, menemukan reaksi-reaksi alam, untuk memecahkan misteri-misteri dunia ini dan menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari apa yang dapat dilihat oleh mata.

Ilmu pengetahuan adalah pengejaran kebenaran. Kebenaran adalah bukan sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran kita. Ia adalah pengejaran terhadap sesuatu yang ekstra mental, yang ada disana, kearah mana perubahan-perubahan besar yang telah terjadi sejak manusia di goa-goa primitif sampai ke jaman ketika manusia mencoba mengelilingi bumi, mencoba memperpendek jarak; semuanya ini tidak berkat pikiran atau indria semata tetapi berkat spirit dalam diri manusia.

Maka dari itu perlu kita sadari, bahwa apabila kita mengekang spirit dalam diri kita, apabila kita tidak memperhatikan ke-dalaman manusia, kita berjalan ke arah rutinitas dan kita tidak akan mampu meraih sukses dalam upaya memahami alam atau melakukan sesuatu apapun juga.

Spirit inilah yang bertanggungjawab atas semua keberhasilan yang telah dicapai oleh manusia di dunia ini. Ini bukan sesuatu yang dapat disamakan dengan alam mekanis semata. Apabila kita hanya semata-mata produk dari kebutuhan-kebutuhan alam, mekanis atau dialektikal, maka tidak akan ada kemajuan apa-apa di dunia ini. Karena ada sesuatu yang ada di luar mekanisme dunia yang dapat kita lihat, bahwa ada sesuatu yang universal. Setiap individu harus menjadi ekspresi unik dari elemen universal tersebut; setiap manusia unik dan universal. Di dalam dirinya ada elemen Ketuhanan dan juga elemen alam, dan keduanya dalam kepaduan.

(4)

Apabila benar ajaran-ajaran moral dan etik sebagaimana diajarkan oleh para budayawan kita seperti Ki Hajar Dewantoro ataupun Ronggo Warsito, bahkan nilai-nilai spiritual religius yang setiap pagi disiarkan oleh berbagai media massa diplesetkan menjadi suatu **satire**, ejekan dan sindiran seharusnya kita tidak perlu berkecil hati. Sebagaimana dikatakan oleh Ronggo Warsito, bahwa pada masa tertentu kita akan dilanda oleh "**jaman edan**", jaman ketika orang

sudah tidak memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual, jaman yang penuh dengan kekeruhan pikiran. Namun sang pujangga juga mengingatkan pada jaman seperti itu kita harus tetap **"heling lan waspada"**. Heneng, hening, heling dan waspada adalah sebuah rangkaian kata yang memiliki makna yang padu, yang juga menjadi landasan nilai-nilai budaya spiritual.

Ketika masyarakat telah dapat mewujudkan kembali pikiran yang **heneng** dan **hening** sudah tentu nilai-nilai moral dan spiritual akan ditegakkan kembali. Proses reformasi boleh jadi akan menuju kepada masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai moral spiritual tersebut, nilai-nilai yang bermuara dari **budhi**, alam pikiran diatas indria dan intelek. Dengan landasan nilai-nilai moral dan spiritual akan terbangun sebuah peradaban yang tidak mudah hancur.

(5)

Apa yang dikatakan oleh filsuf Heracleitos (pantei rhei kai eudon menei) serta para futorolog sebagaimana dikutip oleh Bapak Koento Wibisono boleh jadi juga untuk melukiskan tentang kehidupan yang terus mengalir, yang apabila diperhatikan secara spiritual senantiasa terasa baru.

Hermann Hesse seorang sastrawan dunia pemegang hadiah Nobel dalam karyanya berjudul **Siddharta** menulis dengan cukup indah: Ia menatap sungai yang mengalir riang, melihat kekebeningan, ke dalam garis-garis kristal rancang bangun yang indah. Dia melihat mutiara kemilau muncul dari kedalaman, gelembung-gelembung berenang di atas kaca, langit biru memantul padanya. "Cintailah sungai ini, tinggallah di tepinya, belajarlah darinya". Hari ini ia hanya melihat satu dari rahasia-rahasia sungai itu, satu yang mencekam jiwanya. Ia melihat air yang terus-menerus mengalir dan selalu ada di sana. Air itu selalu sama dan setiap saat baru.

Kutipan ini tidak saja mengajak kita untuk merenungkan kehidupan yang terus mengalir, lalu dapat menghadirkan kehidupan

yang senantiasa segar dan baru, tetapi yang sangat penting adalah mengajak kita untuk menyadari tentang hakekat tujuan hidup dan nilai hidup. Kemana sesungguhnya tujuan kita mengalir. Di sini lalu kita bertemu dengan konsepsi **Sangkan Paraning Dumadi,** konsepsi spiritualitas Jawa tentang hakekat tujuan hidup manusia tiada lain adalah Kemanunggalan dengan Sang Pencipta. Kemanunggalan untuk mencapai Kebenaran, Pengetahuan dan Kebahagiaan tertinggi.

DINAMIKA GERAKAN SPIRITUAL DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Oleh:
Dr. Mukhlis Paeni

Dari hitungan statistik masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Dalam kalkulasi mayoritas itu tumbuh nuansa Pluralisme sebagai suatu realitas bahwa wajah penghayatan spiritualitas yang dimilikinya sangat majemuk, termasuk penghayatan ke-Islamannya. Adalah suatu hal yang unik bahwa sejarah masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam itu sangat kuat terlilit oleh untaian kalung mistik yang bernafaskan tasawuf. Jika kita mencoba menengok ke belakang ke penghujung abad ke-13 ketika masyarakat nusantara baru mulai berkenalan dengan Islam, ketika itu penghayatan spiritual di dunia Islam sudah memasuki tingkat tarekat, suatu fase penghayatan paling akhir dari pengembangan tasawuf, suatu hal yang amat menarik untuk diamati, ialah bahwa ketika kita masyarakat Nusantara baru mulai mengenal dan bersentuhan dengan Islam. Islam yang sampai ke nusantara adalah Islam yang sudah memasuki titik akhir pengamalannya dalam metamosfosis spiritual yang disebut tasawuf. Realitas ini diujudkan melalui beragamnya aliran tarekat yang dianut masyarakat kita. Melalui pintu-pintu tasawuf inilah masyarakat Indonesia memasuki dunia Islam. Banyak orang meyakini bahwa justru karena tasawuflah menjadi penyebab utama orang Indonesia beragama Islam. Demikian dekatnya tasawuf dengan penghayatan spiritual kita sehingga hampir mustahil untuk dapat menarik satu garis perbedaan yang tegas antara tasawuf dengan penghayatan spiritualitas dari berbagai aliran kepercayaan atau aliran kebatinan di Indonesia. Banyak aliran penghayat atau aliran kebatinan yang mengaku tumbuh dari kepercayaan leluhur dan bahkan beberapa diantaranya yang menyebut bahwa alirannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam atau bukan Islam, tetapi sesungguhnya ajaran-ajarannya sangat

dipengaruhi oleh tasawuf. Masalah ini sangat penting untuk direnungkan dan diamati lebih jauh karena banyak pertanyaan yang harus dijawab disekitar masalah itu antara lain : Bagaimanakah sesungguhnya kehidupan spiritualitas bangsa Indonesia di jaman pra Islam. Pertanyaan ini menjadi kajian yang amat penting karena jawabannya akan memudahkan kita untuk dapat mengerti mengapa tasawuf dapat diadopsi dengan mudah dalam tatanan spiritualis kita. Satu hal yang penting untuk dimengerti ialah bahwa, hanya masyarakat yang telah memiliki dasar spiritualitas yang tinggi yang dapat menerima tasawuf dengan sempurna karena sesungguhnya pada tingkat tasawuf penghayatan spiritualitas telah tembus pandang antara manusia dengan yang lain dan antara manusia dengan maha pencipta. Tetapi sebaliknya tasawuf juga bisa menjadikan manusia tersesat dalam dunia mistik jika ia dipahami hanya sepenggal-sepenggal, karena pada dasarnya tasawuf adalah sebuah cakrawala tak bertepi. Jika demikian apakah masyarakat Indonesia telah memiliki spesial spiritualitas dalam dirinya yang memungkinkan adanya akomodasi spiritualitas dalam bentuk tasawuf itu, jawabannya, memerlukan suatu studi yang amat dalam mengenai, sejauh manakah tingkat penghayatan spitualitas yang dianut oleh masyarakat Indonesia karena tinggi rendahnya penghayatan spiritualitas yang menjadi tatanan dasar penghayatan kita menjadi tolok ukur atas Variabel respons yang diberikan terhadap tasawuf. Perbedaan ini menciptakan kemudian variasi yang amat berbeda-beda dari masyarakat kita dalam menangkap tasawuf pada tatanan kehidupan spiritualnya. Kita lihat misalnya bagaimana tarekat Naqsyabandiyah Mazhariyah dan Naqsyabandiyah Khalidiyah dianut dengan fanatik dan amat sempurna oleh masyarakat golongan atas, para sultan, raja-raja, para panglima-panglima, Bupati-bupati dan orang-orang dari golongan masyarakat menengah ke atas. Sementara masyarakat lapisan bawah menangkap dengan baik tarekat Qadiriyah wa Naqsyabadiyah sekalipun, ketiga pengamalan ini bersumber dari satu tarekat, Naqsyambandiyah. Dalam perjalanan

sejarah Indonesia dua jenis tarekat Naqsyabandiyah terdahulu hampir tidak pernah terlibat dalam pergolakan di Indonesia. Sedangkan sebaliknya tokoh-tokoh tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang mengajarkan tehnik-tehnik kesaktian merangsang sikap aktif seseorang yang akhirnya banyak tokoh-tokoh dari aliran ini terlibat dalam berbagai gerakan sosial politik di Indonesia.

Di jaman pemerintah Kolonial perbedaan-perbedaan karakteristik aliran-aliran tarekat dalam tasawuf ini tidak difahami dengan baik karena itu menurut pemerintah kolonial semua aliran tarikat, demikian juga aliran kepercayaan masyarakat yang berbau tasawuf yang disebut aliran-aliran tarekat lokal sangat berbahaya. Aliran-aliran tarekat lokal semacam ini sangat tergantung pada ajaran-ajaran atau amalan-amalan guru, tarekat tertentu yang betul-betul telah melokalkan pengamalan-pengamalan tasawufnya seperti misalnya Wahidiyah dan Shiddiqiyah di Jawa Timur atau tarekat Sahadatin di Jawa Tengah. Demikian melokalnya kedua pengamalan tarekat ini sehingga pengamalan-pengamalannya seakan secara utuh tumbuh dari dinamika interen masyarakat. Namun demikian kita dapat melihat penyebaran gerakan-gerakan tarekat yang berkembang di Indonesia sebenarnya merupakan cabang-cabang dari gerakan sufisme internasional misalnya tarekat Khalwatiah yang banyak terpengaruh di Sulawesi Selatan, Syattariyah berpengaruh di Sumatera Barat dan sebahagian Jawa, Syadziliyah berpengaruh di Jawa Tengah, Qadiriyah, Rifaiyah, Idrisiyah atau Ahmadiah dan Tijaniah dan yang paling berpengaruh diantaranya dan sangat besar serta luas daerah penyebarannya adalah Naqsyabandiyah. Tidak dapat disangkal bahwa aliran-aliran tarekat lokal yang berkembang di masyarakat yang sering kali muncul sebagai wadah organisasi spiritual berperan sebagai media penyaluran berbagai kehendak dari masyarakat. Berbagai aliran-aliran spiritual yang banyak terpengaruh tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, tarekat Samaniyah dan tarekat Sattariyah muncul sebagai penyalur bagai ketidakpuasan dalam kehidupan sosial politik

suatu negara. Salah satu aset yang amat penting dalam organisasi semacam ini adalah karisma seorang Syeh tarekat. Karisma inilah yang digunakan sebagai spirit untuk menggerakan massa, sekalipun diketahui bahwa tarekat, demikian juga organisasi-organisasi spiritual yang ada tidak pernah melengkapi diri dengan infrastruktur yang memiliki kecenderungan untuk melakukan pemberontakan. Hal ini telah disampaikan oleh Dr. Snouck Hurgronje kepada pemerintah Kolonial diakhir abad ke-19 yang mengatakan bahwa ketakutan yang dimiliki oleh pemerintah Kolonial kepada aliran-aliran yang ada di Indonesia amat berlebihan. Karena sekalipun berbagai aliran tarekat atau perkumpulan-perkumpulan spiritual atau organisasi-organisasi kebatinan digunakan oleh masyarakat sebagai alat untuk pemenuhan kehendak baik pribadi maupun politik, gerakan-gerakan itu umumnya sangat pendek singkat dan sporadis sifatnya karena itu tidak berbahaya. Kita lihat misalnya :

I. Pemberontakan yang dilakukan oleh seorang yang bernama Abdul Rahman yang berasal dari Yogya, penganut tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, murid Kyai Krapyak yang kemudian berganti nama menjadi Kyai Khasan Mukmin. Tahun 1904 Ia mempermaklumkan dirinya sebagai Imam Mahdi dan mengajarkan ilmu yang disebut "Ngelmu Ghaib" melalui pengamalan bunyi atau lafal yang disebut rafal. Dalam ajaran itu Kyai Khasan Mukmin mengajarkan enam macam ilmu :
    1. Ngelmu Hak atau Ngelmu Nucuk
       Yang dapat melafal ilmu ini akan memperoleh jaminan kenikmatan di alam baka.
    2. Ngelmu Awite Wujud
    3. Ngelmu Malaikatan. Yang dapat melafal ilmu ini bisa membuat dirinya menghilang,
    4. Ngelmu Rapat-Rapal Perang Salib.
    5. Ngelmu Sakadat Penetep.
    6. Ngelmu Nafas.

Gerakan Kyai Khasan Mukmin sebenarnya adalah bentuk protes dari masyarakat tradisional Jawa terhadap penetrasi kekuasaan asing khususnya Belanda pada saat itu. Penyiapan berbagai infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi dan roda pemerintahan Kolonial dianggap mengganggu ketenteraman kehidupan tradisional. Pembangunan jalan kereta api, jalan-jalan raya, jalur trem yang mengakibatkan tergusurnya makam-makam suci yang disebut sebagai makam leluhur dianggap suatu penghinaan terhadap kehidupan tradisional. Diterapkan pajak tanah yang dianggap sangat berat ketika itu demikian juga pembuatan saluran air minum yang menyalurkan air-air bersih melalui pipa-pipa timah sangat ditantang oleh masyarakat sebagai air kafir, pendirian industri garam yang mencetak produksinya berbentuk bata dianggap najis karena telah merubah bentuk natural garam. Semua ini menjadi alasan bagi Kyai Khasan Mukmin untuk melakukan penantang terhadap pemerintah Kolonial sehingga ia memobilisasi rakyat untuk melakukan pemberontakan di Sidoharjo Kresidenan Surabaya tepatnya di desa Kebonpasar Distrik Gedangan tanggal 27 Mei 1904.

II. Pemberontakan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Darmojo. Pada tanggal 27 Januari 1907 di Dukuh Bendungan, Desa Barong Distrik Waru Jayeng Afdeling Berbek Karesidenan Kediri. Darmojo adalah seorang yang cukup berada memiliki sawah ladang, binatang ternak yang cukup banyak mempunyai penggilingan tebu dan bengkel memiliki sejumlah andong, dokar, gerobak seperangkat gamelan dan wayang. Ia juga memiliki rumah dan pekarangan yang luas dan memiliki pembantu-pembantu yang banyak. Di Dukuh Bendungan Darmojo dikenal sebagai Kyai sekalipun ia bukan guru agama ia memiliki kharisma karena ia dianggap sebagai guru ilmu kebatinan yang sangat disegani. Kyai Darmojo begitu masyarakat memanggilnya mempermaklumkan bahwa akan turun di dunia ini seorang ratu adil karena menurutnya dunia hampir kiamat. Menurut mimpinya

wahyu ratu adil itu akan turun kepadanya. Pada pertengahan 1907 Kyai Darmojo mengundang warga masyarakat Bendungan dan para pengikut yang mempercayainya berkumpul mengadakan selamatan. Ketika itulah Kyai Darmojo mengumumkan dirinya sebagai ratu adil, dan semua hadirin memberi sembah sujud. Pada pertemuan itu ia mengangkat pembantu-pembantunya atau orang-orang dekatnya sebagai panglima-panglima ratu adil. Kepada para pengikutnya Kyai Darmojo memberi keyakinan bahwa mereka tidak perlu takut bertempur melawan Belanda atau orang-orang kafir karena apa yang mereka lakukan adalah perang suci atau perang sabil yang akan mengembalikan ketenteraman kehidupan tradisional mereka. Kyai mengatakan bahwa jika ada diantara mereka yang sampai gugur dalam peperangan jenasahnya tidak boleh segera dimandikan karena menurut Kyai jenasah-jenasah itu akan hidup kembali setelah mendapat siraman air dari sorga (tirtowilayat) oleh Kyai Togok dan Kyai Semar.

Kedua contoh pemberontakan masyarakat yang bertemakan gerakan mistik ini hanyalah sebahagian kecil dari gerakan-gerakan serupa yang terjadi di awal abad ke-20. Akan tetapi setelah berdirinya Sarekat Dagang Islam tahun 1911 oleh Haji Zamanhoedi dan kemudian beralih nama menjadi Sarekat Islam pada tanggal 10 September 1912 oleh Haji Omar Said Cokroaminoto di Surabaya maka Sarekat Islam tidak hanya terbatas pada usaha perdagangan saja tapi juga menjadi saluran pembinaan ekonomi, sosial-cultural masyarakat Indonesia. Sarekat Islam memberikan lampu merah pada pemerintah Kolonial bahwa organisasi modern yang bernafaskan Islam ini amat berbahaya jika dibanding dengan aliran-aliran kepercayaan atau aliran-aliran kebatinan yang ada. Karena Sarekat Islam lebih terampil dan sistematis dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, salah satu aspek yang penting dari Sarekat Islam pada awal berdirinya ialah kemampuannya menempatkan dirinya seiring dengan aspirasi politik masyarakat luas untuk merdeka, dengan kata lain denyut nadi Sarekat

Islam adalah denyut nadi rakyat dalam segala-galanya. Karena itu bertambah luas jaringan Sarekat Islam sebagai organisasi yang tumbuh kemudian yang bertopang pada kegiatan sosial ekonomi agama dan kemasyarakatan maka bertambah sedikit pula fungsi-fungsi sosial yang diemban oleh organisasi tarekat, kebatinan atau organisasi-organisasi spiritual lainnya. Realitas ini memaksa pemerintah Kolonial untuk mengeluarkan pengakuan pada tanggal 30 Juni 1913 atas Sarekat Islam sebagai badan hukum, tetapi pengakuan itu tidak diberikan secara keseluruhan, artinya pemerintah Belanda akan memberikan pengakuan kepada cabang-cabang Sarekat Islam secara sendiri-sendiri. Keadaan ini menyebabkan lahirnya keputusan pemerintah Belanda pada tanggal 18 Maret 1916 atas terbentuknya Central Sarekat Islam (C.S.I.) Untuk membedakannya dengan Sarekat Islam di daerah-daerah atau Sarekat Islam lokal. Secara organisatoris Sarekat Islam lokal yang berdiri di hampir semua kota-kota di Jawa adalah satu federasi cabang-cabang dengan Central Sarekat Islam (C.S.I.) sebagai pimpinan pusat.

Tampaknya setelah Sarekat Islam lokal berdiri, masyarakat mulai memiliki wadah penyaluran baru atas kehendak-kehendaknya yang dianggap lebih efektif dalam menghadapi realitas kehidupan yang secara ekonomis dikuasai oleh para pengusaha-pengusaha Cina dan modal-modal besar dari perusahaan-perusahaan Asing. Banyak bukti yang dapat ditujukan bahwa tokoh-tokoh Sarekat Islam lokal sebelumnya dikenal sebagai tokoh-tokoh dari berbagai aliran spiritual. Itulah sebabnya maka sejak 1912, atau sejak berdirinya sarekat-sarekat Islam lokal terutama di Jawa, gerakan-gerakan protes sosial yang bertemakan ratu adil dalam tatanan mistik Jawa mulai berkurang karena banyak peranannya diambil oleh Sarekat Islam lokal, demikian juga organisasi-organisasi sosial dan kepartaian yang lain telah muncul sebagai medium bagi pemenuhan-pemenuhan kehendak yang baru. Pada organisasi-organisasi Sarekat Islam lokal membaur berbagai kepentingan-kepentingan para tokoh dalam organisasi itu

keadaan ini berlangsung sampai akhir tahun 20-an sehingga hampir semua gerakan-gerakan protes sosial yang terjadi kurun waktu itu tidak bisa dilepaskan dari gerakan Sarekat Islam lokal. Akan tetapi dalam kurun waktu itu PKI (23 Mei 1920) berdiri, kemudian di susul PNI (4 Juli 1927) kedua Partai Politik ini dengan cepat memperoleh dukungan masyarakat karena dianggap lebih mudah realistik dalam menyalurkan berbagai kepentingan.

Tetapi baik PKI maupun PNI bersandar pada ideologi-ideologi modern yang berawal dari Barat. Ketika PKI melakukan pemberontakan tahun 1926-1927 maka sejak itu sampai tahun 1945 PKI absen dari gerakan politik Indonesia. Pemerintah Kolonial mengadakan pengawasan ketat terhadap partai-partai politik. Ketika itu terjadi suatu fluktuasi yang tampak di pemukiman bahwa gerakan-gerakan keagamaan atau organisasi-organisasi spiritual mulai bermunculan kembali secara berganti. Banyak contoh yang bisa ditunjukkan misalnya munculnya gerakan Mesianistik Raden Mas Hadi di Gombong, 28 Januari 1920.

Lihat laporan residen Banyumas M.VANZANDVELD kepada gubernur jenderal Y.P.GRAAF. Gerakan Islam Abangan di Klaten tanggal 29 Agustus 1920 . Lihat laporan residen Klaten A.H. Neys kepada residen Surakarta. Gerakan Messiannistik Kyai Boelkin di Berebek tanggal 31 Maret 1923, lihat laporan residen Berebek H.J. Hoffman kepada residen Kediri. Gerakan Messiannistik Pak Djebrak di Mojokerto tanggal 18 Juli 1923 lihat laporan residen Mojokerto H.C. Van den Bosch kepada residen Surabaya. Gerakan Messiannistik Moerakat di Mojokerto tanggal 5 November 1923 lihat laporan residen Surabaya W.P Hillen kepada Gubernur Jenderal D.Fock. Gerakan keagamaan Mistik Lidek di Meester Cornelis tanggal 25 Juli 1924, lihat laporan residen Batavia J.R. Schemel de Jong kepada Gubernur Jenderal.

Gerakan Keagamaan Pengikut Kyai Achmad Rifangi di Pekalongan tanggal 31 Juli 1924, lihat laporan residen Pekalongan J.F.

Jasper kepada penasehat umum urusan Bumiputera. Gerakan Agama Jawa-Sunda dari Madrais di Kuningan, Cirebon tanggal 1 September 1922, lihat laporan residen Pangeran Patih Kraton Kanoman Cirebon (Hoedajabrata). Gerakan Tarekat Islam di Jawa tanggal 8 1928 lihat laporan residen penasehat urusan Bumiputera E.Gobee kepada residen Kediri M.H. Doornik.

Gerakan-gerakan tersebut di atas dengan sangat jelas tampak dalam sejarah sosial dan kemasyarakatan kita yang muncul secara dinamis mengisi kevakuman dalam mewadahi aspirasi masyarakat. Keadaan ini berlangsung sampai akhir tahu 30-an atau sampai masa pendudukan Jepang satu hal yang amat menarik bahwa dimasa pendudukan Jepang ketika kehidupan sosial ekonomi masyarakat mencapai titik yang paling rendah justru tidak ditopang oleh munculnya aliran-aliran kepercayaan atau spiritual yang dapat menolong masyarakat untuk keluar dari keadaan yang amat menyengsarakan di jaman kekuasaan Jepang.

Barulah setelah kemerdekaan Indonesia mencapai (1945) mulai kembali tumbuh berbagai organisasi atau kelompok-kelompok spiritual dan keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 50-an. Memasuki masa pemilihan umum tahun pertama 1955 dinamika kegiatan organisasi-organisasi spiritual di Indonesia kembali mengalami penurunan dan bisa terlihat dengan jelas betapa banyak tokoh-tokoh dari berbagai aliran kebatinan/aliran kepercayaan yang menjadi tokoh-tokoh partai politik yang akan terjun pada pemilu tahun 1955. Berdasarkan atas pengamatan sederhana ini kita dapat melihat bahwa sesungguhnya dalam sejarah sosial Indonesia tidak hanya partai-partai politik yang dapat menjadi kendaraan bagi berbagai kepentingan tetapi juga organisasi-organisasi spiritual mengalami perlakuan yang sama untuk dijadikan sebagai kendaraan oleh orang-orang tertentu untuk mencapai keinginan-keinginan pribadi atau kelompok. Pertanyaan yang terakhir, apakah irama sejarah ini masih berlanjut sampai sekarang, jawabannya, mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Ali Abdul Wahid Wafi**, *Ibnu Khaldun, Riwayat dan Karyanya*, Jakarta, 1985.
2. **Annemariee Schinmmel**, *Dimensi Mistik Dalam Islam*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 1975.
3. Arsip Nasional Republik Indonesia, *Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 7, Sarekat Islam Lokal*, Jakarta 1975.
4. Arsip Nasional Republik Indonesia, *Penerbitan Sumber-sumber Sejarah, Laporan-laporan tentang Gerakan Protes di Jawa Pada Abad XX.*
5. Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Masyarakat Jawa*, 1981.
6. Mahrus Irsyam, Zulfikar Ghazali, JR. Chaniago, Anhar Gonggong, Direktorat Jendral Kebudayaan, *Sejarah Kepartaian di Indonesia,* Jakarta 1985.
7. Drs. M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, sebuah potret pasang-surut, Yogyakarta 1983.
8. Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, Yogyakarta 1992.
9. Mukhlis, Kathryn Robinson, Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, *Agama dan Realitas Sosial, Unhas* 1985.
10. Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil*, Jakarta 1984.

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PERUNDANGAN

Oleh:
Jusuf Kertanegara, S.H.

I. PENDAHULUAN

Sekalipun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Pemerintah Republik Indonesia sudah dinyatakan secara tegas sebagai bukan agama tetapi adalah bagian dari kebudayaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia tetapi tidak dapat disangkal bahwa timbulnya aliran-aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia adalah karena masyarakat Indonesia secara umum sangat religius. Untuk masyarakat yang religius, budaya "Mencari Tuhan" yang diikuti dengan pendekatan diri kepada Tuhan adalah suatu Way of Life yang berkesinambungan baik di masa senang maupun di masa susah, yang selanjutnya mewarnai kehidupan berketuhanan pada setiap individu. Karena lekatnya rasa percaya akan eksistensi Tuhan pada setiap individu maka hidup yang berketuhanan sudah merupakan budaya bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

Di lain pihak selanjutnya masuklah ke Indonesia agama-agama dari luar Indonesia yang tentu saja sebagai agama mengatur antara lain hubungan antara manusia dengan Tuhan, sehingga akhirnya di Indonesia terjadi dualisme dalam hubungan pendekatan manusia dengan Tuhan, yaitu melalui jalur aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai budaya asli bangsa Indonesia dan melalui jalur agama-agama yang datang kemudian dari luar Indonesia.

Tetapi masyarakat Indonesia melihat itu semua telah memperkaya kehidupan spiritual bangsa Indonesia dan oleh masyarakat kedua jalur tersebut telah dijalankan selama berabad-abad. Bahkan terkadang kedua jalur tersebut dijalankan serentak dalam kehidupan

sehari-hari sehingga kadang-kadang orang tidak dapat melihat lagi kehidupan mana yang landasannya adalah agama dan segi kehidupan mana yang landasannya adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan bahkan banyak orang yang cenderung mengambil langkah-langkah kehidupan yang syarat-syaratnya ringan saja menurut agama maupun menurut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai contoh seorang yang mengaku beragama Islam tidak melaksanakan sholat lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan tetapi mengucapkan kata-kata Bismillah setiap akan makan dan melakukan pekerjaan lain, melaksanakan pernikahan dengan ijab kabul di depan Tuan Qodhi dan sebagainya. Disisi lain orang tersebut meletakkan sesajen-sesajen untuk leluhurnya yang telah meninggal dan mencari hari baik menurut perhitungan Nogo Dino sebelum melakukan pernikahan, menempati rumah baru dan lain-lain.

Selama penjajahan Belanda, sewaktu pemerintah Kolonial tidak ambil pusing terhadap kehidupan spiritual Bangsa Indonesia hal-hal semacam itu tidak memperoleh perhatian dari pemerintah apalagi sentuhan-sentuhan hukum. Setelah Indonesia merdeka kehidupan spiritual memperoleh perhatian lebih serius dari pemerintah, dengan indikator dibentuknya Departemen Agama. Sejak saat itu para tokoh agama maupun spiritual mulai mencari pemurnian-pemurnian menurut kaidah-kaidah asli sehingga kehidupan spiritual dapat melalui jalurnya yang benar dalam penilaian masing-masing.

Disini diperlukan sentuhan-sentuhan tangan hukum untuk menjaga rambu-rambu pemurnian tersebut dalam bentuk perangkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

II. PERMASALAHAN

Republik Indonesia sebagai negara hukum menghendaki agar semua tata kehidupan dalam penyelenggaraan negara maupun bermasyarakat diatur dengan landasan-landasan hukum, sehingga jelas alur dan batas-batasnya.

Demikian juga dalam kehidupan spiritual negara kita telah menerbitkan seperangkat produk hukum yang dimaksud untuk mengatur agar dalam menjalankan kehidupan spiritual yang banyak ragamnya itu tidak terjadi benturan-benturan ataupun menimbulkan potensi konflik dalam masyarakat sekaligus memelihara kelestarian masing-masing kelompok budaya dan agama.

Untuk itu marilah kita lihat sekarang di mana peranan dan fungsi hukum serta perangkat perundangan tersebut dalam kaitan kebudayaan kehidupan spiritual bangsa Indonesia.

III. ANALISA

1. Landasan Hukum
   - Pancasila
   - UUD 1945
   - TAP MPR No. XV/MPR/1966
   - UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.
   - UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
   - INPRES No. 14 Tahun 1967 serta juklaknya tentang agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.
   - KEPJA No. KEP-004/3-A/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi PAKEM Pusat.
   - dan ketentuan/peraturan lainnya yang berlaku.
2. Peraturan-peraturan tersebut yang dibuat secara tegas menempatkan "Pemisahan antara agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Pemisahan dimaksudkan agar tidak terjadi benturan atau konflik antara para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan pemeluk agama. Dengan peraturan-peraturan itu diupayakan agar pemurnian atau pembakuan supaya agama dan kepercayaan tidak tercampur.

3. Dalam pasal 29 UUD 1945 dijelaskan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Namun dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa negara kita bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama, serta bukan negara yang mendasarkan diri pada agama tertentu saja. Sekularisme yang menguasai dunia Barat sejak abad 17 yang lalu, ternyata tidak mempunyai penganut kuat terhadap para pendiri Republik Indonesia (the Founding Fathers), maupun rumusan Pancasila sebagai dasar falsafah negara kita, maupun rumusan pasal 29 dalam batang tubuh UUD 1945.
4. Pada masa reformasi, demokratisasi dan pengaruh globalisasi saat ini memang diperlukan sentuhan hukum namun kita perlu berhati-hati agar tidak kehilangan jati diri bangsa menyangkut antara lain sosial budaya/budaya spiritual bangsa Indonesia. Masalah-masalah yang prinsipiil seyogyanya tetap dipertahankan agar kelak tidak terjadi benturan atau kekecewaan generasi mendatang yang mengakibatkan disintegrasi bangsa.
5. Keanekaragaman budaya yang selama ini dibina/dikembangkan dan perlu dipertahankan secara terarah dan berkesinambungan dalam rangka memperkokoh jatidiri budaya nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai warisan budaya, eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termuat dalam pasal 32 UUD 1945 dan pembinaannya dibebankan kepada Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud yang berpedoman kepada Pancasila UUD 1945 dan GBHN.
6. Disini peran hukum adalah menjadi rambu-rambu agar keaslian aliran-aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia tetap terjaga, serta mengatur secara tegas batas-batasnya agar tidak terjadi benturan-

benturan sesama aliran ataupun dengan agama-agama yang telah exist di Indonesia.

7. Kejaksaan sebagai salah satu unsur penegak hukum di negara Republik Indonesia bukanlah sebagai pemegang politik hukum namun hanya sebagai pelaksana politik hukum dalam hal ini menjalankan UU sesuai kewenangan yang diberikan Negara.

IV. KESIMPULAN

1. Dari rumusan Pancasila sebagai falsafah negara kita, maupun rumusan pasal 29 dan pasal 32 UUD 1945, selain mengisyaratkan bahwa negara kita bukan negara sekuler, juga menyatakan bahwa negara kita bukanlah negara agama (Teokrasi).
2. Dalam rangka era reformasi, demokratisasi dan globalisasi, saling pengertian dan dialog antar umat beragama dan antara penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan umat beragama dan antara umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan pemerintah mutlak diperlukan terutama untuk menciptakan kerukunan Nasional dan lain-lain.

   Dialog teologis dan budaya spiritual serta hukum dengan semua golongan perlu disosialisasikan dengan tujuan untuk memahami nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pemeluk agama lain dan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pemahaman seperti itu hanya mungkin apabila kita sendiri dapat memahami agama/kepercayaan yang kita anut secara mendalam.
3. Primordialitas keagamaan/kepercayaan merupakan ancaman yang paling besar terhadap kehidupan nasional suatu negara, sebab rasa kesetiakawanan dan loyalitas hanya akan terbatas pada orang-orang yang seagama atau se-kepercayaan dan akan bersikap bermusuhan dengan yang lain, suatu sikap ekslusivisme yang sangat negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

yang oleh karena itu hukum berperan menjaga dengan menegakkan peraturan-peraturan yang relevan dengan kehidupan spiritual bangsa.

V. PENUTUP

Sesuai dengan tugas dan wewenang sebagai pengawas aliran kepercayaan masyarakat, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, teristimewa dalam menyongsong era demokratisasi dan globalisasi. Kejaksaan mengemban misi selaku alat negara penegak hukum yaitu :

1. Kejaksaaan wajib mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, sosial budaya/budaya spiritual kesopanan (budi luhur) dan kesusilaan (nilai etik) serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jakarta, 14 Juni 1993
JAKSA AGUNG R.I.
JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN,

ttd

Jusuf Kertanegara, S.H.

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

(makalah bahasan)

Oleh:
Moh. Nahar Nahrowi dan Moh. Zahid

1. Umum

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang relijius. Relijius bangsa ini selanjutnya memformulasi menjadi pandangan hidup bangsa dalam rumusan Pancasila dengan sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Pandangan hidup ini tertuang dalam konstitusi negara : Pembukaan dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). UUD 1945.

Dalam perkembangannya, di samping terumuskan dalam agama yang sudah "formal dan mapan", tumbuh unsur baru yang mewarnai, atau menjadi bagian/sekte/faham dari agama, atau menjadi unsur yang berdiri sendiri: *kepercayaan* (dengan berbagai macam penyebutannya).

Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 kata *kepercayaan* (dengan kata penunjuk itu) disebut setelah kata agama. Dalam penjelasan pasal 29 ayat (1), dinyatakan bahwa ayat ini menyatakan *kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.* Moh Hatta mengartikan kata kepercayaan dalam Pasal 29 ayat (2) tersebut sebagai bagian dari agama yang disebut sebelumnya. Menurut pemahaman ini tidak ada hubungan langsung antara kata *kepercayaan* yang disebut dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 itu dengan apa yang dimaksud oleh masyarakat dengan *kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.* Di samping pemahaman tersebut ada pemahaman lain. Menurut pemahaman yang kedua ini, kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa itu mengacu kepada kata *kepercayaan* itu yang disebut setelah kata agama dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Pembicaraan tentang kepercayaan, kejawen, kebatinan, dan klenik muncul pada sekitar tahun 1950-an. Dalam GBHN kata kepercayaan kadang-kadang disebut berdampingan dengan kata ketakwaan (modal dasar dari GBHN 1973, modal dasar dari GBHN 1978, modal dasar dari GBHN 1983, modal dasar dari GBHN 1988). Namun yang paling banyak penyebutan *kata kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* berdampingan kata agama; seperti dalam: (1), dalam Arah Pembangunan Jangka panjang GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993, GBHN 1998, (2) sebagai salah titel bidang: Agama dan *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, ... Serta (3) titel sub bidang: Agama dan *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* dalam Arah Dan kebijaksanaan Pembangunan GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993, GBHN 1998 (telah dicabut).

Dalam huruf (f) Bidang Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa GBHN 1978 dan seterusnya, secara khusus mengamanatkan pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang pada prinsipnya sebagai berikut :

a. Kepercayaan bukan agama dan tidak menjadi agama baru.
b. Diarahkan agar kehidupan benar-benar sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari kutipan-kutipan UUD dan GBHN tersebut, nyata bahwa arti kata kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai arti lebih dari satu.

2. Selintas Sejarah pembinaan Aliran Kepercayaan.

Meskipun secara implisit, masalah *kepercayaan* telah menjadi sasaran pengaturan peraturan perundang-undangan sejak jaman Belanda. Contoh: Pasal 175 IS yang berbunyi: Gubernur Jenderal menjaga semua *aliran-aliran agama* tunduk kepada Peraturan-Peraturan Pemerintah.

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah yang bertugas melaksanakan UUD (khususnya yang berkaitan dengan agama) C.Q Departemen Agama merasa berkewajiban untuk mengurus/mengatur/melayani/membimbing kelompok-kelompok beragama dan kelompok-kelompok lainnya. Nama dan bentuk unit organisasi yang melakukan tugas pengurusan kepercayaan ini berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat, namun tugasnya hampir sama:

(a). 1946: di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Agama dibentuk Bagian Politik dan Bagian Urusan Agama-Agama Lain dan gerakan/Aliran Kerohanian (bagian Aliran Agama/Bagian B/Bagian K/Bagian L (termasuk di dalamnya Seksi Hindu Bali. Unit organisasi pada tahun 1963 berubah menjadi Lembaga Penelitian gerakan/Aliran Kerohanian (disingkat LEGA). Pada tahun 1967, lembaga ini berubah menjadi Dinas penelitian dan Aliran Kerohanian (disingkat Dinas Penegak) yang merupakan bagian Dirjen. Bimas Islam. Pada tahun 1969 disempurnakan menjadi Lembaga Aliran Kerohanian/Keagamaan (disingkat LEMROHAG). Perkembangan terakhir, pengurusan aliran kepercayaan ini dibebankan kepada Pusat Penelitian dan pengembangan Perikehidupan Agama dan Perikehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Badan Litbang Agama. Nomenklatur yang panjang ini kemudian disederhanakan menjadi Pulitbang Kehidupan Beragama.

(b). Tugas unit-unit organisasi tersebut relatif tetap, yaitu:
   (1) Memperhatikan situasi politik dan perkembangan masyarakat yang bersangkutan dengan agama/kepercayaan.
   (2) Mengurus hal-hal yang bertalian dengan urusan agama-agama lain dan gerakan/aliran kepercayaan.

   Mungkin yang agak berbeda dengan tugas unit organisasi sebelumnya, adalah tugas LEMROHAG (1963):

   (1) Mengawasi aliran - aliran kerohanian / keagamaan

(2) Membina dan membimbingnya ke arah induk agamanya masing-masing.
(3) Melakukan penelitian terhadap aliran kerohanian/keagamaan.

Sedang pada tahun 1975, di lingkungan Departemen Agama dibentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, dimana salah satu unit organisasinya adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Peri Kehidupan Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian disederhanakan menjadi Pusat penelitian dan pengembangan kehidupan Beragama. Tugas Pusat ini di samping melakukan penelitian, Pusat ini juga melakukan tugas bimbingan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa/Faham Keagamaan.

Dengan disahkannya TAP MPR No. II/MPR/1978, yang salah satu poinnya secara khusus mengatur tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Sejak Indonesia merdeka, pembinaan *kepercayaan* ini telah menjadi perhatian negara. Ini terbukti dari dicantumkannya pembinaan dalam setiap UUD yang pernah berlaku:

a.1. Pasal 18 UUDRIS: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsafan batin dan agama; hak ini meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula kebebasan, menganut agamanya dan keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik dimuka maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka.

a.2. Pasal 18 UUDS: Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsafan batin dan pikiran. Pasal 43 terdiri dari 4 ayat yang menyatakan tentang dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beribadah, pemberian bantuan serta pengawasan agar segala persekutuan taat kepada hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis.

a.3. Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Ayat (1). Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2). Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.

b. Ketetapan-Ketetapan MPR:

b.1. TAP 1973: disebut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdampingan dengan penyebutan sosial budaya, dalam Arah Pembangunan Jangka Panjang.

b.2. TAP 1978: dengan bidang sama dengan tahun 1973, namun satu huruf (f) membicarakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama; pembinaan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tidak menjadi agama baru, dan pelaksanaannya agar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

b.3. TAP 1983: Satu huruf (f) persis dengan TAP 1978

b.4. TAP 1988: Satu huruf (f) persis dengan TAP 1978.

b.5. TAP 1993 Satu angka (6) persis dengan TAP 1978.

b.6. TAP II/MPR/1998: sama dengan GBHN tahun 1978, namun ditambah *pembinaan diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara* (dicabut).

c. Salah satu ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kepercayaan ini adalah penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalah-Gunaan dan Penodaan

Agama. Penpres ini diperkuat dengan UU No. 5 tahun 1969. Konsideran Penpres ini menyatakan bahwa peraturan ini diterbitkan guna mencegah penyalaggunaan atau penodaan agama dan untuk pengamanan revolusi dan ketenteraman masyarakat. Dalam praktek, banyak terjadi penyalahgunaan atau penodaan agama dilakukan oleh perorangan, perkumpulan yang mempunyai pemikiran atau menamakan dirinya aliran kepercayaan.

4. Arah Reformasi

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan warisan budaya yang dapat dikembangkan untuk pembangunan nasional terutama pembangunan nasional untuk mengejar kemajuan rohaniah di samping kemajuan jasmaniah.

Kepercayaan ini bukanlah agama baru, tidak menjadi agama baru tidak boleh merusak agama-agama yang ada, namun justru diharapkan dapat memperkuat keimanan dan ketaatan masyarakat kepada ajaran agama yang dipeluknya.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan dapat berperan sebagai:

a. Pemberi sumbangan bagi landasan etik, moral dan spiritual pembangunan
b. Pemelihara dan pemupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Penggugah anggota-anggotanya dan warga masyarakatnya agar memiliki budi pekerti dan kematangan jiwa.
d. Mencegah lahirnya kultus individu kepada pimpinannya, serta menggugah anggota-anggotanya berperan aktif dalam pembangunan.

Sebagai warga masyarakat dunia, Indonesia terikat untuk mentaati etik internasional seperti HAM, lingkungan hidup dan sebagainya. Berkaitan dengan kepercayaan ini, Pasal 18 HAM telah mengatur sebagai berikut: mengatur tentang setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama; dalam hal ini

termasuk kebebasan berganti agama dan kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama dan kepercayaannya dengan mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun tersendiri.

Era reformasi sekarang ini lebih menuntut dilakukannya pembinaan kepercayaan ke arah :

a. Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan dan ditekankan kepada fungsinya agar lebih berperan sebagai sumber etik, moral dan spiritual serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tidak kehilangan missi yang sebenarnya.
b. Debirokratisasi: dengan mengurangi sejauh mungkin campur tanganpemerintah dalam urusan-urusan masyarakat,
c. Mengikis kultus individu dan primordialisme keagamaan.
d. Demokratisasi: memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri peran masyarakat yang diharapkan.
e. Pemeliharaan kemajemukan, dengan batasan tetap dijaga persatuan dan kesatuan, secara konstitusional.
f. Transparansi, segala alasan, kebijaksanaan dan tujuan harus diketahui oleh masyarakat.

Menanggapi pemakalah utama, kiranya dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengertian asli dan tidak asli dalam kebudayaan (halaman 1). Dalam konsep kebudayaan, agama sebagai satu unsur kebudayaan mengalami proses assimilasi, akulturasi dan transformasi. Sehingga penyebutan asli dan tidak asli rasanya kurang tepat. Agama Islam dan agama-agama lainnya masuk dan berkembang ke Indonesia melalui proses tersebut.
b. Pemisahan agama dengan kepercayaaan tidak konsisten (halaman 4). Pada III.5 meletakkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa sebagai warisan budaya, namun pada IV.2 menyarankan diadakannya dialog antara umat beragama dengan penghayat kepercayaaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemisahan agama dan kepercayaan tidak harus tegas, tidak harus secara mutlak terpisah, karena keduanya sama tetapi tidak sebangun.

Namun bagaimanapun, pengembangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdapat rambu-rambu yang diperhatikan, seperti tidak melanggar peraturan perundang-undangan (yang tertulis dan tidak tertulis) tidak mengganggu ketertiban umum dan melanggar kesusilaan.

5. Penutup

Dalam kaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dua fungsi hukum sebagai *tool of social order* serta *tool of social engeenering*, perlu ditetapkan secara seimbang dan serasi. Semoga tulisan pendek ini dapat melengkapi uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya.

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PERUNDANGAN

(makalah bahasan)

Oleh:
Drs. K. Permadi, S.H.

1. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud budaya spiritual adalah warisan kekayaan rohaniah yang dianut oleh sebahagian bangsa kita, yang bukan agama. Dan ia juga bukan merupakan dari agama tertentu.
   Ia adalah warisan leluhur nenek moyang kita yang diyakini kebenarannya yang harus dilaksanakan penghayatannya dengan kesadaran utuh sampai ke lubuk hati yang terdalam. Ia pula merupakan metode pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pemisahan secara ketat antara agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan jaminan tidak terjadinya konflik antara keduanya.
   Sebab antara keduanya mempunyai persamaan yaitu sama-sama meyakini adanya zat yang mutlak yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Memang ada perbedaannya, yaitu di dalam cara manembah Sang Pencipta. Bahkan tidak jarang seorang penghayat, ia adalah seorang penghayat di satu pihak tetapi juga melaksanakan peribadatan agama tertentu. Jadi ia seolah-olah merangkap, yaitu sebagai seorang penghayat sekaligus juga penganut suatu agama tertentu.
3. Di dalam makalah Bapak Yusuf Kertanegara diperlukan beberapa ketentuan perundangan yang diperlukan bagi perikehidupan masyarakat penghayat.
   a. Pasal 29 ayat 1 dan 2
   b. Undang-undang No. 1 tahun 1974 (tentang Perkawinan

dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) (Pelaksanaan UU Perkawinan).

c. Peraturan Pemerintah R.I. No. 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

d. Surat Edaran Mendagri No. 477/74054, tanggal 18 November 1975 tentang Pengisian kolom "Agama" pada lampiran Surat Mendagri No. 221a tahun 75.

4. Permasalahan tentang perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tuntas setelah adanya perbedaan faham interpretasi tentang Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

   Dalam TAP MPR No. II/MPR/1978 disebutkan bahwa "Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab". Dalam masyarakat sering timbul pertanyaan kadang-kadang berkembang menjadi polemik terhadap kedudukan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipandang dari sudut agama. Hal ini bersumber dari rumusan pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sbb:

   > "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

   Rumusan TAP MPR No. II/MPR/1978 itu kembali seperti yang disampaikan oleh Dr. Rajiman Widiodiningrat dan disepakati secara bulat yakni dengan mempergunakan perumusannya "sesuai dengan (menurut) agama (nya) dan kepercayaan masing-masing" bukan "agama dan kepercayaannya itu."

   Dari Penjelasan BP-7 Pusat yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Soeprapto, yaitu dengan judul "Pengamalan Pancasila

dan UUD 1945 khususnya sila I dan Pasal 29 tertanggal 8 Februari 1994, di mana beliau menyatakan bahwa, apa yang dinyatakan oleh Ketua Rajiman yang perumusannya diterima dengan bulat. Seperti kita pahami bersama bahwa akhirnya rumusan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tersebut seperti telah kita kutip di depan yakni kata "dan kepercayaannya masing-masing" berubah menjadi " dan kepercayaannya itu".

Dari sejarah terumus ayat tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan kepercayaannya itu adalah kepercayaan yang merupakan substansi yang berdiri sendiri disamping agama. Jadi bukan berarti kepercayaan dari agama yang bersangkutan.

5. Karena adanya perbedaan pemahaman itulah maka segala ketentuan perundang-undangan diperlakukan *satu substansi,* yaitu pada substansi agama. Sehingga dengan adanya pemahaman tersebut di atas maka segala peraturan perundangan yang diperlakukan kepada masyarakat penghayat menjadi tidak berlaku lagi.

6. Menurut Rasulullah SAW dinyatakan bahwa tidak ada Iman yang lebih hebat dari pada keyakinan. Jadi keyakinan merupakan landasan daripada Iman.

   Adapun Iman itu sendiri menurut Said Aqil Sirad di dalam artikelnya "Agama dan Persatuan Semu" (m.i. tanggal 29 April 99) dinyatakan bahwa Iman itu sendiri bukan milik komunitas agama tertentu, akan tetapi semua agama-agama baik agama alamiah (Natural Religion) atau Agama Samawiyah (revealed religion) yakni agama yang diwahyukan Allah (Agama langit) asal benar-benar diyakini kepada Zat yang mutlak, dan meyakini adanya alam akhirat serta berbudi pekerti luhur tentu akan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa (Al Baqaroh 62 dan Al Maidah 69). (Ada berbagai keyakinan tetapi Tuhan itu Esa)
   Sebutan Tuhan bermacam-macam (Al Baqaroh 139).

7. Ciri khas daripada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan terletak pada ajarannya, akan tetapi bagaimana penghayatan akan isi ajaran. Adapun inti daripada penghayatan itu adalah **LAKU.**

   "**LAKU** menurut Moh. Ali dalam bukunya "**Ilmu Kanthong Bolong**", adalah pelaksanaan terus-menerus daripada petunjuk dan bimbingan utama daripada "Sang Guru."

   "LAKU menurut Surat Wedhatama"

   "Ngelmu iku kalakone kanthi laku
   Lekase lawan khas, Tegese khas
   Nyantosani Setya Budaya Pengekese
   Dur Angkara".

   "Dadi ngelmu iku kudu dilakoni
   Sawise dilakoni kudu santosa atine,
   Mantep tetep ambanda hawa nafsu"

   "Ingkang kasebut "Ngelmu" inggih punika
   kawruh ingkang boten mawi kaucapaken
   sarana lisan, nanging namung lampah
   pangandikaning batin.

Di dalam Islam adanya :

TAKHALI → menyingkirkan hal yang tak terpuji antara lain benci, dengki meri, serakah.

TAHALLI → mengutamakan hal-hal yang terpuji antara lain: sadar, pasrah , narima, tawakhal.
Laku dengan latihan-latihan kejiwaan → Riyadhah dan masahabbah sampai

TAJALLI → penampakan hakekat Tuhan pada seluruh penampakan.

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DALAM PERSPEKTIF FILOLOGIS DAN KESUSASTERAAN

Oleh:
Drs. Mohamad Damami, MA

Agar lebih jelas alur uraian dan model analisis yang akan dikembangkan dalam makalah ini, penulis merasa perlu menegaskan lebih dahulu titik pijak yang dipakai tatkala menghadapi konsep-konsep kunci yang ada dalam judul makalah di atas yang meliputi konsep "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa", "perspektif filologis" dan perspektif kesusasteraan".[1)]

Terlepas dari penyamaan istilah "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dengan nama "Aliran Kebatinan" dan "Aliran Kepercayaan",[2)] atau dengan nama "kebatinan", "kejiwaan" dan "Kerohanian",[3)] menurut Romdon, secara umum apa yang disebut "kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" pada hakekatnya adalah mistik.[4)] orang boleh saja memperdebatkan pernyataan ini. Namun harus pula diingat secara seksama bahwa tampilan dalam praktek kehidupan nyata, entah itu tampil dalam wujud gerakan dalam batas pranata sosial,[5)] maupun dalam tampilan lembaga sosial,[6)] nuansa mistik sangat nampak kelihatan.

Kalau boleh disederhanakan,[7)] sifat mistik dari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bisa bersifat mistik-magis[8)] dan bisa pula bersifat mistik –moralis.[9)] Menurut Niels Mulder, mistik-mistik adalah dampak dari proses-proses populisasi dari mistik-moralis.[10)] Barangkali hal itu patut dimaklumi, karena dalam proses-proses populisasi itu mesti ada kendala-kendala, minimalnya antara lain: (1) komposisi penduduk; (2) kondisi baca-tulis dan pengetahuan penduduk; dan (3) primordialisme struktur sosial (khususnya di Jawa). Dalam hal komposisi penduduk, menurut catatan dikatakan bahwa

sekitar 80% an dari penduduk di Indonesia bermukim di desa (dan tentu saja kebanyakan berpenghasilan dalam dunia pertanian).[11] Karena alam pertanian yang melingkungi masyarakat di pedesaan, maka mental alam petani (dalam arti yang masih sederhana) sudah tentu sangat berpengaruh yang antara lain adanya kesukaan terhadap hal-hal yang bersifat animistik dan dinamistik. Sifat animistik dan dinamistik ini tatkala masuk ke dalam sistem ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tertentu, telah termodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat diterima secara "rasional" dalam masyarakat yang bernuansa perkotaan,[12] walaupun dalam kasus –kasus tertentu mungkin dapat disebut sebagai pemelencengan, seperti jenis ekspresi black magic, misalnya.[13]

Selanjutnya, dalam hal kondisi baca-tulis dan pengetahuan penduduk barangkali dapat dimaklumi kalau ada yang menyatakan bahwa kebanyakan penduduk di Indonesia pada pasca kemerdekaan (sampai dengan tahun 1960-an) masih banyak yang buta aksara dan angka serta pengetahuan dasar. Hal ini jelas menyulitkan untuk dapat diterimanya mistik-moralis secara relatif utuh dan "benar". Karena, proses pengenalan dan penyebaran mistik-moralis tersebut terpaksa harus memakai teknik berbicara-mendengar (oral dan gethok-tular) jauh lebih besar daripada teknik menulis-membaca (literal) . Tentu saja harus diakui, kondisi ini akan berbeda sejajar dengan kemajuan pendidikan masyarakat pada masa akhir-akhir ini.

Kendala yang tidak kurang seriusnya adalah kendala karena primordialisme struktur sosial (khususnya di Jawa). Primordialisme ini antara lain diwujudkan dengan konsep "negara desa", "ningrat-wong cilik", "paternalistik" dan sebagainya. Hal ini menyebabkan apapun yang berasal dari "kota", "kaum priyayi", "wong kang kanugrahan ngelmu" (orang yang mendapat karunia "Ilmu Tasawuf") dan sebagainya dianggap masyarakat banyak (sekali lagi ini untuk masa lalu kebanyakan) sebagai hal yang mesti diikuti begitu saja, sebab hal itu datang dari pihak yang dianggap kredibel dan memiliki

otoritas kebenaran. Sekali lagi, tentu untuk masa akhir-akhir ini primordialisme seperti itu sudah mengalami kemerosotan tajam, walaupun sisa-sisanya secara sosiologis masih terasa juga.[14)]

Berdasarkan uraian di atas, berkaitan dengan konsep "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa", penulis membatasi dalam lingkup: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks sebagai mistik-moralis,[15)] sebab jenis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti inilah yang nampaknya sekarang masih bertahan dari pertarungan kecanggihan konsep sebagaimana terjadi dewasa ini.[16)]

Konsep kedua yang perlu penulis tegasi dalam makalah ini adalah "perspektif filologis". Sebagai orang yang tidak berkecimpung secara intensif dalam disiplin Filologi, tidaklah arif kalau penulis berangkat dari penjelajahan hasil kerja filologis yang penulis lakukan sendiri lalu menggambarkan hal-hal yang menyangkut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks mistik-moralis di atas. Disini, penulis sekedar akan menguraikan secara global akan kemungkinan-kemungkinan keniscayaan perlunya penelitian secara otentik terhadap naskah-naskah sastra di Indonesia, khususnya di Jawa, secara lengkap-berurutan waktu, tanpa terpenggal-penggal dari satu periode ke periode berikutnya. Tentu saja untuk itu akan diberi contoh-contoh hasil-hasil penelitian filologis yang pernah dilaksanakan.

Konsep ketiga yang perlu penulis batasi adalah "perspektif kesusasteraan". Untuk ini penulis akan mencoba menganalisis arus kesusasteraan yang mengaliri tubuh dunia kesusasteran di Indonesia dalam konteks Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menjurus ke arah spesifikasi mistik moralisnya. Dalam batas-batas tertentu akan dicoba diberikan beberapa contoh.

II

Seperti telah ditegaskan di atas, bahwa ruang lingkup yang akan dibahas yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa dalam makalah ini adalah dalam konteks mistik-moralis. Pertanyaannya adalah bagian apa dalam khasanah naskah sastra yang dapat dikaitkan dengan masalah tersebut. Untuk itu tentu saja orang harus mengidentifikasi terlebih dahulu secara lebih rinci mengenai istilah "mistik-moralis" ini. [17)]

Pertama-pertama harus disadari bahwa mistik-moralis yang menjadi muatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di atas lebih banyak terfokus pada/di masyarakat Jawa dengan alasan bahwa pada hakekatnya muatan isi ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (yang dalam kenyataannya 45% dari jumlah keseluruhan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada di Pulau Jawa) adalah perwujudan dari ngelmu kejawen, yaitu percampuran unsur Islam dengan kompleks ajaran dan konsep Hindu dan Budha yang cenderung ke arah mistik.[18)]

Sungguhpun begitu, menurut penulis, tesis DR. Simuh yang menyatakan bahwa mistik Islam Kejawen (sebagai penamaan lain dari DR. Simuh tentang ngelmu Kejawen) pada hakekatnya adalah ajaran tasawuf (sebagai salah satu unsur Islam) yang dipahami dan dirumuskan secara "Kejawen", atau paling tidak dijiwai oleh tasawuf Islam.[19)]

Dengan demikian percampuran unsur Islam dengan kompleks ajaran dan konsep Hindu dan Budha di atas akan memperlihatkan survival unsur Islamnya (yaitu unsur tasawuf) dalam proses-proses pencampuran itu. Pernyataan terakhir inilah yang menjadi batu pijak penulis untuk melihat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari perspektif filologi ini. Sementara itu, tidak berlebihan kiranya kalau penulis mengatakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang kebetulan bukan berbasis pada/di masyarakat Jawa format isinya dapat disebut mirip/sama walaupun tentu saja wajar bila berbeda dalam pemakaian nama, kata kunci, istilah dan konsepnya yang disebabkan berada pemakaian bahasanya.

Sekarang masuk ke dalam persoalan "mistik-moralis", apa yang dimaksud wujud konkritnya. Menurut penulis, istilah tersebut berarti mistik yang tujuannya antara lain menghasilkan prinsip-prinsip etika.[20] Oleh sebab itu khazanah sastra yang akan dijadikan orientasi pembahasan adalah yang bertema prinsip-prinsip etika.

Untuk masuk ke pembahasan dari perspektif filologis ini penulis akan mencoba berangkat dari hasil penelitian DR. Simuh dalam desertasinya, **Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita, Suatu Studi terhadap Serat Wirid Hidayat Jati.** Dalam disertai ini ditemukan bukti bahwa ada hubungan langsung antara sastra Jawa (dalam hal ini Serat Wirid Hidayat Jati) yang bermuatan mistik Islam Kejawen dengan sastra mistik dari Gujarat (kitab Al-Tuhfat al-Mursalah ila Ruh al-Naby karangan Muhamad Ibn Fadillah) lewat tangan Abdurrauf Singkel yang kemudian disebarkan muridnya di Jawa dari Priangan yang bernama Abdul Muhyi. Tokoh terakhir ini adalah pembina tarekat Syatariyah yang pengaruhnya sampai Cirebon hingga Tegal. Di Tegal kitab Al-Tuhfat tersebut digubah dalam bentuk sekar macapat pada sekitar tahun 1680. Ajaran dalam kitab tersebut kemudian dikenal dengan sebutan "martabat tujuh".[21] Paham "martabat tujuh" ini lalu tersebar di pesantren-pesantren (antara lain pesantren Tegalsari, Ponorogo, dengan pengasuh pondok bernama Kyai Imam Besari, menantu Paku Buana IV (1788-1820) dan akhirnya merembes ke dalam khasanah sastra Jawa di Surakarta (lewat pujangga Ranggawarsita yang pernah nyantri di pondok pesantren Tegalsari tersebut).[22] Isi dari naskah Serat Wirid Hidayat Jati antara lain berisi ajaran budi luhur.[23]

Dengan memperhatikan salah satu contoh penelitian yang tergolong filologis ini, maka nampak jelas jalinan sastra dari Sumatera (Abdurrauf Singkel) sampai sastra di Jawa (Ranggawarsita). Ini dapat diartikan bahwa barangkali perlu penelitian terhadap khasanah naskah sastra yang mungkin bersambungan antara naskah sastra di Sumatera dengan di Jawa. Hasil penelitian DR. Simuh membuktikan adanya

alur resepsi sastra dari sastra di Sumatera yang bernuansa Islam ke dalam khazanah sastra keraton di Jawa. Ini tidak menolak kemungkinan, bahwa masih banyak (walaupun tidak diketahui persis jumlah yang pasti berapa banyaknya) naskah-naskah yang serupa dengan kitab Al-Tuhfat dengan Serat Wirid Hidayat Jati.

Di sini akan diberi contoh beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan para ahli yang menyangkut isi sastra Melayu (Sumatra) yang bernuansa agama dan mistik dan juga sastra Jawa tentang piwulang dan budi luhur.

V.I. Braginsky, misalnya, secara konprehensif telah menulis tentang sejarah sastra Melayu dan sekaligus mengajukan teori tentang wacana sastra Melayu itu berdasar metode filologi yang dia kembangkan. Dalam bukunya yang berjudul Yang Indah, Berfaedah dan Kamal, Sejarah Sastra Melayu dalam abad 7-19, Braginsky mengatakan bahwa secara kesuluruhan sastra Melayu itu mengandung misi tertentu secara gradatif, mulai dari untuk "fungsi penghibur/penglipur" menaik ke arah "fungsi faedah" dan berakhir pada " Fungsi penyempurnaan rohani".[24)] Yang dimaksud dengan "fungsi penghibur/penglipur" adalah memang sastra yang dikarang itu untuk menghibur para pembacanya, yaitu membawa pembaca dari kesusahan dan kepedihan dunia ke alam rekaan yang ajaib dan indah. Sedangkan "fungsi faedah" dimaksudkan untuk memberi nasehat kepada para pembacanya tentang tingkah laku di dunia yang dari sudut pandang Islam adalah benar.[25)] Sementara itu maksud dari"fungsi penyempurnaan rohani" adalah bahwa dengan karya sastra itu pembacanya diharapkan dapat memperoleh pengajaran yang bersifat rohaniah seperti pesan-pesan yang terkandung dalam teks kewahyuan. [26)] Barangkali misi inilah nanti yang dapat mencuat sampai pembahasan mistik-moralis seperti yang berkali-kali telah disinggung di atas. Untuk memperkokoh kesimpulan-kesimpulan di atas, Braginsky menawarkan metode filologi baru yaitu dengan tugas meneliti kestabilan dan variasi dalam teks-teks, yaitu transformasi teks-teks

disepanjang waktu. Di sini akan dicari kepastian variasi, jenis variasi, faktor penyebab adanya variasi dan bagaimana kadar variasi itu. Disamping itu ahli filologi juga harus sanggup membedakan unit-unit maknawi (dari teks) yang relatif stabil sebegitu rupa sehingga biarpun unit itu bersinggungan dengan proses bervariasi namum akan tetap menjamin identitas karya sastra pada dirinya sendiri. [27]

Dengan memperhatikan tawaran Braginsky di atas, maka andaikata dalam karya sastra Jawa mulai Jawa kuno, Tengahan dan jaman Islam serta Surakarta (ini menurut pembagian periode yang dilakukan oleh R.M. Ng. Poerbatjaraka),[28] dapat distrukturkan sebagaimana strukturisasi sastra Melayu yang di lakukan Braginsky di atas, maka akan semakin jelas bahwa misi apa sebenarnya yang menjadi maksud penulisan karya sastra yang begitu panjang waktunya: adakah misi yang stabil yang berlangsung secara terus-menerus di dalamnya? Sudah tentu penelitian semacam itu harus lurus dengan tawaran metodologi dari filologi yang diajukan oleh Braginsky.

Seperti diketahui, paham "martabat tujuh" yang diresepsi dalam Serat Wirid Hidayat Jati semula adalah modifikasi dari paham Muhyi al-Din ibn 'Arabi atau disingkat Ibn 'Arabi saja. Sungguhpun begitu, paham Al-Ghazali (misalnya tentang nafsu amarah, lawwamah dan mutmainah) juga sangat mewarnai naskah-naskah Jawa, khususnya dalam karya suluk. Dalam tradisi sastra Melayu paham Al-Ghazali ini ditulis oleh Syaikh "Abd al-Samad al-Palimbani, seorang ulama Palembang pada abad ke-18. Hal ini telah diteliti (dalam bentuk karya disertasi) oleh DR.M. Chatib Quzwain dengan mengambil dua karya tulisnya, yaitu Sairu al-Salikin dan Hidayat al-Salikin. Lewat kedua buku itulah dia menstrukturkan mistik model Al-Ghazali menurut versi Syaikh 'Abd al-Samad al-Palimbani.[29] Siapa tahu efektifnya saling meresepsi dalam dunia sastra antara sastra Melayu dengan sastra Jawa, dalam bidang mistik-moralis tentu saja, jauh lebih kuat daripada media lain (media keputusan politik misalnya).

Idealnya, kalau kerja filologis dapat menstrukturkan khasanah sastra gabungan antara sastra Melayu dengan Jawa secara lengkap dan berurutan, maka akan lebih nampak corak mistik-moralis yang termuat dalam misi sastra gabungan tersebut sepanjang kesejarahannya. Yang terang, mungkin masih dilakukan kerja filologis secara sinkronik, sehingga sangat mungkin ada bagian yang terbengkelai, walaupun beberapa diantaranya telah diteliti.

Untuk contoh penelitian tentang piwulang, khususnya untuk khasanah sastra Jawa, telah dilakukan pula, antara lain oleh DR. Alexander Sudewa yang mengambil naskah Serat Panitisastra. (1991).[30] Dalam hal ajaran budi luhur seperti yang disusun oleh RS Tedjopremono dan B.R.M. Sindu Sidharta, [31] atau yang dihimpun oleh Hardiyanti Rukmana.[32] Ternyata kedua buku tersebut isi mengambil dari kata-kata mutiara dari beberapa naskah jaman Surakarta. Contoh pengungkapan budi luhur itu seperti berikut: "***Aja rumangsa bener dhewe, jalaran ing donya iki ora ana sing bener dhewe***" (jangan merasa serba benar sendiri, sebab di dunia ini tidak ada orang benar satu-satunya),[33] Kahanan donya ora langgeng, mula aja ngegungake kesugihan lan drajatira, awit samangsa ana wolak-waliking jaman ora ngisin-isini" (keadaan dunia ini tidak abadi, oleh karena itu jangan mengagung-agungkan kekayaan dan derajatmu, sebab bila sewaktu-waktu terjadi perubahan keadaan, tidak akan menderita aib).[34]

Dengan memperhatikan uraian menyeluruh diatas, maka Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam konteks sebagai mistik-moralis, dapat dilacak akar-akarnya ke dalam khazanah sastra, baik itu dari sastra Melayu, Jawa atau gabungan keduanya. Sungguhpun demikian, perlu diteliti secara menyeluruh seluruh singgungan karya sastra tersebut secara resepsi-diakronis sehingga diketahui misi yang stabil dipertahankan dalam khazanah sastra tersebut. Barangkali itulah yang laten bertahan, utamanya menyangkut ajaran mistik-moralis yang secara khas dipertahankan oleh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

III

Dalam memasuki pembahasan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari perspektif kesusasteraan maka pertama-tama harus disadari bahwa dalam kesusasteraan Indonesia itu minimal ada tiga arus kesusasteraan yang berkembang, yaitu: (1) sastra Melayu; (2) sastra Jawa; dan (3) sastra pesantren. Ketiga arus sastra itu saling berinteraksi secara dinamis.

Sastra Melayu, sebagaimana diketahui sangat berwarna Islam dan berpusat di keraton. Oleh karena itu sastra Melayu mampu menjadi tradisi besar bagi kawasan-kawasan yang menjadi jangkauannya, baik jangkauan sebab dikuasai secara politik (ditaklukkan dan sebagainya) maupun jangkauan sebab dikuasai lewat hubungan niaga. Inilah sebabnya sastra Melayu berhasil menjadi bahasa Melayu menjadi lingua franca (bahasa pergaulan melampaui batas etnis). Barangkali dapat dikatakan, bahwa berkat lingua franca itulah Kepulauan Nusantara dapat bersatu dan disatukan.

Sastra Jawa juga merupakan tradisi besar bagi kebudayaan Jawa, terutama kebudayaan spiritualnya, yang antara lain karena suburnya kehidupan sastra Jawa yang juga karena dibina oleh pihak istana, baik itu sejak jaman Hindu maupun jaman Islam (sampai dengan zaman Surakarta).[35)] Penulis melihat, tradisi oral, khususnya dalam mempopulerkan kebudayaan spiritual lewat pembacaan tembang macapat di desa-desa dalam forum-forum upacara adat di kalangan masyarakat Jawa pada permulaan abad ke- 20 (barangkali sampai saat ini), sangatlah positif. Hal ini memungkinkan teresapnya dengan baik ajaran-ajaran yang termuat dalam sastra Jawa menguat di dalam akar rumput (grass root). Penulis memperkirakan, proses-proses peresapan ajaran-ajaran sastra jawa lewat kegiatan upacara adat ini justru memperkuat dugaan bahwa kemunculan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan ini.[36)] sebailknya ada pertanyaan, apakah sastra spiritual yang bermunculan di kalangan penghayat kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa dewasa ini mampu menjadi acuan mulai dari kelompok masyarakat menengah ke atas dan masyarakat akar rumput yang seimbang dengan pesona sastra Jawa modern atau sastra Indonesia modern pada umumnya?

Kemudian, sastra pesantren, seperti namanya, adalah sastra yang memang dikembangkan secara spesifik di pesantren-pesantren. Biasanya sastra ini bergerak dalam bentuk ajaran (sastra kitab), terkenal dengan sebutan kitab kuning.[37)] dalam sastra pesantren ini, karena kebanyakan berupa ajaran, maka ragamnya menjadi tidak dapat berkembang, apalagi ada kecenderungan ada kemungkinan pelarangan karya sastra secara hukum fiqih (karena bertentangan dengan syari'at, misalnya).

Sastra Melayu, sastra Jawa pra-modern dan sastra pesantren di atas, menurut penulis, merupakan penyumbang konsep mistik-moralis yang menjadi muatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun, memang harus diakui bahwa interaksi sastra pesantren dengan sastra Jawa nampaknya kurang begitu intensif, terutama dalam hal kepekaan saling meresepsi antara keduanya. Lain sekali antara sastra pesantren dengan sastra Melayu yang memang keraton di Sumatera rata-rata adalah keraton yang jelas-jelas memeluk agama Islam secara aktif. Oleh sebab itu interaksi antara sastra pesantren dengan sastra Melayu menjadi relatif lebih lancar. Ini dapat dibuktikan dengan adanya karya sastra Abdurrauf Singkel, Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Raniry, Syaikh 'Abdus-Samad al-Palimbani dan sebagainya. Lain halnya dengan sastra Jawa dengan sastra pesantren, interaksi antara keduanya nampak seret dan kurang alamiah. Dinding tembok sastra Jawa masih terlalu kokoh di depan sastra pesantren, sebaliknya halaman sastra pesantren di mata sastra Jawa masih nampak asing. Maka kesannya terjadi saling membuat jarak antara satu dengan lainnya. Justru sastra Jawa lebih elegen saling menyapa dengan karya sastra Melayu sekalipun isinya sering sepenuhnya sangat Islami (penuh dengan konsep tasawuf Islam

misalnya). Disertasi DR. Simuh membuktikan hal itu. Barangkali kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat mengambil keuntungan dari kenyataan terakhir ini.
Wallahu a'lam bi al-sawab.

CATATAN

1) Secara akademik penulis harus jujur mengatakan bahwa penulis bukan ahli filologi (apalagi filolog) dan bukan pula ahli sastra (apabila sebagai sastrawan). Kalaulah boleh disebut, penulis baru dalam proses menekuni apa yang disebut "studi agama-agama".
2) H. Ridin Sofwan, Menguak seluk beluk kebatinan (Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) (Semarang: Penerbit Aneka Ilmu, 1999), hlm. 1.
3) Dalam hal ini baca: Rahmat Subagya, Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan dan Agama (Yogyakarta : Penerbitan Yayasan Kanisius, 1976), hlm. 43-44; Rahmat Subagya, Agama Asli Indonesia (Jakarta : Sinar Harapan & Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981), hlm. 255-256
4) Romdon, Tashawwuf dan Aliran Kebatinan, Perbandingan Antara Aspek-aspek Mistikisme Islam dengan aspek-aspek Mistikisme Jawa (Yogyakarta; Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 1993, hlm. 77; lihat juga Simuh, Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996). Kiranya perlu dikomentari tentang istilah "mistik" itu sendiri secara umum. Menurut Y.A. Surahardjo, mistik atau mistisisme yang bersifat religius adalah "......pandangan atau sikap hidup yang mencakup segala sesuatu .....yang berhubungan dengan adanya penghayatan kemanunggalan dengan 'the ultimate truth'......"; lihat: Y.A. Surahardjo, Mistisisme,

Suatu Introduksi di dalam Usaha Memahami Gejala Mistik Termasuk yang ada di Indonesia (Jakarta : P.T. Pradnya Paramita, 1983), hlm. 12.

Apa yang disebut "segala sesuatu" dan "the ultimate Truth" dalam definisi tentang "mistik" di atas perlu diklarifikasi lebih lanjut. Menurut Y.A Suhardjo, yang dimaksud "segala sesuatu" di sana dapat ditafsirkan luas sekali, yaitu antara lain dalam arti " adanya usaha", sebagai jalan untuk mengetahui ", "sebagai kondisi kesadaran", atau "sebagai pengetahuan yang diperoleh lewat penghayatan mistik": lihat Y.A Surahardjo, ibid. Sedangkan arti dari "the ultimate Truth" bisa dimaknakan bermacam-macam berdasarkan titik pandang tertentu. Kalangan agama Semit memberi nama lain "Tuhan" kalangan Hinduisme menamakan "Brahman", kalangan Buddhisme menamakan "Nirwana = void = kehampaan =kasunyatan", kalangan Taoisme menamakan "Tao", dan kalangan filosuf, antara lain Plotinus, menamakan "To Hen". Dalam semua istilah ini terkandung maksud adanya "kebenaran sejati yang abadi" yang untuk mencapainya tidak cukup lewat dengan gejala pengetahuan (knowing = cognition), melainkan perlu adanya keterlibatan subyek secara utuh dalam keseluruhan eksistensinya sehingga terjadi transformasi dan transendensi terhadap "kebenaran sejati yang abadi" itu; lihat: Y.A. Surahardjo, ibid.

Dalam Islam, "mistik" ini barangkali penanaman lain dari istilah "tasawuf". Definisi populer "tasawuf" adalah: ".....kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan dengan mengasingkan diri dan berkontemplasi"; lihat: Harun Nasution, Falsafah & Mistisisme dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 56

5) Istilah "pranata sosial" dikutip dari pendapat Koentjaraningrat yang dikutip oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan sebagai

berikut: "....pranata sosial adalah suatu sistim tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas (sic) untuk memahami kompleks-kompleks (sic!) kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut, terutama menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma-norma (sic." Lihat: Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1972), hlm. 58, lihat juga: Koentjoroningrat, Pengantar Antropologi (Djakarta: Penerbit Universitas, 1965), hlm. 113. Berbijak dari definisi ini, maka bentuk-bentuk gerakan seperpengajian, kebaktian, upacara agama dan juga sikap dan kelakuan yang menampak dalam kehidupan masyarakat nyata dapat disebut pranata sosial. Oleh sebab itu, karena gerakan, sikap dan kelakuan para "penghayat" Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menampakkan nuansa ekspresi mistik, maka penulis berani menyebut tampilan mistik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dimasukkan sebagai pranata sosial.

6) Istilah "lembaga sosial" penulis kaitkan dengan istilah yang dikemukakan Soerjono Soekanto yang disebutkan" lembaga kemasyarakatan". Menurut Soerdjono Soekanto, dasar otentik dari istilah "lembaga kemasyarakatan" adalah adanya Soziale-Gebilde (gabungan sosial) yang di dalamnya terdapat norma dan peraturan yang khas yang memiliki daya ikat sehingga memunculkan wujud hubungan yang boleh disebut sebagai association. Lihat: Soerjono Soekanto, op.cit. hlm. 58, 59. Dari pengertian ini, sekarang kalau ada sebutan "organisasi" Pangestu, Sumarah, Subud dan sebagainya, maka hal itu, menurut penulis, boleh disebut sebagai ekspresi mistik dalam tampilan lembaga sosial..

7) Barangkali dalam kerja ilmiah orang tidak dapat menghindarkan diri dari kemungkinan-kemungkinan melakukan reduksi dan simplifikasi dan hal ini dari sudut metodologi tidak salah.

8) Lihat : Niels Mulder, Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1983), hlm. 1,3

9) Arti mistik-moralis di sini adalah mistik yang tujuannya antara lain yang dapat menghasilkan prinsip-prinsip etika, yang dalam bahasa Jawa di sebut pituduh dan wewaler. Pituduh adalah "anjuran-anjuran perbuatan baik", sedangkan wewaler berarti : larangan-larangan melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang mengotori jiwa manusia" Lihat; Romdon, op. Cit., hlm. 181.

10) Menurut Niels Mulder, sifat magis yang terbawa masuk ke dalam mistik jawa, lama-lama ada yang melenceng menjadi bersifat black magic, yang secara kebetulan hal ini berlangsung bersamaan dengan kemelut politik di seputar tahun 1960-an tatkala PKI mulai melakukan infiltrasi ke dalam mistik Jawa itu. Lihat : Niels Mulder, op. Cit., hlm. 3,6,7. Mistik Jawa dicap, pada waktu itu, sebagai hal yang mirip dengan klenik dalam konotasi negatif (black magic). Penjernihan istilah klenik (kelenik), dalam arti untuk pengertian yang positif, telah ditulis oleh Prof. Kamil Kartapradja dalam: Kamil Kartapradja, Sedjarah Kelenik & Perkembangannya (Djakarta: Fak. Ushuluddin IAIN Sjarif Hidajatullah, 1972), hlm.19.

11) Sebagai sampel, dicatatkan oleh Rachmat Subagyo bahwa sampai tahun 1971, jumlah penduduk Indonesia yang bermukim di pedesaan sekitar 82,71%. Sedangkan jumlah desa pada waktu itu tidak kurang dari 60.285 buah; lihat: Rachmat Subagya, Agama Asli ....., op. Cit.

12) Niels Mulder, op.cit., hlm 3,4 Bahkan Clifford Geertz, seperti dikutip oleh Niels Mulder, berani menyimpulkan bahwa gejala mistik yang seperti itu seolah-olah merupakan "... sistem religius yang dirancang bagi seorang petani yang datang di kota" ; lihat: Niels Mulder, ibid, hlm.4.

13) Lihat catatan nomor 10

14) Contohnya adalah masalah kharisma. Dewasa ini masalah kharisma masih menjadi perbincangan luas, apalagi kalau dikaitkan dengan kepemimpinan politik yang masih masuk dalam wacana "pendidikan politik" seperti sekarang ini. Kritisisme nampaknya belum masuk sebagai wacana "nilai budaya nasional". Sungguhpun begitu, dengan adanya keniscayaan globalisasi dalam millenium ketiga nanti, sisa-sisa primordialisme seperti itu akan dengan sendirinya surut ke belakang dan kritisisme akan menguat dalam arti kadar sewajarnya.

15) Lihat catatan nomor 9

16) Sebagai perbandingan kondisi dapat dicontohkan apa yang ditulis oleh John Naisbitt dan Patricia Aburdene dalam salah satu artikelnya yang berjudul "Spiritualitas, Ya. Agama Terorganisasi, Tidak." Dalam bukunya yang berjudul Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1999-an, Megatrends 2000. Dalam artikel itu dinyatakan bahwa sebagian masyarakat Amerika tidak masuk ke gereja, tetapi mereka merasa kadang-kadang perlu berdoa yang dapat memuaskan rasa spiritualitas mereka. Religius, menurut pengertian masyarakat Amerika, masih dikaitkan dengan keaktifan dalam hal "Agama Terorganisasi" (melakukan aktifitas ritual yang rutin), sedangkan "Spiritual" bisa di luar format itu. Lihat: John Naisbitt dan Patricia Aburdene, Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990-an, Megatrends 2000. Penerjemah: Drs. FX Budijanto (Jakarta: Binarupa Aksara, 1990), hlm. 258, 259.

17) Lihat juga catatan nomor 9.

18) H. Ridin Sofwan, op. Cit., hlm. 15; lihat juga: Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 312.

19) Simuh, Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita, Suatu Studi terhadap Serat Wirid Hidayat Jati (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988), hlm. 373-374.

20) Lihat catatan nomor 9

21) Simuh, Mistik Islam.....,op. Cit., hlm. 307, 308; lihat pula: A.H. Johns, The Gift Addressed to the Spirit of the prophet (Canberra: The Australian National University, 1965), hlm. 224.

22) Simuh, Mistik Islam......, op. Cit., hlm. 38, 40

23) Ibid, hlm. 342-347

24) V.I. Braginsky, Yang Indah, Berfaedah dan kamal, Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7-19. Penerjemah: Hersri Setiawan (Jakarta: Indonesia- Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1998), hlm. XXVIII, XXIX

25) Ibid., hlm. XXVIII

26) Ibid., hlm. XXIX

27) Ibid., hlm. XXX

28) R.M. Ng. Poerbatjaraka, Kapustakaan Djawi (Djakarta: Penerbit Djambatan, 1952), hlm. 169-171.

29) M. Chatib Quzwain, Mengenal Allah, Suatu Studi Mengenai Ajaran Tasawuf Syaikh ' Abdus-Samad Al-Palimbani (Jakarta: "Bulan Bintang) hlm. 153.

30) Alexander Sudewa, Serat Panitisastra, Tradisi, Resepsi dan Transformasi (Yogyakarta: Duta Wacana University press, 1991) hlm. 346.

31) RS Tedjopremono B.R.M. Sindu Sidharta, Studi Kepustakaan Tentang Himpunan Pitutur Luhur (Naskah I) (Jakarta: Direktorat Binyat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Depdikbud RI, 1980). Juga: (Anonim). Studi Kepustakaan Tentang Memahami Kumpulan Piwulang Luhur (naskah II) (Jakarta: Direktorat Binyat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Depdikbud RI, 1980).

32) Hardiyanti Rukmana, Butir-butir Budaya Jawa (t.t) : (t..p), 1986.

33) RS. Tedjopremono & B.R.M. Sindu Sidharta, Studi Kepustakaan Tentang Himpunan……., op.cit., hlm. 37.

34) Hardiyanti Rukmana, op. Cit., hlm. 25

35) Sebagai acuan, misalnya, lihat catatan nomor 28

36) Orang Jawa yang ahli menekuni sastra Jawa pada abad ke-19 memang sudah ada, namun dapat dipastikan belum banyak, bahkan sangat langka. Sementara itu ada tanda jelas bahwa kemunculan aliran-aliran dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baru pada permulaan abad ke-20 dan menghebat setelah menjelang dan pasca kemerdekaan (Mr. Wongsonegoro sebagai tokoh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tercatat telah memperdebatkan masalah "Kebatinan" pada waktu penyusunan draft UUD 1945).

37) DR. Martin Van Bruinessen telah melakukan penelitian dalam masalah ini, khususnya yang ada kaitannya dengan tarekat (Kelembagaan dalam tasawuf). Lihat: Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-tradisi Islam di Indonesia (Bandung: Penerbit Mizan), hlm. 382.

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DALAM PERSPEKTIF FILOLOGIS DAN KESUSASTERAAN

(makalah bahasan)

Oleh:
Prof. Dr. H. Moh. Ardani

I

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memerlukan penghayatan emperik yang menggejala dalam perilaku sembah dan budi luhur, sebagai wujud pancaran dari budaya spiritual. Dalam hubungan ini maka semua orang yang percaya kepada Tuhan/Yang Maha Ghaib, baik yang masih berfaham animisme, dinamisme, politheisme, hinotheisme maupun monotheisme, akan menampilkan diri berbagai warna budaya spiritual sembah dan budi luhurnya.

Jika faham-faham tersebut dikelompokkan menjadi dua golongan agama dan kebatinan, maka keduanya mempunyai persamaan di samping perbedaan. Persamaan keduanya melakukan sembah dan budi luhur sedangkan perbedaannya, agamawan menekankan sembah, orang kebatinan menekankan budi luhur; atau dengan kata lain para agamawan mendahulukan budi luhur dan mengemudikan sembah, begitulah pendapat Mr. Wongsonegoro.

Mengamati perkembangan modern pada masa kini tampaknya budaya spiritual yang lebih terfokus kepada mistik moralis dipandang lebih eksis, tetap dapat bertahan dalam pergumulan kehidupan modern, karena ia mengacu kepada hakekat wujud manusia. Mistik moralis ini dapat diberi makna yang lebih luas, apabila kita meneliti lebih mendalam karya naskah dan buku para sufi besar, paling tidak dapat dibedakan dua corak tasawuf: tasawuf akhalaki sunni dan tasawuf falsafi non-Sunni.

Substansi tasawuf ialah kedekatan manusia dengan Allah, Tuhan YME, kesucian diri dan ketentraman hidup. Namun dalam peng-

amalan tasawufnya sufi akhlaki lebih menitik beratkan akhlak kepada Tuhan dan akhlak kepada sesama makhluk atas dasar teks kitab suci dengan interpretasi yang dekat. Adapun sufi falsafi di samping mengamalkan akhlak tersebut, ingin melaju lebih jauh menyatu dan manunggal dengan Tuhan. Dengan kata lain, sufi akhlaki menjalani maqmat dan ahwal sebatas makrifah, sedangkan sufi falsafah ingin berlanjut ke fana dan baqa, ittihad, hulul dan wahdah al-wujud (kesatuan wujud), dengan interpretasi bebas/luas.

II

Dalam sejarah, mula-mula tasawuf mengambil bentuk zuhud dalam arti sikap hidup menjauhi kemewahan duniawi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian ia juga digunakan untuk memperhalus budi pekerti dan sopan santun dalam hubungannya dengan Tuhan dan juga dengan sesama manusia. Namun demikian perkembangan tasawuf selanjutnya memperlihatkan bahwa ia bukan hanya untuk memperhalus budi pekerti, melainkan juga merupakan pandangan hidup yang disistematisir berdasarkan pemikiran filosofis. Tasawuf akhlaki dimaksudkan untuk memperhalus dan menyempurnakan pelaksanaan syari'at yang biasanya dijalankan dengan ketat dan kaku, sehingga menjadi lebih halus mendalam dan bermakna. Lain halnya tasawuf falsafi. Tasawuf ini bukan saja bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sedekat-dekatnya, tetapi juga untuk bersatu dengan Tuhan. Apabila tahapan ini tercapai maka manusia merasa berada dalam keabadian Tuhan, Tak ada apapun yang lain selain Tuhan. Tasawuf akhlaki banyak dikembangkan golongan Sunni terutama Al-Thusi, Al-Qusyairi dan Al-Ghazali, sedangkan tasawuf falsafi dikembangkan golongan non Sunni terutama Ibnu Al-'Arabi, Al-Jili, Al-Burhanpuri dan Ranggawarsita.

Perkembangan dua corak tasawuf tersebut memperlihatkan wujudnya di Indonesia sejak abad 16. Tasawuf Sunni itu sudah menjadi anutan Abd al-Rauf Singkel dan Al-Raniri di Aceh, Sumatera

Utara, Wali Songo di Jawa; sedangkan tasawuf falsafi yang non Sunni itu dianut oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Pasai di Aceh, Sumatra Utara dan Siti Jenar dan murid-muridnya di Jawa. Tampaknya kedua golongan itu saling bersaing untuk menjadikan aliran masing-masing sebagai anutan pemerintah pada waktu itu. Tidaklah mudah untuk mempertemukan kedua aliran itu. Pendekatan-pendekatan non politis telah dicoba diusahakan namun banyak mengalami kegagalan, sehingga tidak jarang ditempuh pendekatan secara politis.

Khusus di Jawa corak tasawuf Sunni banyak dianut umat Islam di pesisir, sedang tasawuf falsafi banyak dianut umat Islam pedalaman, lebih-lebih setelah Amangkurat I memusuhi para ulama Sunni lantaran ia pandang bakal membahayakan kekuasannya. Kedua corak tasawuf Sunni dan non Sunni itu tercermin di dalam berbagai literatur Jawa (Islam), suluk-suluk, serat-serat dan karya-karya sastra lainnya.

Adapun konsep budiluhur seperti suci hati dan perbuatan, jujur, dapat dipercaya, rajin bekerja, tabah, sabar, syukur, rela hati, tawakhil dan sifat-sifat utama lainnya tidak terdapat pertentangan dikalangan umat Islam, dalam hal pentingnya sifat tersebut untuk dimiliki. Demikian pula budi pekerti yang tercela lainnya tak ada pertentangan diantara mereka tentang keharusan mencegah dan menjauhinya. Dari semua golongan dan aliran tersebut sepakat untuk menghiasi diri dengan sifat terpuji dan menjauhkan diri dari sifat tercela.

Sembah dan Budi Luhur Mangkunegara IV

Adapun Konsep Sembah (Panembah) Mangkunegara IV, bukan saja mengandung arti ibadat badaniah lahiriah, melainkan juga mengandung makna yang bersifat batiniah filosofi dan mistis. Konsep Sembah (Panembah) ia kemukakan dalam berbagai karyanya tetapi yang terbanyak dan lebih terperinci terdapat dalam Serat Wedhatama. Setelah dijelaskannya secara tajam kemuliaan budi luhur dan kehinaan

budi yang jahat, maka selanjutnya ia jelaskan tentang sembah kepada Tuhan. Ia mengkaitkan budi luhur dengan sembah yang memperlihatkan hubungan timbal balik antara keduanya. Prinsip-prinsip sembah dimaksud tampak senapas dengan pengertian ibadat dalam Islam menurut konsep ahli Fiqih dan ahli Tasawuf.

Sembah, bagi Mangkunegara IV ada 4 macam, yang memperlihatkan sistematika yang beruntun, yaitu:

Sembah Raga : Menyembah Tuhan yang dilakukan seperti orang yang melakukan perjalanan, cara bersucinya dengan air (wudhlu), dilakukan secara fisik, lima kali dalam sehari semalam, dijalani dengan taat, tekun dan sabar, ditepati segala peraturannya menurut syari'at yang telah ditentukan.

Sembah Kalbu : Menyembah Tuhan yang dilakukan dengan mengutamakan peranan kalbu, yang karenanya tidak disucikan dengan air, tetapi dengan menyucikan hati dari sifat-sifat tercela, dan berbagai bujukan hawa nafsu dan dengan memperbanyak latihan spiritual, sehingga kalbunya dalam kondisi yang suci.

Sembah Jiwa : Menyembah Tuhan dengan mengutamakan rasa awas dan ingat selalu kepada-Nya, yang perlu dilakukan sehari-hari, yang disertai ketebalan iman dan keteguhan hati, memegang teguh niat dan tujuan, tidak mudah terpengaruh dan terkecoh apa saja yang terlihat dalam pengalaman rohaniahnya.

Sembah Rasa : Menyembah Tuhan dengan rasa yang ada di dalam inti jiwa atau inti ruh, sehingga terasalah hakekat kehidupan yang sebenarnya. Sembah ini dilakukan secara batiniah semata-mata dengan penghayatan inti jiwa yang paling dalam.

Konsep sembah Mangkunegara IV yang menekankan pentingnya aspek sembah lahiriah dalam bentuk sembah raga dan aspek

sembah batiniah dalam bentuk sembah kalbu, jiwa dan rasa, jika diperbandingkan dengan konsep ibadat lahiriah dan batiniah menurut Fiqih dan Tasawuf yang dilaksanakan secara terpadu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta teologi Asy'ari, sebagaimana yang difahami Al-Thusi, Al-Qusyairi, Al- Kalabadi, Al-Ghazali dan Ibn. 'Athaillah Al- Sukandari, adalah menunjukkan kesesuaian antara keduanya. Ini berarti empat macam sembah Mangkunegara IV itu sejalan dengan faham ulama sufi sunni tersebut, karena sama-sama mementingkan aspek syari'at yang bersifat lahiriah dan aspek perilaku yang bersifat batiniah. Sembah raga Mangkunegara IV yang harus diawali dengan bersuci, lalu dilakukan sembah secara fisik lima kali sehari semalam, adalah bersesuaian dengan aturan shalat fardlu lima waktu. Tentang sembah kalbu, jiwa dan rasa Mangkunegara IV yang harus dihayati secara batin, mulai dari penghayatan batin yang sederhana hingga sampai yang terdalam, atau penghayatan batin tingkat terendah hingga tingkat yang paling tinggi , adalah bersesuaian dengan pelaksanaan ibadah batiniah sufi yang dihayati dengan qalb (kalbu), ruh (jiwa) dan sirr (rasa atau inti jiwa), dari tingkat penyucian hati hingga makrifat atau musyahadah (menyaksikan atau melihat Tuhan dengan mata hati). Dalam pada itu empat sembah Mangkunegara IV adalah merupakan seperangkat sembah yang dapat dilaksanakan secara bertahap, tingkat demi tingkat menurut kemampuan dan kecenderungan masing-masing manusia, seperti halnya ajaran sufi sunni.

Lain halnya jika konsep sembah Mangkunegara IV itu diperbandingkan dengan paham al-ittihad Al-Bustami, al-hulul Al-Hallaj, wahdah al-wujud Ibn Al-'Arabi dan Al-Jili, dan martabat tujuh Al-Burhanpuri dan Ranggawarsita, ternyata tidak memperlihatkan kesesuaian antara keduanya kalau tidak dikatakan bertentangan. Perbedaan paham ini disebabkan karena perbedaan dasar pemikiran antara keduanya mengenai hakekat Tuhan dan hakekat manusia sebagai makhluk. Jika yang pertama menganut paham bahwa manusia selaku

makhluk Tuhan harus melakukan sembah kepada-Nya dengan penghayatan sedalam-dalamnya maka yang kedua menganut paham bahwa sekalian makhluk yang termasuk di dalamnya manusia adalah merupakan penampakan lahir (tajalli) Tuhan. Dengan demikian manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dengan hakekat zat Tuhan dan merupakan salah satu tempat bertajjali Tuhan.

Karena rapatnya hubungan antara Mangkunegara IV dengan Ranggawarsita, maka menimbulkan dugaan bahwa konsep empat sembahnya itu diambil dari pemikiran Ranggawarsita, seperti disyaratkan D. Rinkes dan Th. Pigeaud. Dugaan ini ternyata tidak tepat, karena Ranggawarsita memperlihatkan orientasi fahamnya kepada martabat tujuh yang bermuara pada faham wahdah al-wujud yang menjadi anutan ulama sufi non-sunni, sedangkan empat sembah Mangkunegara IV hanya sebatas sembah rasa atau sebatas makrifat, suatu pemikiran yang sejalan dengan paham ulama sufi sunni.

Adapun konsep budi luhur Mangkunegara IV yang menekankan pentingnya penerapan dan pengamalan perilaku utama dan menjahui perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari dengan jalan mengekang keinginan hawa nafsu, adalah sesuai dengan prinsip ajaran akhlak yang dianut umat Islam, baik yang beraliran sunni maupun yang beraliran non-sunni.

III

Dari segi filologis dan kesusasteraan, kita dapat menyaksikan betapa banyak literatur sufisme, berupa naskah-naskah buku yang sudah diterbitkan, baik yang ditulis dalam bentuk puisi/syair, prosa maupun campuran puisi dan prosa. Sebahagian besar dalam bahasa Arab dan sebahagian lagi dalam bahasa Persi, Urdu, Melayu, Jawa, Sunda dan lain-lain. Dalam hal Sufisme berbahasa Jawa, banyak diantaranya ditulis dalam huruf Jawa seperti Serat Sastra Gendhing, Wulang Reh, Sasana Sunu, Wirid Hidayat Jati, Wedhatama dan sebagainya dan ada pula yang ditulis dengan huruf Arab Pegon,

seperti kitab Majmu' karya Kyai Saleh Darat dan karya-karya Kyai Ahmad Rifa'i Kalisalak.

Memperhatikan karya-karya mereka itu, memberi kesan betapa luas dan mendalamnya kajian tasawuf mereka dalam menyelami samudera ilmu batin ini, ilmu "Laduni" yang senantiasa memancar tiada kering dan tanpa henti.

Wawasan tasawuf dan pengalaman empirik mereka dalam bertasawuf terus menerus mereka wariskan melalui proses pendidikan pada umumnya dan Perguruan Tarikat pada khususnya. Perguruan tarikat biasanya mengambil bentuk pesantren khusus-tidak seperti pesantren tradisional – berupa Ribath atau Zawiah. Disini para murid diberi pelajaran terlebih dahulu dalam ilmu-ilmu syari'at. Setelah kuat dan mantap ilmu syari'at, lalu ditingkatkan ke ilmu tarikat dibawah bimbingan guru mursyidnya dengan pelajaran dalam menjalani maqam-maqam taubat, taqwa, wara', zuhud, sabar, faqr, tawakkal dan ridla. Kesemuanya perlu dijalani dengan riyadlah (latihan spiritual) dan Mujahadah (memerangi hawa nafsu) dengan memperbanyak Zikir menurut paket-paket tertentu. Sesudah itu sang murid ke arah ilmu hakikat, yakni dengan menghayati zikir sedalam-dalamnya, dengan menghayati 'eneng eneng eling' hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa semata, dengan alat rohani yang paling dalam yang disebut al-sirr. Selanjutnya boleh jadi ia memperoleh anugerah Tuhan ilmu makrifat, ilmu kasyf atau ilmu laduni, namun ilmu ini merupakan hadiah yang sekaligus ujian dan cobaan iman.

Mistik Moralis melalui sastra Melayu dan sastra Jawa begitu lancar, namun melalui pesantren agaknya tersendat-sendat. Lain halnya jika ia pesantren tarikat, kiranya ia dapat membina mistik moralis.

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DALAM PERSPEKTIF FILOLOGIS DAN KESUSASTERAAN

(makalah bahasan)

Oleh:
Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno

1. Pokok Pembicaraan dan Pemilihan Perspektif

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selama ini telah diakui menjadi akar budaya spiritual bangsa. Dengan demikian, dialog budaya spiritual ini merupakan langkah yang strategis dalam mencermati peran dan fungsi pemahaman dan penghayatan tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia.

UUD 1945 pasal 29 berjudul "Agama" mengandung dua ayat yang berupa '1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam Penjelasan tentang UUD 1945 pasal 29 dikemukakan bahwa "Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa'.

Ekspresi bangsa yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa "Tuhan Yang Maha Esa" adalah dasar agama bangsa Indonesia adalah agama tauhid, agama yang mengakui Zat Yang Maha Agung, yang kekuasaan-Nya hanya ada satu. Ke-Maha Esa-an Tuhan inilah yang menjiwai sikap, perilaku, dan ekspresi-ekspresi kehidupan bangsa Indonesia di dalam masyarakat. Demikian pula, diketahui bahwa ayat yang memperlihatkan dasar negara tersebut " menyatakan" kepercayaan bangsa Indonesia.

Cakupan substansi dari butir ayat dalam UUD tersebut tentu saja bersifat luas, meliputi segenap : pola pikir, sikap, dan perilaku

yang semuanya akan terlihat pada segenap ekspresi terhadap kehidupan. Dalam hal ini, tentu saja terbuka juga kemungkinan berkembangnya beraneka macam interpretasi terhadap pengertian "kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Seperti dikemukakan oleh pemakalah sendiri, interpretasi konsep tersebut bermacam-macam yang diantaranya adalah "Aliran kebatinan", "Aliran Kepercayaan", "Kejiwaan", dan "Kerochanian". Bahkan di antaranya ada yang memberikan pengertian yang terbatas, seperti dikemukakan pemakalah, ialah "mistik". Namun pikiran ini dapat ditoleransikan dengan memandang pengertian "mistik" merupakan salah satu saja dari penyebutan aspek-aspeknya. Oleh karenanya, sekiranya dipertimbangkan juga berbagai ekspresi dari sikap bertauhid tersebut dari berbagai manifestasi dari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ekspresi budaya spiritualnya menjadi lebih luas lagi.

Dari sejarah perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia tampak bahwa nilai-nilai luhur bangsa yang berakar pada pola pikir serta pandangan hidup yang didasarkan pada agama tauhid tersebut selama ini telah membawa kemajuan dan perkembangan bangsa. Oleh karena itu, perlu dipikirkan manifestasi dari keluasan jangkauan dari ekspresi budaya spiritual yang terangkat dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ekspresi budaya spiritual bangsa yang menyimpan nilai-nilai luhur dan yang telah berlaku dan dijadikan acuan hidup selama ini banyak yang masih terekam dalam karya-karya tulis masa lampau yang disebut naskah. Bagi masyarakat masa kini keberadaan naskah merupakan warisan yang bernilai tinggi karena warisan tulisan ini menyajikan informasi tentang masa lampau secara lebih jelas. Barangkali tidak salah apabila ada yang mengatakan bahwa warisan yang berupa naskah mampu menginformasikan masa lampau lebih jelas dari warisan budaya dalam bentuk yang lain (Soebadio, 1973). Namun, naskah sebagai penyimpan dan penyaji informasi masa lampau pun tidak tanpa kesulitan untuk membacanya. Kondisinya

dalam bentuk kertas, alat tulis, macam tulisan, dan ketiadaan data identitas yang memadai menjadi peluang untuk munculnya kesulitan dalam mengidentifikasi baik fisiknya maupun kandungannya yang berupa teks. Demikian pula, kondisinya sebagai produk masa lampau yang berhadapan dengan pembaca dari latar konteks sosial budaya yang sudah bergeser membuka kemungkinan interpretasi dengan konteks yang berbeda pula. Kondisi-kondisi tersebut membuka persepsi yang sering tidak kondusif-kalau tidak dapat dikatakan negatif- bagi upaya mengungkapkan kandungannya: tidak menarik, sulit, dan sia-sia

Filologi yang lahir dari 'kesulitan' menghadapi dunia pernaskahan tersebut menjadi sarana yang memberi harapan untuk mendapatkan hasil bagi upaya mengungkapkan kandungannya (Chamamah-Soeratno, 1998). Warisan tulisan yang telah berusia puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, terutama warisan tulisan yang mengandung nilai-nilai yang dipandang luhur oleh masyarakat dari waktu ke waktu, akan mendapatkan disalin, 'dipergeser', atau dimodifikasi sesuai dengan daya dan selera serap masyarakat yang baru. Dalam perjalanan penurunan inilah terjadi variasi. Munculnya variasi yang merupakan dasar kerja filologi inilah yang perlu dicermati dalam memanfaatkan filologi sebagai pembuka jalan mengungkapkan kandungan naskah yang berupa nilai-nilai luhur tersebut.

Apabila dalam perkembangannya filologi tidak hanya membantu mengungkapkan keaslian kandungan suatu naskah, tetapi variasi-variasi teks atau dengan istilah dalam dunia filologi 'eksemplar' atau 'teks variabel' mampu menginformasikan persepsi, resepsi, bahkan respon masyarakat penerimanya dari generasi ke generasi (Jauss, 1975; Braginsky, 1998 dan Damami, 1999). Persepektif filologis bagi usaha mengungkapkan produk budaya spiritual yang menampilkan nilai-nilai luhur bangsa, dengan demikian, akan mampu menyajikan kepada masyarakat masa kini keaslian nilai-nilai luhur tersebut juga menyajikan perkembangan penerimaan, penyambutan,

dan penanggapan masyarakat bangsa Indonesia dalam berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perspektif filologis ini, dengan demikian, menjadi signifikan bagi upaya pembinaan budi luhur bangsa yang merupakan manifestasi dari kekayaan budayanya yang berupa budaya spiritual.

Budaya spiritual yang merupakan ekspresi berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tertuang dalam warisan tulisan masa lampau tersebut oleh masyarakatnya dipandang sebagai produk sastra. Karya-karya demikian bahkan dipandang sebagai sastra yang Adiluhung, yang berupa masterpiece produk sastra dari masyarakatnya. Keberadaannya sebagai produk sastra tentu saja perlu dipahami dengan konsep sistem sastra dari masyarakatnya. Karya-karya yang mengandung ajaran yang 'luhur', yang 'mulia', dan yang ber'manfaat' adalah produk imajinatif yang kaya akan pengungkapan yang bersifat simbolis. Dalam menyajikan missi ajaran, karya-karya tersebut dipandang lebih efektif. Hal ini mengingat apa yang dikemukakan oleh Sidney (dalam Abrams, 1981:14) bahwa kehadiran Sastra adalah ***to achieve certain effects on the audience***. Sastra ***....is a means to an end and an instrument for getting something done, and tends to judge its value according to its success in achieving the aim"*** (abrams, 1981:15). Dalam perannya sebagai sarana komunikasi, tampaknya sifat sastra yang mampu menyajikan pesan secara intens, karya sastra pun dipandang sebagai sarana komunikasi yang paling efektif. Dalam kaitannya sebagai sarana komunikasi pula, sastra memiliki "anexclusive, inherent system of signs and rules governing their combination shich serve to transmit special messages, nontransmittable by other means".

Peran karya sastra dalam masyarakat, dengan demikian, menjadi penting karena dapat menggerakkan pembacanya agar bersikap, berperilaku, dan bertindak sebagaimana yang di "saran"kan oleh teksnya. Kehadiran karya sastra dilihat sebagai produk yang mampu menggerakkan masyarakat menjadi lebih peka dan responsif dalam

menghadapi gejala yang berkembang dalam masyarakat. Dari sisi pragmatis inilah karya sastra dipandang sebagai produk yang menawarkan pandangan, saran, harapan, dan langkah-langkah untuk mencapai masyarakat dan bangsa yang 'idaman', masyarakat berbudaya spiritual yang tinggi, yaitu masyarakat yang berbudi luhur. Situasi kesastraan demikian membuat pembacaannya perlu dibekali oleh konvensi-konvensi yang melatari penciptannya yang mencakup konvensi bahasa, sastra, dan budayanya. Sesuai dengan karakteristik kesastraannya, hasil pembacaannya pun akan mampu menyediakan informasi yang kaya akan nuansa pemikiran. Fakta yang terungkap dalam karya sastra bukan ***hard fact*** melainkan fakta yang bernuansa universal. Sifatnya yang universal dari fakta yang disajikan membuka jangkauan sasaran yang luas.

Dari karya tulisan pula dapat diketahui persepsi masyarakat terhadap produk sastra. Ciptaan sastra semenjak dahulu dipersepsi sebagai satu produk masyarakat yang mampu memberi makna bagi kehidupan, mampu menyadarkan masyarakat akan arti hidup, mampu meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan. Yang pada akhirnya bertujuan "***supaya trang pamriksa panaling sasambening,***" "***mrih sampurna dayanimg mardi pinardyeng ngeksikara karaning ngidhup.***" Harapan terhadap produk sastra dengan demikian adalah mampu menciptakan kehidupan yang tentram dan sejahtera lahir dan batin, masyarakat dengan suasana yang tata tentrem gemah ripah loh jinawi kerta tur raharja. ***Wanci enjang sato iwen tan ana cinancangan sesaba angupaya tedha. Ing wayah sore bali menyang kandange sowang-sowang kalis ing durjana juti*** (Chamamah-Soeratno, 1994).

Dari sini jelas bahwa sastra hadir dengan fungsi. Karya sastra bangsa Indonesia, seperti karya sastra Jawa ***Wedhatama, Wulangreh, Centhini***, dan ***Tripomo***, demikian juga karya-karya seperti ***Serat Wirid Hidayat Jati, Suluk Sukarso***, dan ***Serat Suluk Rasamurti*** (Girardet, 1983) pada saat ini tetap hidup tidak hanya pada masyarakat Jawa, tetapi juga pada masyarakat Indonesia umumnya.

2. Ekspresi Literer Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berangkat dari landasan berpikir tersebut, budaya spiritual yang merupakan manifestasi dari ekspresi berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di sini dibicarakan dalam perspektif filologis, dan perspektif kesastraan. Pembicaraannya dengan demikian, seperti dikemukakan oleh pemakalah, berpijak pada tiga hal, ialah (i) kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (ii) perspektif filologis, dan (iii) perspektif kesusastraan.

a. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Luas Lingkup Pembicaraannya.

Seperti telah dikemukakan di depan apabila konsep "kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dikembalikan pada formulasi dalam UUD 1945 pasal 29, nilai-nilai luhur bangsa yang merupakan ekspresi budaya spiritual tersebut terkandung pada berbagai topik pembicaraan. Pandangan ini akan memberi gambaran ekspresi tentang nilai-nilai luhur bangsa pada sepanjang waktu baik dari pemeluk segenap agama: Hindu, Buda, Islam, Nasrani, maupun pemeluk interpretasi ajaran agama-agama yang sering disebut juga aliran kebatinan, seperti Paguyuban Sumarah, Sapta Darma, Bratakesawa, Pangestu, dan Paryono Suryodiputra (Hadiwijono, 1983: 103-147).

Berdasarkan pandangan itu, karya-karya yang perlu diamati adalah segenap karya tulis masa lampau, terutama yang mengandung secara luas mengenai budi luhur, kita hanya yang beraspek mistik. Selain karya-karya seperti ***Serat Suluk Sandhipratistha, Serat Wirid Hidayat Jati, Kitab Akyang Ngulu Mukmin***, ***Serat Data Rasa***, dan ***Pustaka Sastradarwaya*** yang merupakan ekspresi mistik Jawa juga karya-karya yang mengandung ajaran-ajaran hidup secara luas, seperti Serat ***Tajussalatin, Serat Nawawi***, dan ***Serat Bustanussalatin***, perlu mendapat perhatian. Penetapan salah satu dari karya-karya tersebut, seperti ***Serat Wirid Hidayat Jati*** yang merupakan salah satu produk

tersebut tentu saja perlu dipandang sebagai salah satu saja dari contoh pendekatan.

Dalam perspektif filologis, dengan menggunakan contoh yang dikemukakan, karya seperti Serat Wirid Hidayat Jati (SWHJ) tersimpan dalam sejumlah naskah. Menurut hasil penelitian Simuh (1988:270), SWHJ terdapat empat witness, ialah "empat judul buku yang merupakan karya Ranggawarsita tentang ***Wirid Hidayat Jati***" dan "dua manuskrip" di Australi yang" aslinya ada di Leiden." Perbandingan terhadap ***witness-witness*** tersebut akan menghasilkan karya Ranggawarsita yang asli atau yang paling dekat dengan aslinya. Keaslian akan memberikan gambaran tentang buah pikiran Ranggawarsita tentang "ajaran mistik' dan 'aturan hidup yang bersifat moral" (Simuh, 1988:278). Namun, dari perspektif filologis pula akan terlihat bahwa karya Ranggawarsita ini telah diterima, disambut, dan ditanggapi pada sepanjang penerimannya dalam berbagai bentuk transformasinya. Variasi-variasi yang muncul sebagaimana dikemukakan oleh si peneliti (Simuh, 1988), dari perspektif filologis akan mampu menyajikan kepada pembacanya kekayaan persepsi yang dapat ditimbulkan oleh teksnya.

Dalam perspektif kesastraan, karya-karya yang menjadi sumber ekspresi dari budaya spiritual, manifestasi dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan konpensasi pada waktu penciptaannya memperlihatkan bentuk produk yang efektif dari aspek pragmatisnya. Keberadaan karya sebagai produk sastra menandai situasi kehidupan dengan pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakatnya. Sebagai ciptaan sastra, sebagaimana dikemukakan oleh Kristeva (dalam Culler, 1981) tercipta dalam kesinambungan dengan karya-karya yang tercipta sebelumnya dan dalam karya yang tercipta sesudahnya (Chamamah-Soeratno, 1977). Demikian pula SWHJ dalam membicarakan martabat tujuh, menurut penelitian Simuh (1988:307) bersumber pada kitab I-***Tuhfah-Mursalah ila Ruhnin-Nabi***, karya Muhammad Ibn Fadhillah, seorang

sufi dari Gujarat (wafat 1620 dalam Johns, 1965:5) yang diambilnya dari Ibn 'Arabi'. Paham yang telah diserap dalam ajaran yang dibawakan oleh Syamsudin As-Samatrai, Serat Centhini, dan Serat Tuhfah. Namun, dalam menyerap teks-teks tersebut SWHJ tidak menyerap begitu saja, artinya menirukan, tetapi mengubahnya sehingga kalau diperbanding-kan karya rangga warsita tersebut ada perbedaannya dengan karya-karya yang menjadi sumbernya. Sebagai contoh dapat diperhatikan hasil penelitian Simuh (1988:328-341). Dalam hal "Tuntunan Budi Luhur dan Manekung", perubahan dapat dibaca secara jelas pada halaman (742-372).

Fenomena kesastraan itu pula memperlihatkan persebaran kandungan sastra dalam lintas tradisi, dari tradisi Sumatra-tepatnya Aceh-dengan tradisi Jawa. Gejala demikian terlihat banyak pada karya-karya sastra mistik karya keempat sufi Aceh, sufi Palembang, dan sufi Banjar. Dalam hal ini, peralihan dari satu tradisi sastra ke tradisi sastra yang lain perlu mempertimbangkan konvensi-konvensi yang hidup dalam ciptaan-ciptaan sastra. Kaitan perhatian demikian akan memperkaya hasil penerimaan, penyambutan, dan penanggapan terhadap karya-karya produk masa lampau, suatu produk kajian yang besar signifikansinya bagi pengungkapan dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya.

Perspektif kesastraan melihat karya tulisan yang mengandung nilai-nilai luhur ungkapan budaya spiritual masyarakat tersebut akan menampilkan karya sastra sebagai ciptaan.

Kesimpulan

Makalah dengan judul Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam perspektif Filologis dan Kesastraan tulisan Drs. Mohammad Damami, M.Ag. mengungkapkan persoalan yang menarik bagi pemerhati peningkatan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Konsep tentang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi menarik karena merupakan ekspresi berpikir bangsa Indonesia yang tertuang dalam landasan operasional pembangunan bangsa yang selama ini dipandang sangat established.

Sesuai dengan rumusan dalam UUD 1945, konsep Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menuntut pemahaman yang mencakup segenap aspek kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman yang menuju kepada pemahaman yang luas, dan tidak hanya membatasi untuk satu sisi saja, yaitu mistik, akan memberi gambaran yang luas dan representatif tentang budaya spiritual yang merupakan manifestasi dari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut.

Sebagai karya masa lampau yang sampai pada masyarakat sekarang berupa naskah, maka situasi pernaskahan untuk karya-karya tulis masa lampau perlu diperhatikan pula. Dalam hal ini, pelacakan terhadap bentuk asli pengarang atau yang paling dekat pengarangnya akan mampu memperlihatkan teks asli pengarangnya. Di sisi lain pelacakan bentuk keaktivitas penyalin yang terlihat pada bentuk-bentuk variasinya akan memperlihatkan betapa kayanya karya-karya itu sehingga mampu mengundang perhatian untuk selanjutnya "menanggapi"nya. Hasil penanggapan yang muncul dalam bentuk variasi-variasi (dalam bentuk eksemplar atau teks variabel) akan memperlihatkan benang merah persepsi masyarakat terhadap karya-karya yang menyajikan nilai-nilai luhur budaya, sekaligus menginformasikan dinamika budaya spiritual bangsa.

Perspektif filologis dan perspektif kesastraan dilihat dari kondisi ontologis dan fenomenologisnya merupakan perspektif yang representatif bagi karya-karya, seperti SWHJ.

Daftar Pustaka

Abrams, M.H., 1981, The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the critical Tradition, New York: Oxford University Press

Chamamah-Soeratno, 1994, Sastra dalam Wawasan Pragmatis, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gajah Mada, ______ , 1988)

Culler, j., 1981, The Pursuit of Signs

(Jauss, 1975; Braginsky, 1998)

Chamamah-Soeratno, 1998, Studi Filologi dan Metodologinya)

Girardet, Nikolaus, 1983, Descriptive Catalogue of The Javanese Manuscripts and Printed Books in the Main Libraries of Surakarta and Yogyakarta.

Hadiwijono, Harun, 1983, Konsepsi tentang Manusia dalam Kebatinan Jawa, Jakarta: Sinar Harapan

Simuh, 1988, Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita: Suatu Studi terhadap Serat Wirid Hidayat Jati, Jakarta: UI Pres

Soebadio, 1973, Masalah-Masalah Filologi, Makalah disampaikan dalam Penataran Filologi dan Sejarah di UGM.

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DALAM PERSPEKTIF FILOLOGIS DAN SASTRA

(makalah bahasan)

Oleh:
Prof. Dr. Achadiati Ikram

Pertama-tama perlu saya kemukakan di sini bahwa saya tidak mempunyai pengetahuan mengenai Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Aliran Kepercayaan ataupun sebutan lain yang dikemukakan dalam makalah tersebut di atas selain sekedar pengetahuan yang sangat umum, baik mengenai prinsip-prinsip dasarnya maupun tentang praktek kebaktiannya. Oleh sebab itu saya berpijak pada uraian awal pemakalah, khsususnya pada pensifatan aliran tersebut sebagai "mistik". Dalam kaitannya dengan sastra klasik "mistik" atau "mistisisme" saya definisikan sebagai "suatu gerakan manusia dalam keinginannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Seru Sekalian Alam".

Adapun tujuan yang dapat saya rangkum dari uraian pemakalah ialah bahwa guna mendapat pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang aliran yang tersebut di atas harus dikaji sumber-sumber tertulis klasik agar terungkap akar-akarnya di masa lalu.

Mistik atau mistisisme selain melekat pada alilran-aliran kepercayaan juga tidak asing bagi semua agama, yaitu Hindu, Budha, Islam maupun Kristen. Bahkan dikatakan bahwa penghayatan agama tanpa pengalaman mistik barulah pada kulitnya saja, demikian dikatakan dalam The Protestant Mystics (Fremantle, 1965).

Mengenai pembagian atau penyederhanaan mistik menjadi mistik magis dan mistik-moralis sehubungan dengan kandungan sastra klasik saya lebih cenderung menggunakan sebuatan mistik-tasawuf, mistik-magis dan mistik-etika. Dalam ketiga hubungan itulah unsur mistik terdapat dalam teks-teks lama.

Tanggapan saya mengenai dikotomi ningrat-wong cilik ialah bahwa belum tentu "wong kang kanugrahan ngelmu" adalah orang yang termasuk kaum priyayi; demikianlah kesan yang kita peroleh dari teks seperti Jatiswara, Centini dan Tambangraras yang mengisahkan "santri lelana" atau dari Serat Cabolek yang memperdebatkan masalah penyimpangan dari hukum syariat.

Dalam pembicaraan kita tentunya yang ada hubungannya dengan sastra klasik dan penelitian filologi adalah agama Hindu, Budha, dan Islam dan sejauh mana substratum agama otokhton mendapat tempat dalam teks-teks itu.

Penelitian filologi dapat dimulai dengan kitab-kitab Jawa Kuno yang paling awal, yaitu dari kira-kira abad kesepuluh, tetapi sebelum itu dalam prasasti-prasasti bahasa Melayu Kuno dan Jawa Kuno juga terdapat petunjuk mengenai agama pada saat itu. Selain prasasti tentang peristiwa politik dan keputusan hukum ada yang mensahkan pendirian bangunan atau tempat suci yang dipersembahkan kepada dewa. Penelitian bidang arkeologi, khususnya epigrafi mengenai segi ini sudah cukup banyak dilakukan, misalnya dalam prasasti Indonesia I dan II (Casparis, 1956).

Akan tetapi uraian yang jelas atau mendalam baru ditemukan dengan adanya kitab-kitab atau naskah dalam bahasa Jawa Kuno. Ajaran-ajaran etika-agama seperti yang terdapat dalam Astabrata dan Bhagawadgita dan kemudian Partayajna misalnya tidak jauh dari ajaran untuk menemukan jalan kepada Tuhan atau Kebenaran. Sejauh mana peranan agama asli dalam membentuk aliran agama Hindu dan Budha khas Jawa atau Indonesia atau Bali, patut diteliti. Penelitian mengenai teks keagamaan dalam disertasi berjudul Candi Borobudur, Rekonstruksi Agama dan Filsafatnya (Magetsari, 1977), Partayajna (Adiwimarta, 1997), Sivaratrikalpa (Teeuw dkk, 1969), dan lain-lain sebelum itu dapat menjadi bahan untuk penelitian tentang kurun waktu itu. Di samping edisi kritis teks-teks Jawa kuno yang tersedia dalam jumlah yang cukup besar naskah yang

belum tergarap masih tersimpan dalam jumlah ratusan di berbagai lembaga di Indonesia dan Belanda (Pigeaud, 1967-1970).

Gelombang pengaruh budaya besar sesudah India adalah Islam yang dengan budaya tulisnya menciptakan gairah baru dalam keberaksaraan. Budaya baru yang didukung oleh bahasa Melayu yang sebelumnya sudah menjadi lingua franca dengan cepat merambah kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara sampai ke Maluku Utara dan Selatan. Hampir semua etnik yang menerima Islam mengadopsi pula aksara Arab, meskipun sebelumnya sudah mempunyai tulisan sendiri. Di antara tulisan pra Islam yang tetap dipertahankan di samping aksara Arab adalah aksara Bugis, Jawa dan Lombok. Aksara Arab yang dimodifikasi sesuai dengan sistem bahasa masing-masing digunakan dalam naskah-naskah meskipun isinya masih pekat dengan unsur keagamaan lama, seperti Hikayat Panji Kuda Semirang (Ali dan Hutagalung, 1996), Hikayat Sri Rama (Ikram, 1980), Shair Ken Tambuhan (Teeuw, 1966).

Aliran Sufi dengan tarikatnya berpengaruh dalam membentuk agama Islam seperti yang dihayati sebagian penduduk Indonesia. Penelitian berdasarkan naskah-naskah tentang tarikat Syatariyyah, yaitu suatu di antara tarikat yang penting di Indonesia diwakili oleh tulisan-tulisan Abdurrauf, Abdulmuhyi dan Syekh Yusuf, saat ini diteliti antara lain melalui teks Zubdat al-Asrar (Lubis, 1996), naskah-naskah Syatariyyah yang terdapat di perpustakaan Nasional (Abdulllah, 1996 dan Faturrachman 1988). Ada yang didasarkan pada satu bahasa, ada pula yang bersifat lintas bahasa, yaitu Melayu dan Jawa. Peneliti asing seperti Al-Attas, GWJ, Drewes dan Nieuwenhuyze telah menyediakan edisi kritis teks karangan Hamzah Fansuri dan Ar-Raniri yang dapat memberi wawasan tentang wacana keagamaan pada kurun waktu itu. Namun rekonstruksi sistem sastra yang telah dilakukan oleh Braginsky (1993) belum dicoba.

Sumber naskah yang tersedia di Perpustakaan Nasional mengenai keagamaan dalam bahasa Melayu Lama mendekati 200 judul,

sedangkan yang berbahasa Arab 600 judul lebih, semuanya naskah yang ditemukan di kawasan Nusantara. Suatu penelitian pasti akan dapat mengungkapkan adaptasi-adaptasi keagamaan yang merujuk pada sikap budaya dan agama asli bila dilakukan studi interteks.

Suatu tuntunan etika keagamaan yang menurut tradisi berasal dari Sunan Bonang pada abad ke-16 dan diterbitkan dengan judul The Admonitions of The Bari (Drewes, 1969) merupakan dialog tentang akidah.

Mengenai asumsi pemakalah bahwa pasti ada kesesuaian/ kemiripan antara format isi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat Jawa dan bukan Jawa saya merujuk pada tiga varian mistisisme yang saya kemukakan di atas, namun masih perlu dibuktikan dengan penelitian sosial dan tekstual. Dapat juga dipastikan adanya persamaan mengingat sentuhan dengan Islam yang selama beberapa abad.

Yang pasti ialah bahwa sebagai bangsa yang telah berabad-abad mengenal aksara kita tidak perlu meraba-raba dan menerka - nerka mengenai masa lalu, karena kita memiliki written records dalam jumlah berlimpah. Dengan demikian maka penelitian yang perlu dilakukan sangat dimungkinkan.

PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Oleh:
Drs. Abdurrahman Widyakusuma

PENGANTAR

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Sarasehan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 1981, adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengamalan budi luhur. Dari pengertian tersebut, terungkap tiga ciri pokok kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, perilaku ketakwaan dan pengamalan budi luhur.

Keberadaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdapat dalam sila pertama Pancasila, Pasal 29 UUD 1945, dan sebagai buah usaha budi manusia yang merupakan perwujudan cipta, rasa, karsa, dan karya manusia tertuang dalam Pasal 32 UUD 1945, serta dipertegas dalam setiap rumusan GBHN semenjak tahun 1973 hingga 1998. Penganut yang melaksanakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran batin, jiwa dan rohani melalui pemusatan kesadaran yang utuh dalam penyerahan diri kepadaNya, disebut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Keputusan Presiden No. 27 juonto nomor 40 tahun 1978 diserahkan kepada Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pembangunan kebudayaan bangsa.

Tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222 e/1980 adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan di bidang pembinaan perikehidupan masyarakat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Melaksanakan dan membina usaha dan program pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Melaksanakan urusan tata usaha Direktorat.

Ruang lingkup pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah seperti yang digariskan dalam GBHN dan diwujudkan dengan pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat tanpa mencampuri perilaku penghayat atau keyakinan yang menyangkut hubungan pribadi para penghayat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan kepercayaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0957/FI. IV/E.88 bertujuan untuk mewujudkan citra penganut/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk:

1. Melaksanakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Mengemban budi luhur dan pengamal budi pekerti kemanusiaan yang luhur dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
3. Melaksanakan pembangunan nasional bersendikan kepribadian bangsa.
4. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional yang berintikan nilai-nilai luhur bangsa.

Dalam pelaksanaan pembinaan, Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah melakukan berbagai kegiatan seperti inventarisasi, penyebarluasan informasi, pengkajian/penggalian ajaran, sarasehan, penyuluhan, pemaparan budaya spiritual, pembinaan pamong dan koordinasi antar instansi terkait. Hasil yang dicapai antara lain, terinventarisasinya 247 cabang organisasi penghayat tingkat pusat dan 569 organisasi tingkat cabang yang meliputi nama organisasi, pengurus beserta latar pendidikan serta pekerjaannya, dan ajaran organisasi tentang Tuhan, alam, manusia, budi luhur ataupun laku spiritual. Selain itu, pemahaman dan pengertian para pamong budaya dan instansi terkait tentang pembinaan penghayat semakin meningkat, seiring tumbuhnya apresiasi masyarakat terhadap ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagi kalangan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pembinaan yang dilakukan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sedikit banyak telah menumbuhkan kegairahan, kemantapan dan ketentraman dalam melaksanakan penghayatannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BEBERAPA PERMASALAHAN PEMBINAAN

Hasil pembinaan yang telah dicapai Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih jauh dari yang direncanakan karena berbagai permasalahan internal maupun eksternal yang belum teratasi. Di antara permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain menyangkut eksistensi kepercayaan, ruang lingkup, arah dan tujuan pembinaan serta organisasi penghayat kepercayaan.

Masalah eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berangkat dari pemahaman yang berbeda terhadap kata agama dan kepercayaannya yang termuat dalam ayat 2 pasal 29 UUD 1945.

Satu pihak memahami bahwa ayat tersebut menunjukkan dua substansi, yaitu agama dan kepercayaan, sementara pihak lain menyatakan kata kepercayaannya tersebut merujuk pada kata agama sehingga hanya menunjukkan satu substansi yaitu agama. Perbedaan pemahaman tersebut menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan dan mengakibatkan dualisme pemikiran pembinaan penghayat, apakah oleh Departemen Agama atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di lingkungan organisasi penghayat muncul pemikiran agar kepercayaan diakui sejajar dengan agama dan di lain pihak tidak mempersoalkan kesejajaran tersebut karena organisasinya terbuka bagi semua pemeluk agama. Dalam masyarakat perbedaan pemahaman tersebut menimbulkan hubungan yang kurang serasi antara penghayat dengan pemeluk agama lainnya, terutama dengan kalangan umat Islam.

Masalah ruang lingkup, arah dan tujuan pembinaan penghayat kepercayaan seperti digariskan dalam GBHN yang sering berubah juga mempengaruhi pembinaan yang dilakukan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam GBHN 1973, 1983, dan 1988 misalnya, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tercantum dalam bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya dan ditegaskan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama dan pembinaannya agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru. Sementara itu dalam GBHN 1993 Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimaksudkan dalam Bidang Agama dan Kepercayaan. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, arah pembinaannya agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Sementara dalam GBHN 1998 penganutnya diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui negara. Sementara itu, TAP MPR nomor 10/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak tercantum dalam bidang Agama ataupun Sosial Budaya, sehingga menimbulkan kegelisahan di kalangan organisasi penghayat dan pembinanya.

Masalah organisasi penghayat yang pada umumnya masih sangat sederhana baik yang menyangkut organisasi, sumber daya, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatannya dan ajaran yang belum tersistematisasi dan terpublikasi secara luas banyak diketemukan pada organisasi kepercayaan di daerah. Keadaan ini tidak berlaku pada organisasi besar seperti Sumarah, Pangestu, Saptadarma, Perjalanan, Kapribaden, Subud yang pada umumnya menunjukkan diri sebagai organisasi yang modern dan mempunyai pengaruh luas dalam masyarakat.

ALTERNATIF PEMECAHAN

Sebagai instansi yang berada dalam jajaran Direktorat Jenderal Kebudayaan, Visi Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjadi lembaga yang berorientasi ke depan, dinamis, kreatif, inovatif, terbuka dan bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan masyarakat penghayat sebagai pengemban budaya spiritual yang melaksanakan kepercayaan sesuai dasar Ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan kepribadian bangsa, mengamalkan budi luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berperan aktif dalam pembangunan bangsa, menjaga persatuan bangsa dan kesatuan bangsa dengan bertumpu pada penguatan kepercayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan, sehingga Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjadi pusat kajian dan pelestarian budaya spiritual bangsa Indonesia.

Misi yang diemban Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah mengembangkan sumber daya, kelembagaan, dana, sarana/prasarana dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dapat berperan serta dalam memajukan kebudayaan bangsa melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mendorong terwujudnya masyarakat

penghayat yang sejahtera rohani dan jasmani, terbuka, berwawasan luas, toleran, sadar akan keberadaannya dalam masyarakat yang majemuk, serta meningkatkan peran serta penghayat dalam pembangunan bangsa.

Bertolak dari visi dan misi Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilihat sebagai keyakinan pribadi, keberadaannya telah tertampung dan dijamin dalam pasal 29 UUD 1945 yang pembinaannya di luar lingkup tugas Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilihat sebagai pemangku sistem nilai budaya yang merupakan abstraksi pengalaman yang berfungsi sebagai kerangka acuan dalam membina hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan hidup. Dengan demikian, pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan dalam upaya memajukan kebudayaan bangsa yang ditujukan untuk tercapainya kemajuan adab, masyarakat demokratis, dan persatuan bangsa.

Dalam bingkai kebudayaan, keberadaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan arah, ruang lingkup dan arah pelestarian kebudayaan secara keseluruhan, karena merupakan salah satu sistem nilai budaya yang hidup, dihayati serta dilaksanakan oleh sebagian rakyat Indonesia dalam bentuk spiritual. Dengan demikian, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dinyatakan sebagai bukan merupakan agama, tidak mengarah kepada pembentukan agama baru atau penganutnya diarahkan memeluk salah satu agama yang diakui, melainkan dilakukan pembinaan dalam rangka pelestarian budaya, pengamalan budaya spiritual dan budi luhur dalam rangka meningkatkan saling pengertian dan penghargaan demi terwujudnya kerukunan hidup di antara masyarakat penghayat dan antara penghayat dengan kelompok umat beragama dan pemerintah.

Pemecahan masalah pembinaan organisasi penghayat kepercayan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dapat dilakukan dengan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan mass media, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya melalui pendidikan dan latihan, pemberian kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam pembangunan nasional, peningkatan dukungan dana, sarana dan prasarana, serta pengkajian secara ilmiah tentang penghayat melalui penelitian, temu budaya, seminar, penerbitan buku jurnal ilmiah, ensiklopedi, dan sebagainya.

HARAPAN

Demikian potret Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam membina penghayat selama kurang lebih 21 tahun lamanya dengan berbagai permasalahan dan kendala yang masih banyak yang belum teratasi. Dari forum dialog ini diharapkan sebanyak-banyaknya masukan guna keberhasilan pembinaan penghayat sebagai kelompok warga negara yang mempunyai hak untuk diperhatikan, dilindungi, dibina dan dilibatkan dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan integratif, dalam arti lebih mengutamakan integrasi dari pada konflik dalam melihat setiap persoalan dalam pembinaan.

Akhirnya dihaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibu dalam kegiatan dialog ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

PELESTARIAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

(makalah bahasan)

Oleh:
R. Djoko Soemono Sumadisastro

I. PENDAHULUAN

Mengawali pembahasan tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka terlebih dahulu harus mengetahui, mengenal, memahami serta mendalami apa sebenarnya Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah dikenal/diketahui jauh sebelum agama-agama masuk ke persada Nusantara Indonesia. Dengan kata lain, bahwa bangsa Indonesia jauh sebelum agama-agama masuk Nusantara Indonesia, Bangsa Indonesia pada waktu itu sudah mengenal Tuhan Yang Maha Esa sejak jaman pra-sejarah/primitif sampai sekarang di jaman modern sekarang ini, meskipun nama-nama tentang Tuhan Yang Maha Esa berbeda-beda sebutannya akan tetapi hanya untuk yang satu Tuhan Yang Maha Esa.

Adalah sangat tidak terpuji manakala kita bangsa Indonesia mengingkari sejarah adanya suatu "keyakinan" yang kuat dan mengakar pada bangsa Indonesia ialah kepercayaan bangsa Indonesia terhadap adanya kekuatan GAIB DAN MUTLAK yang ajarannya bersumber dan bermuara pada NGELMU SANGKAN PARANING DUMADI, yang berakhir pada MANUNGGALING KAWULA GUSTI, menyatukan diri dengan TUHAN YANG MAHA ESA. Pada umumnya ngelmu tersebut merupakan tuntunan dan ajaran kebatinan, kerohanian dan kejiwaan, kemudian terakhir disebut KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.

Meskipun di jaman pra-sejarah dan pra-agama ada yang menyebut aliran ANIMISME dan DINAMISME sebagaimana dituturkan E.B. TAYLOR bahwa ANIMISME mempercayai adanya roh-roh

halus termasuk roh-roh leluhurnya (baik yang dikenal maupun yang tidak) serta DINAMISME yang mengakui adanya sesuatu kekuatan MAHA DAHSYAT dari ADIKODRATI yang kemudian berkembang dan dikenal umum bersumber dari TUHAN YANG MAHA ESA.

Menurut ENDANG SAIFUDIN ANSHARI, MA. Dalam tulisannya tentang ILMU FILSAFAT dan AGAMA, dikenal ada dua pembagian RELIGI. (Periksa bukunya yang dicetak di Surabaya tahun 1983 halaman 172) membagi AGAMA dalam dua kelompok:

1. AGAMA SAMAWI (revealed religion, agama profetis, agama wahyu, agama langit, Din As-Samawi).
2. AGAMA BUDAYA (non-revealed religion, Natural religion, Agama bumi, Agama ra'yu, Din at Thabi'i, Din al-Ardhi).
   a. AGAMA SAMAWI diwahyukan oleh ALLAH melalui NABI dan ajarannya dihimpun dalam Kitab Suci masing-masing.
   b. AGAMA BUDAYA adalah keyakinan pribadi berupa hasil olah-batin para penganutnya, dalam usaha mendekatkan diri langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak punya NABI dan tidak punya KITAB SUCI.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut sebagaimana bangsa Indonesia adalah merupakan BUDAYA ROHANIAH yang hidup berkembang serta lestari sepanjang masa dalam masyarakat Indonesia, sekaligus dalam mengamalkan perilaku BUDI LUHUR dalam masyarakat, dengan memperlihatkan pendidikan MORAL BANGSA.

SIKAP BUDI LUHUR ini dapat dibuktikan adanya AKULTURASI agama-agama pendatang masuk ke persada Nusantara Indonesia, terjadilah AKULTURASI antara:

AGAMA HINDU = akulturasi menjadi HINDU JAWI;
AGAMA BUDHA = akulturasi menjadi BUDHA JAWI WISNU;
AGAMA KRISTEN= akulturasi menjadi KRISTEN JAWI WETAN;

AGAMA ISLAM = akulturasi menjadi ISLAM KEJAWEN/ISLAM ABANGAN

Ini menandakan bahwa ajaran KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA warisan leluhur bangsa Indonesia penuh TOLERANSI dan dalam nuansa modern menganut faham PLURALISME (kebebasan memeluk agama-agama), karena semua agama mengajarkan dan menganut Iman dan Taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, jadi sama tujuannya dengan ajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan sikap terbuka ini hendaknya jangan diartikan "kelemahan atau kedangkalan' ajaran, akan tetapi di 'JAKINI' bahwa ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan intisari dari tuntunan agama-agama yang ada sehingga tidak perlu dipertentangkan, karena tujuan akhir adalah sama kembali pada Tuhan Yang Maha Esa apapun sebutannya.

Oleh sebab itu, penganut/penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah atheis melainkan umat yang BERKETUHANAN YANG MAHA ESA.

II. LANDASAN HUKUM

Mendiang Mr. WONGSONEGORO salah seorang anggota panitia Perancang Undang-Undang 1945 (UUD 1945) mengusulkan kebebasan beribadat seluas-luasnya, termasuk bagi kebatinan, kejiwaan dan kerohanian. Hal ini diungkapkan oleh Prof. ABDUL GAFAR PRINGGODIGDO, SH. Dalam SYMPOSIUM NASIONAL KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA di Yogyakarta tanggal 10 Nopember 1970, mengenai riwayat pasal 29 UUD-1945, yang diselenggarakan oleh dewan pimpinan pusat SKK (Sarekat Kerja Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa) sehingga makin jelas tentang kalimat KEPERCAYAAN dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa yang di maksud dengan KEPERCAYAAN ITU adalah KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.

Yang diajarkannya dianut dan dihayati segenap warga penghayat KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (KEBATINAN, KEJIWAAN DAN KEROHANIAN).

Warisan kekayaan rohaniah yang bukan agama wahyu, dalam kenyataannya merupakan bagian dari kebudayaan bangsa yang hidup dan dihayati serta dilaksanakan oleh sebagian rakyat Indonesia sebagai BUDAYA SPIRITUAL. (Pidato Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1978). Dikatakan warisan budaya, karena menurut para ahli seperti: Mr. Moehammad Yamin, Ki Hajar Dewantara. DR. Kuntoroningrat, J.W.M. Bakker, P. Zaetmulder dan lain-lain; berpendapat bahwa sejak lama bangsa di kawasan Nusantara telah mengenal Tuhan Yang Maha Esa (sebelum agama-agama lain masuk persada Nusantara Indonesia).

Oleh karena itu landasan hukum yang menjadi kekuatan keberadaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah:

1. Sejarah keberadaan ajaran dan tuntunan kebatinan kerokhanian dan kejiwaan yang sekarang disebut KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, sebelum agama-agama masuk di persada Nusantara Indonesia;
2. Pembukaan UUD – 1945 ayat (1) dan ayat (2) dengan semua penjelasannya;
3. Keputusan Presiden No. 27 yo. No. 40 Tahun 1978, dibentuknya Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Kebudayaan DEPDIKBUD.
4. GBHN Tahun 1978; Tahun 1983; dan Tahun 1988 BAB IV POLA UMUM PELITA III, IV,V, BIDANG AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL DAN BUDAYA.
5. PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 1986 tentang PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA....

6. SK MENDIKBUD NO. 0222e/0/1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan.
7. SK. DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN No. 0957/ F.1.IV/E.88 tentang Keputusan Direktorat Jenderal Kebudayaan No. 021/A1/1980 tentang Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Serta berbagai Perundang-Undangan, serta Peraturan Pemerintah yang bertalian dengan tata-perikehidupan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara menyuluruh, supaya lebih dimantapkan dan direalisasikan pelaksanaannya.

(A) Disamping itu, tuntunan dunia tentang HAK ASASI MANUSIA (HAM) tentang Deklarasi Penghapusan segala bentuk ketidak-toleransian dan diskriminasi yang didasarkan pada AGAMA DAN KEPERCAYAAN. Dokumen PBB berisi : ST/HR yang menerbitkan LEMBAGA SECRETARIAT CENTRE FOR HUMAN RIGHTS, PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA. Diproklamasikan oleh Sidang Umum PBB dengan resolusi Sidang Umum 36/55 tanggal 25 Nopember 1981 Sidang Umum. (Untuk jelasnya bersama ini kami lampirkan foto copy terjemahan ke Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir.

(B) JUGA TUNTUNAN REFORMASI TOTAL SECARA DAMAI, yang dikumandangkan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam:
  1. Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII);
  2. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKRI);
  3. Gerakan Mahasiswa Katholik Indonesia (PMKRI);
  4. Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  5. Wakil Para Pemeluk Agama Konghucu;
  6. Dan berbagai organisasi Kemahasiswaan di Jawa Timur;

  Yang menghendaki adanya perubahan REFORMASI SECARA DAMAI tentang pokok-pokok tuntutannya mengenai:

1. Hak kebebasan memeluk agama-agama sekaligus menganut PLURALISME
2. Kebebasan tentang HAK ASASI MANUSIA (HAM) yang menuntut adanya perlakuan yang sama terhadap setiap manusia Indonesia. (Periksa photo copy terlampir)

(C) Para PEMUKA AGAMA dan KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA Jawa Timur menyelenggarakan DO'A bersama di GEDUNG GRAHADI kediaman Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 21 Mei 1998, sesaat Presiden Soeharto lengser Keprabon. (untuk jelasnya bersama ini kami lampirkan photo-copy ini).

(D) Runtuhnya pemerintahan ORDE BARU diantaranya adalah karena kemerosotan MORAL PARA PEMIMPIN BANGSA INDONESIA, sehingga terpuruk di segala bidang. Maka para Pemuka Agama-agama juga mengadakan SERUAN REFORMASI MORAL. Menandakan perlunya PEMBENAHAN DAN PERBAIKAN MORAL. Kalau ingin menjadi Pemimpin yang baik. Tanpa moral yang baik, sulit dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, adil, aman 'tata tentrem kerta raharja'. Mengapa bangsa Indonesia terpuruk di segala bidang? Karena semua aparat pemerintahan sebagian korup; menjalankan pemerintahan yang tidak adil, para Pimpinanya KKN. Penguasa menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang. Hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mekanisme pemerintahan tumpang tindih, sehingga cenderung "menang-menangan". Semua pengurusan kepentingan rakyat harus mengeluarkan biaya banyak, sehingga bagi mereka yang tidak memiliki uang sulit dapat terselesaikan dengan baik. Khususnya bagi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipersulit, meskipun Undang-Undangnya telah ada yang melindungi, antara lain Undang-Undang Perkawinan, tidak dilengkapi dengan Peraturan

Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang tersebut, sehingga Menteri dapat membelokan/mengambangkan/merubah yang bertentangan dengan norma-norma pokok pada Undang-Undang tersebut. Dan banyak lagi, yang menyulitkan tata kehidupan warga Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adalah sangat ironis, guna melaksanakan PERKAWINAN di negerinya sendiri di persulit, masih harus melalui Pengadilan segala. Padahal hak untuk menikahkan/mengawinkan adalah di tangan orang tua pihak perempuan, bukan haknya Pegawai Pencatatan Pernikahan (KUA) bagi umat Islam dan Catatan Sipil bagi selain Islam.

Agar supaya kedudukan hukum pulih kembali dan tata kehidupan para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjamin secara hukum, maka sebaiknya dikembalikan pada GBHN tahun 1978, disertai Peraturan Pemerintah atau Peraturan Pelaksanaan setiap Undang-Undang yang mengatur tata-kehidupan para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di segala bidang. Undang-undang atau Peraturan apapun yang bertentangan dengan HAK ASASI MANUSIA hendaknya dicabut.

III. NORMA-NORMA HUKUM YANG MEMPERKUAT PELESTARIAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

1. Tujuan pokok/utama ajaran dan tuntunan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah 'PERCAYA ADANYA' atau 'IMAN' serta 'MITUHU/JAKIN/MENURUT PERINTAHNYA' TUHAN YANG MAHA ESA.
2. Tata-cara ritualnya (pelaksanaan ibadah) dengan semedi/samadi/manekung/dikir khusuk, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama, sehingga mencapai tujuan. Pada umumnya tidak banyak mengeluarkan kata-kata, bahkan sampai tidak mengguna-

kan panca-indera karena mendalam/khusuknya; 'SEDHAKEP SLUKUTU, NUTUPI BABAHAN HAWA SANGA, MEGENG NAFAS, LIR THATHIT NUR ALLAH KEMBALI PADA TUHAN YANG MAHA ESA. Dengan demikian maka persamaan tujuan dengan tuntunan dan ajaran agama-agama yang hakiki. Oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai AGAMA BUDAYA. Tidak membentuk AGAMA BARU akan tetapi warisan leluhur bangsa Indonesia AGAMA BUDAYA/AGAMA LAMA atau BUDAYA SPIRITUAL.

3. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah WARISAN LELUHUR BANGSA INDONESIA sebelum agama-agama masuk ke persada Nusantara Indonesia. Perlu dilestarikan, karena merupakan KEKAYAAN ROKHANIAH BANGSA INDONESIA. Oleh sebab itu perlu diangkat ke permukaan, sehingga kebenarannya perlu diperlakukan sama seperti perlakuan terhadap agama-agama pendatang ke Indonesia. Menghormati BUDAYA SPIRITUAL bangsa sendiri adalah kewajiban setiap warga negara. Perilaku seseorang (sirik/musrik) tidak dapat dipakai sebagai ukuran untuk memvonis seluruh ajaran dan tuntunan KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA. Karena apapun yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan disediakan untuk umatnya. Kesalahan oknum jangan dipakai sebagai ukuran untuk memvonis BUDAYA SPIRITUAL/AGAMA BUMI itu tidak baik. Setiap orang/oknum dapat berbuat salah. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah benar dan baik. Adalah tidak pada tempatnya mengusir/mendepak/menghapus BUDAYA BANGSA (baik BUDAYA FISIK maupun BUDAYA SPIRITUAL) dengan menggantikan BUDAYA TAMU/PENDATANG.
4. Melestarikan BUDAYA BANGSA (BUDAYA FISIK DAN BUDAYA SPIRITUAL) adalah kewajiban setiap WARGA NEGARA yang tahu HARGA DIRI. Contoh: Jepang adalah negara

termaju di ASIA, tidak pernah meninggalkan/mengesampingkan adat-istiadatnya sendiri. Setiap pandangan dihadapkan pada hukum adatnya, secara tidak langsung supaya menghormati adat-istiadat Jepang. Tradisi minum teh sore. Duduk dengan pakaian kimono di lantai dan lain sebagainya, sehingga dalam waktu singkat kita mengenal adat-istiadatnya.

5. Mendidik bangsa Indonesia memiliki JATI DIRI YANG KUAT, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi Internasional. Ingin jadi bangsa yang kuat, harus memiliki dan menguasai JATI DIRI sebagai bangsa yang telah merdeka dan berdaulat di negerinya sendiri.
6. Waspada terhadap penjajahan KEBUDAYAAN, penjajahan EKONOMI, penjajahan POLITIK. Karena sedikit demi sedikit akan meruntuhkan bangsa tersebut.
7. BUDAYA FISIK adalah hasil APRESIASI DARI BUDAYA SPIRITUAL. Oleh sebab itu maka mengangkat Direktorat Binyat Depdikbud sejajar dengan Dirjen Kebudayaan adalah sangat tepat, sehingga pengembangan BUDAYA FISIK dan pengembangan Budaya SPIRITUAL berjalan bersama-sama.
8. Perlu adanya penambahan dan perubahan struktur Perundangan-Undangan yang mengatur perikehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka seyogyanya dipimpin seorang pejabat yang juga seorang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
9. Norma-norma HAK ASASI MANUSIA (HAM) dan PLURALISME perlu dipakai sebagai ACUAN bangsa serta BUDI LUHUR BANGSA INDONESIA agar tetap menjadi bangsa yang beradab.
10. Pendidikan BUDI PEKERTI harus menjadi salah satu usaha Pemerintah untuk memperbaiki MORAL BANGSA yang mengalami dekadensi moral/kemerosotan moral terutama bagi para Pemimpin bangsa salah satu syarat adalah moral yang baik/

benar dilihat perilaku selama hidupnya, di dalam keluarga, masyarakat dan pergaulan hidup sehari-hari.

IV. KESIMPULAN

1. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat perlu dilestarikan, karena ajaran dan tuntunannya mengarah perilaku dan norma-norma BUDI LUHUR.
2. Para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat diikutsertakan Pemerintah dalam rangka memperbaiki MORAL BANGSA, terutama dalam PENDIDIKAN BUDI PEKERTI, yang harus diajarkan kembali di sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi baik swasta maupun negeri.
3. Status Direktorat perlu ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal, sehingga pembinaan dapat ditingkatkan.
4. Pimpinan sebagai pembina seyogyanya pemimpin yang juga Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar mengerti akan segala kebutuhan baik tentang Perundang-Undangan maupun kebutuhan kelengkapan ibadah yang bersifat fisik dan moril, sehingga pembina maupun yang dibina saling dapat melengkapi, sehingga dapat berjalan bersama-sama dalam pembangunan.
5. Peraturan-peraturan atau himbauan dari Menteri atau Pejabat yang bertentangan dengan Undang-Undang dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan Peraturan atau Peraturan Pelaksanaan Perundang-Undangan yang telah ada dan atau yang akan diadakan.
6. Badan Kerjasama Organisasi-Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (BKOK) segara diakui serta dijadikan MITRA KERJASAMA/PARTNER yang saling kerjasama harmonis, sesuai dengan Pidato Dirjen Sospol Depdagri dan Dirjen Kebudayaan Depdikbud tahun 1994 yang tujuannya menjadikan

BKOK Wadah Nasional dari seluruh Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian cukup kiranya pembahasan kami, semoga Tuhan Yang Maha Esa Wikan memberikan tuntunan dan bimbingan, agar Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat lestari lebih baik dari yang sudah-sudah.

POKOK-POKOK PIKIRAN MENGENAI "PELESTARIAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA"

(makalah bahasan)

Oleh:
Drs. Toeloes Koesoemoboedojo

1. STRUKTUR JURIDISCH KONSTITUSIONAL.

Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan yang berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila sebagai falsafah dasar negara, karenanya ia sekaligus sebagai jiwa bangsa, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, sikap hidup bangsa, cita-cita dan sekaligus sebagai IDIOLOGI NASIONAL. Dus Pancasila dengan demikian adalah sebagai satu system bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai satu system adalah berfungsi untuk melangsungkan alokasi atau menempatkan nilai-nilai luhur bangsa, baik dalam artian kebijaksaan, perencanaan, tata nilai, paradigma bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kesatuan system nilai Pancasila.

Alokasi tersebut sifatnya autoritative (dengan menggunakan kekuasaan negara) konsititusional, maka dari itu merupakan keharusan bagi seluruh rakyat Indonesia dan demikian juga bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara harus melaksanakan secara murni dan konsekwen.

Oleh sebab autoritativ konstitusional, maka timbullah sangsi bagi siapapun yang tidak mentaatinya, karenanya sudah barang tentu siapapun tidak dapat terhindar dari pelaksanaan sangsi itu sendiri.

Jikalau demikian halnya, maka timbullah pertanyaan apakah "system" itu, menurut Gabril A Almond dan C Bingham Powell Jr dalam bukunya "Cooperative politics" antara lain menyatakan:

..........." a system is the interdependence of parts" jadi system adalah ketergantungan diantara bagian-bagian. Berhubung dengan interdepency itu, maka apabila sifat dan keadaan dari satu komponen atau bagian dari/dalam satu system itu berubah, dengan sendirinya semua komponen/bagian lainnya demikian pula system itu sendiri secara keseluruhan akan terpengaruh dan pasti berubah serta menimbulkan akibat sesuai dengan perubahan yang terjadi. Mengapa demikian, Almoni mengatakan dalam bukunya" "development approach to political system" antara lain: "satu system tertentu, apakah itu berupa organisme, apakah itu mesin ataupun keluarga, harus bertingkah laku berdasarkan cara-cara tertentu yang telah ditetapkan, melakukan sejumlah kewajiban supaya menjadi organis mekhanis dan atau harmonis".

Contoh: Sebuah mesin mobil yang sudah lengkap segala sesuatunya, pendeknya tinggal jalan. Akan tetapi jikalau salah satu bagian/kompunennya rusak atau pecah/tidak berfungsi, maka mesin mobil yang seharusnya hidup berbunyi teratur itu pasti akan menjadi pincang atau kurang baik. Kemudian organisme, mekanisme dan harmonisme tidak selaras lagi atau rusak, bahkan seluruh systemnyapun menjadi rusak atau timpang.

Analog dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila pembangunan dibidang agama dan dibidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyimpang dari Pancasila atau salah satu Silanya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau ditafsirkan berdasarkan kepentingannya sendiri, maka semua Sila yang tersisa yang seharusnya utuh sebagai satu system, menjadi rusak atau timpang, lebih-lebih kepercayaan bangsa.

Lebih-lebih kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang secara struktural juridish konstitusional merupakan SISTIM KONSTITUSIONAL YANG SELAMA INI SELALU DI PERSULIT melaksanakan Hak dan kewajibannya antara lain sembahyang dipersulit, mencatatkan perkawinannya dipersulit, memperoleh

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dipersulit, dan memang pesanan dari atas, pasti akan menimbulkan reilektif atas tata-nilai yang mereka lakukan. Sentanapun para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terpaksa hanya menggerutu. Oleh sebab para penyelenggara negara lebih tunduk pada atasannya dari pada HUKUM, atau mengutamakan kekuasaan dari pada Hukum selama ini.

2. PANDANGAN DARI SUDUT NILAI

Di dalam lembar pertama alinea ketiga telah saya tegaskan bahwa Pancasila sebagai satu system adalah berfungsi untuk melangsungkan alokasi nilai-nilai luhur bangsa, salah satunya nilai luhur bangsa adalah kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, secara struktural dialokasikan kedalam Pasal-Pasal, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. Yaitu misalnya dalam Pasal 29 BAB XI AGAMA ayat 1) "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam penjelasan pasal disebutkan: Pasal 29 ayat 1) "Ayat ini menyatakan kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa".

Dalam pokok pikiran ke-empat dinyatakan sebagai berikut "4. Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan perintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur".

Dengan demikian oleh sebab Pancasila berfungsi sebagai satu system bermasyarakat berbangsa dan bernegara secara juridish konstitusional, maka dengan sendirinya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sebagai Subsystem, dus mutlak, merupakan keharusan dilaksanakan oleh setiap penduduk.

Sekarang hubungan pengertian dengan NILAI LUHUR BANGSA, apakah sesungguhnya NILAI (VALUE) itu, jawabnya: Nilai adalah pensifatan segala sesuatu yang ada guna manfaatnya bagi manusia baik jiwani maupun ragawi.

Selanjutnya apa yang menjadi tolok ukur dan kandungan nilai-nilainya, pada prinsipnya adalah tingkat abstraksi nilai-nilai itu sendiri, yang pada pokoknya ada tiga tataran nilai dilihat dari segi tingkat abstraksinya sebagai berikut: NILAI DASAR, NILAI INSTRUMENTAL DAN NILAI PRAKSIS, yang secara singkat dapat diterangkan sebagai berikut:

a. NILAI DASAR

Nilai dasar merupakan prinsip yang sifatnya amat abstrak, masih amat umum, sifat terikat oleh ruang dan waktu, tempat maupun abadi, mengandung kandungan kebenaran bagaikan satu aksioma. Dari sudut kandungan nilainya, nilai dasar berkenaan dengan keberadaan sesuatu yang mencakup cita-cita, tatanan dasar, ciri khas dan tujuannya. Nilai dasar ini pada hakekatnya tidak akan berubah sepanjang jaman. Hal yang demikian itu bisa tercapai karena disebabkan sifatnya yang masih amat abstrak, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu maupun tempat.

Kaitannya dengan Pancasila sebagai falsafah dasar Negara yang tempatnya di letakkan dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945 yang oleh TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yang antara lain tidak boleh mengubah Pembukaan UUD 1945, karena mengubah Pembukaan UUD 1945 sama dengan Pembubaran Negara Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945, dus sifat abadi langgeng, dengan demikian Pancasila oleh sebab itu adalah merupakan NILAI DASAR YANG ABADI.

Lebih tegas lagi dapat saya nyatakan disini oleh karena system ketatanegaraan kita, nilai dasar tercantum dalam hukum dasar tertulis meliputi Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD

1945. Jadi pada hakekatnya didalam dokumen itulah termuatnya kaidah-kaidah yang paling hakiki menyangkut eksistensi Negara Kebangsaan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Hukum dan Pemerintahan atas dasar system konstitusi (Hukum Dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas), cita-cita, tujuannya, tatanan dasar serta ciri-ciri khususnya.

Maka dari itu apabila kita akan benar-benar melaksanakan UUD 1945 murni dan konsekuen, kita harus benar-benar meresapi menghayati secara sungguh-sungguh alenia demi alenia, pasal demi pasal beserta penjelasannya maupun latar belakang terjadinya, pemikirannya, situasinya dan sebagainya.

Didalam penjelasan Umum UUD 1945 secara lugas dikatakan: bahwa untuk menyelidiki hukum dasar (droit constitutionalle) suatu negara tidak cukup hanya menyelediki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (Loi constitutionaelle) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya qeistlighan (Qeistlichen Heinterqrund) dari Undang-Undang Dasar itu.

b. NILAI INSTRUMENTAL

Nilai instrumental adalah merupakan penjabaran dari Nilai Dasar, sebagai arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Sifat sudah lebih kontekstual, dapat bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan jaman. Dari sudut kandungan nilainya, nilai instrumental ini merupakan kebijakan, strategi, organisasi, system, rencana, program sampai dengan proyek-proyek guna mewujudkan nilai dasar tersebut.

Nilai instrumental adalah merupakan kontekstualisasi dari nilai dasar, guna mempertahankan agar nilai dasar tersebut tetap relevan dengan masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh masyarakat pada jamannya.

Nilai instrumental terpengaruh oleh perubahan waktu, situasi, ruang dan waktu sehingga oleh karena itu memerlukan penyesuaian secara berkala.

Contoh: GBHN, UU, PP, Instruksi dan lain sebagainya yang harus tetap mengacu pada nilai dasar itu sendiri guna membina Nilai Praksis yang ada dalam kenyataan.

c. NILAI PRAKSIS

Nilai Praksis merupakan interaksi antara nilai instrumental dengan situasi kongkrit pada tempat tertentu, situasi tertentu, sifatnya amat dinamis. Nilai Praksis terdapat dalam demikian banyak ujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, cabang legislatif, cabang yudikatif maupun oleh organisasi kekuatan sosial politik, ormas, badan-badan ekonomi, warga negara, ataupun pemimpin-pemimpin masyarakat. Ringkasnya Nilai Praksis itu terkandung dalam kenyataan sehari-hari, tegasnya cara bagaimana kita melaksanakan nilai Pancasila secara baik dan tepat serta taat asas. Di dalam masyarakat peranan yang diemban oleh adat-istiadat-moral atau budi pekerti, kebiasaan maupun ajaran-ajaran nilai adiluhung dari Kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Maka dari itu negara melindungi, menghargai dan menghormati agama ataupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun perlu di ingat bahwa negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sama sekali bukan negara agama dan bukan pula negara seculair.

Catatan: ada tiga corak negara seculair

1. Negara seculair yang anti agama atau negara seculairistis.
2. Negara seculair yang netral terhadap agama.
3. Negara seculair yang menghargai agama, melindungi dan menghormati agama negara Indonesia dapat disebut negara seculair dalam arti ini

3. PETA POLITIK KEBUDAYAAN

Sejak jaman voor de oorlog hingga kini peta politik Kebudayaan di Nusantara boleh dikatakan sama dan yang berbeda hanya frekuensi dan tekanannya.

Sebagaimana pernah berkali-kali sejak tahun 1986 hingga dewasa ini masalah tersebut selalu saya ungkapkan, terakhir di Hotel Patrajasa dalam forum Kebudayaan Jawa, yaitu masalah Semitisme dan Hellenisme.

Tahun 1955 dalam Sidang konstituante Semitisme hampir berhasil mengubah Dasar Negara dari Pancasila menjadi Islam. Waktu itu pergumulan sangat terbatas dalam ruang sidang konstituante sebagai pergumulan politik. Dewasa ini sangat terbuka dan luas yang dibarengkan dengan gerakan primordialisme maupun sektarian-isme.

Semitisme mengutamakan transendental dengan sama sekali melupakan rasionalitas dan nilai-nilai Pancasila, dengan tekad tegas, negara akan diatur dengan nilai-nilai ayat suci sentanapan mereka mengatakan tidak akan membuat negara agama.

Hellenisme menitik beratkan pada rationalitas individual. Imanensi menjadi acuan pemikirannya, secular.

Pergulatan antara keduanya, menjadikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjepit dan memang ada kesengajaan supaya hilang sama sekali, dengan dalih supaya kembali kepada induk agamanya, dengan klaim mayoritas 95 % pemeluknya.

Dalam penyelenggaraan pendidikan negeri agama hanya satu agama yang mayoritas yang dalam Lembaga Tinggi Negara kita luruskan namun hingga kini justru mengembang adanya Tadris.

Akhirnya tidak hanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa saja yang tidak berkembang akan tetapi agama minoritas lainnya-pun menemui kesulitan.

Dalam satu persidangan Komisi IX tahun 1983 dimana Menteri agama masih dijabat oleh Let.Jen Alamsyah Ratuperwira Negara

ada kesanggupan akan diswastakan sehingga tidak menimbulkan kerawanan, namun hingga kini justru semakin berkembang.

4. KUNCI PENENTU

UUD 1945 harus tetap apa adanya, sekali dibuka amandemen nampaknya akan merupakan pintu gerbang bagi mereka pemeluk agama mayoritas.

Semangat para penyelenggara negara harus tetap taat agar dalam arti disiplin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen, apapun agama mereka yang dipeluknya, dus harus ada pemisahan antara tugas dan kepentingan pribadinya.

Para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sendiri harus tegas tidak mangro tingal-tidak mendua pengakuan keyakinannya. Dan berani menyatakan dirinya sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti yang dilakukan oleh para Penghayat Kejawen, sekalipun resikonya tinggi, seraya memecaki prediksi-prediksi para sesepuh kejawen maupun Nostradamus.

Semoga jiwa damai dan bahagia dapat kita hayati bersama sehingga mampu menikmati rasa hidup merdeka dalam keMaha Merdekanya Tuhan Yang Maha Esa.

HASIL RUMUSAN
Dialog Pakar Budaya Spiritual

"Dialog Budaya Spiritual" yang diselenggarakan oleh Ditjen Kebudayaan telah diselenggarakan di Cipayung, Bogor tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Juni 1999 telah dihadiri oleh 70 peserta merupakan forum temu budaya antara Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan para pakar dari berbagai disiplin ilmu Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, setelah mendengarkan dan membahas :

1. Makalah Prof. Dr. Edi Sedyawati, Direktur Jenderal Kebudayaan, dengan judul : **"Penghayatan Kepercayaan : Substansi dan Metode".**
2. Makalah Prof. Dr. Usman Pelly: **"Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sebagai Wujud Budaya Spiritual".**
   Pembahas : Prof. Dr. Parsudi Suparlan
   Dr. Fridolin Ukur
   Prof. Dr. Yunus Melalatoa
3. Makalah Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomihardjo : **"Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Perspektif Gerakan Reformasi".**
   Pembahas : Dr. Kuntoro Wiryomartono
   Drs. Ida Bagus Agastia
   Brigjen Sumarsono
4. Makalah Dr. Mukhlis Paeni : **"Dinamika Gerakan Spiritual dalam Perspektif Sejarah".**
   Pembahas : Prof. Dr. Hasan Muarif Ambary
   Dr. Nurhadi Magetsari
   Prof. Dr. Zurkoni Yahya

5. Makalah Jusuf Kertanegara, S.H. (dibacakan oleh Chairul Imam, S.H.): **"Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Perspektif Hukum dan Perundangan".**
   Pembahas : Prof. Bismar Siregar, S.H.
   Nahar Nachrowi, S.H., M.Hum.
   (dibacakan oleh Muhammad Zahid, S.H.)
   Drs. K. Permadi, S.H.

6. Makalah Drs. Muhammad Damami, M.A. : " **Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Perspektif Filologis dan Kesusastraan".**
   Pembahas : Prof. Dr. Siti Chamamah Suratno
   Prof. Dr. Achadiati Ikram
   Prof. Dr. H. Moh. Ardani

7. Makalah Drs. Abdurrahman Widyakusuma: **"Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa".**
   Pembahas : Drs. Toeloes Koesoemoboedojo
   R. Djoko Sumono Sumodisastro

Menyepakati rumusan-rumusan sebagai berikut :

1. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dari pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengamalan budi luhur.
2. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud budaya spiritual adalah warisan rohaniah yang di anut oleh sebagian bangsa kita, yang bukan agama. Ia adalah warisan leluhur nenek moyang kita yang diyakini kebenarannya yang harus dilaksanakan penghayatannya dengan kesadaran utuh sampai ke lubuk hati yang terdalam. Dengan demikian, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan metoda

pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Pemisahan secara ketat antara agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan jaminan tidak terjadinya konflik antara keduanya, sebab antara keduanya terdapat persamaan, yaitu sama-sama meyakini adanya Dzat Yang Mutlak, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Perbedaannya terletak di dalam cara menyembah kepada Sang Pencipta.
4. Dari konstelasi pemikiran terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di atas wujud budaya spiritual yang berkembang dalam kehidupan manusia penghayat adalah sebagai :
   a. Ajaran yang mengandung ajaran religius seperti :
      1) Ajaran tentang ke Tuhanan Yang Maha Esa
      2) Ajaran tentang kewajiban manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa

   b. Ajaran yang mengandung nilai moral seperti :
      1) Nilai moral yang terkandung dalam hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri.
      2) Nilai moral yang terkandung dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya.
      3) Nilai moral yang terkandung dalam hubungan antara manusia dengan alam.

5. Masalah utama dalam masyarakat majemuk adalah masalah hubungan timbal balik antar kelompok yang terkait dengan kedudukan, hak dan wewenang masing-masing kelompok, terutama pada tatanan nasional. Hubungan-hubungan tersebut kadang-kadang sangat diwarnai oleh masalah-masalah politik dan perimbangan kekuasaan "intern" sesama mereka di satu pihak dan dengan sistem nasional di lain pihak. Oleh karena itu Ditjen Kebudayaan harus berusaha mendorong kelompok-kelompok paguyuban untuk segera kembali membentuk institusi atau badan asosiasi para penghayat yang kuat dan independen.

6. Budaya spiritual tidak hanya memiliki nilai magis (sakral) yang kaya, tetapi kekayaan itu juga terdapat dalam hasanah nilai-nilai moral dan etika. Apabila nilai-nilai moral etika budaya spiritual ini diinventarisasi, diseleksi, dikemas, dan dikembangkan dalam konteks kepentingan nasional dan masa kini, maka dia akan dapat memberi arah, pengayaan dan ciri khas (identitas) pada "Nation and character building" Indonesia yang akhir-akhir ini karena krisis ekonomi dan politik telah mandeg dan terbengkalai.
7. Budaya spiritual kelompok-kelompok paguyuban telah menjadi identitas kedua dari masing-masing kelompok masyarakat pendukung budaya itu. Dari lebih kurang 569 kelompok penghayat ternyata hanya sebagian kecil para pendukungnya yang berasal dari berbagai etnis dan telah mengembangkan diri melintasi kecamatan atau propinsi tempat kelahirannya. Paguyuban Subud, Pangestu, atau Sumarah umpamanya, anggota-anggota mereka terdiri dari berbagai kelompok etnik, agama, dan tersebar di berbagai propinsi

SARAN DAN REKOMENDASI

1. Pembinaan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu dilakukan dengan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Naskah-naskah yang diyakini mengandung butir-butir ajaran bagi para penghayat perlu dikaji dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, antara lain pendekatan antropologis, sosiologis, filologis, dan sejarah.
3. Temu budaya dan seminar sebagai forum para penghayat dan para ahli lain perlu ditingkatkan frekuensi pelaksanaannya, sementara penerbitan buku, jurnal ilmiah, dan kamus serta

ensiklopedi yang menyangkut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu makin digalakkan.

4. Pembinaan para penghayat sebagai kelompok warga negara perlu diperhatikan, dilindungi, dibina, dan dilibatkan dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa.
5. Kelompok-kelompok penghayat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan nasional dengan dukungan dana, sarana, dan prasarana yang memadai.

Cipayung, 20 Juni 1999

TIM PERUMUS :
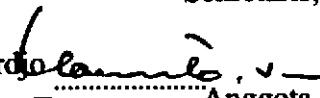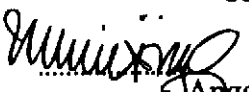
1. Prof. Dr. Hasan Muarif Ambary .... Ketua
2. Dr. Hasan Alwi .... Sekretaris,
3. Prof.Dr. Koento Wibisono Siswomihardjo .... Anggota,
4. Dr. I. G. N. Anom .... Anggota,
5. Dr. Anhar Gonggong .... Anggota,
6. Dr. Sri Hastanto, S.Kar. .... Anggota,
7. Dr. Endang Sri Hardiati .... Anggota,
8. Drs. Nunus Supardi .... Anggota,
9. Drs. Abdurrahman Widyakusuma .... Anggota,
10. Drs. Luthfi Asiarto .... Anggota,

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan Nasional (dulu Depdikbud) pada tanggal 18 s.d 20 Juni 1999, telah mengadakan dialog budaya dengan para pakar dari berbagai disiplin ilmu dan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dialog tersebut membahas tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari berbagai disiplin ilmu dan sudut pandang dengan tujuan memperoleh wawasan baru mengenai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memperoleh masukan bagi pengambilan kebijakan Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam upaya pelestarian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai perwujudan kebudayaan bangsa.

Dialog Budaya Spiritual tersebut menampilkan para pembicara yang terdiri atas Prof. Dr. Edi Sedyawati, Prof. Dr. Usman Pelly, Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomihardjo, Dr. Mukhlis Paeni, Jusuf Kertanegara, SH., Drs. Mohammad Damami, MA., dan Dr. Abdurrahman Widyakusuma.

Para pembahas terdiri atas Prof. Dr. Parsudi Suparlan, Dr. Fridolin Ukur, Prof. Dr. Yunus Melalatoa, Dr. Kuntoro Wiryomartono, Drs. Ida Bagus Agastia, Brigjen Sumarsono, Prof. Dr. Hasan Muarif Ambary, Dr. Nurhadi Magetsari, Prof. Dr. Zurkoni Yahya, SH.M.Hum., Prof. Bismar Siregar, SH., Moh. Nahar Nahrowi & Moh. Zahid, SH., Drs. K. Permadi, SH., Prof. Dr. Chamamah Suratno, Prof. Dr. Achadiati Ikram, Prof. Dr. H. Moh. Ardani, Drs. Toeloes Koesoemoboedojo, dan R. Djoko Sumono Sumadisastro.

Buku ini merupakan kumpulan dari makalah serta rumusan hasil dialog budaya tersebut, yang diterbitkan dalam usaha memberikan wawasan kepada masyarakat tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan segala keragamannya...